

**PERSEPSI GURU TENTANG PROSES PEMBERIAAN HUKUMAN DI
LINGKUNGAN SEKOLAH (STUDI KASUS DI SMA NEGERI 1 LEMBANG
KABUPATEN PINRANG)**



TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister dalam Bidang Pendidikan dan Keguruan
Pada Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Oleh :

ADRIWATI

NIM : 80100210007

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
PASCASARJANA
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2014

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

“Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa Tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka Tesis ini beserta gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.”

Makassar, Agustus 2014

Penyusun

ADRIWATI

NIM: 80100210007

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PERSETUJUAN PENGUJI

Tesis dengan judul **“Persepsi guru tentang Proses Pemberiaan Hukuman di Lingkungan Sekolah (Studi Kasus di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang)** yang disusun oleh Saudari ADRIWATI, NIM : 80100210007 telah diseminarkan dalam Seminar Hasil Penelitian Tesis yang diselenggarakan pada hari Kamis 26 September 2013 M, memandang bahwa tesis tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah yang dapat disetujui untuk menempuh ujian Munaqasyah Tesis

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Promotor:

1. Dr. H. Salehuddin, M.Ag (.....)
2. Dr. Muljono Damopolii, M.Ag. (.....)

Penguji:

1. Prof. Dr. H. Abd. Rahman Halim, M.A. (.....)
2. Dr. Muhammad Yaumi, M.Hum, M.A. (.....)
3. Dr. H. Salehuddin, M.Ag (.....)
4. Dr. Muljono Damopolii, M.Ag. (.....)

Makassar, April 2014

Diketahui oleh:

Direktur Pascasarjana

UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Moh. Natsir Mahmud, M.A.

NIP. 19540816 198303 1 004

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه
اجمعين اما بعد

Puji syukur ke hadirat Allah swt., peneliti panjatkan, yang telah memberikan taufik dan petunjuk-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., Nabi sekaligus Rasul yang membawa ajaran yang mengantar umat manusia untuk meraih kebahagiaan di dunia dan Akhirat.

Selanjutnya, peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian studi dan penyusunan tesis ini tentunya tidak dapat penulis selesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara moral maupun material. Kepada mereka patutlah kiranya penulis dengan penuh kerendahan hati menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, M.S., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, para Pembantu Rektor, dan seluruh Staf UIN Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. H. Moh. Natsir Mahmud, M.A., selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.
3. Bapak Dr. H. Salehuddin, M.Ag. dan Dr. Muljono Damopolii, M.Ag., selaku promotor dan kopromotor, atas bimbingan dan motivasi yang diberikan kepada peneliti dalam penyelesaian tugas ini.

4. Drs. M. Darwis L, M. Pd., selaku Kepala SMA Negeri 1 Lembang beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan izin meneliti dan banyak memberikan bantuan dalam melaksanakan penelitian ini.
5. Rekan Pendidik di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang yang telah memberikan konstribusi pemikiran dan informasi yang peneliti butuhkan.
6. Ayahanda Amir Paga B.A. dan ibunda Ratna A.Ma. al marhum dan al marhumah terhormat dan tercinta atas amanah studinya, segala dedikasi peneliti persembahkan untuk keduanya. Kakak, dan kakak ipar, yang selalu memberi motivasi dan materi demi kelancaran tugas penelitian, atas doa dan bantuan yang tidak terhingga, semoga kebersamaan yang ada senantiasa terasa indah karena cinta dan sayang-Nya senantiasa meliputi kita semua.
7. Suami Sukri, S.E., M.Si., yang dengan sabar mendampingi peneliti mencari informasi dan bahan untuk kelengkapan tesis.
8. Anak-anak Muhammad Rayyan, Muhammad Anas Budi, dan Abdul Muqtadir, atas pengertian ananda dan waktu yang ananda berikan kepada ibu.
9. Teman-teman angkatan 2010-2011 Program Studi Dirasah Islamiyah, kebersamaan adalah anugerah terindah yang Allah berikan kepada kita jangan sampai hilang. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu baik secara langsung maupun tidak langsung membantu selama menjalankan studi di Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.

Teriring doa semoga Allah swt., memberikan balasan yang berlipat ganda atas kebaikan dan ketulusan kepada semua pihak yang membantu dan memberikan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis ini.

Akhir kata dari peneliti semoga tesis ini sesuai dengan harapan kita semua dan bermanfaat terutama bagi peneliti secara khusus dan para pembaca umumnya.
Amin.

Makassar, Agustus 2014

ADRIWATI

NIM. 80100210007



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-24
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Fokus Penelitian	15
D. Kajian Pustaka	18
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	22
BAB II TINJAUAN TEORETIS	25-59
A. Persepsi.....	25
1. Pengertian Persepsi.....	25
2. Faktor-faktor yang Memengaruhi Persepsi.....	26
B. Hukuman dalam Dunia Pendidikan.....	29
1. Pengertian Hukuman.....	29
2. Dasar Pemberian Hukuman dalam Pendidikan	31
3. Kedudukan Hukuman dalam Dunia Pendidikan.....	33
4. Tujuan Hukuman dalam Dunia Pendidikan.....	36
5. Fungsi Hukuman dalam Pendidikan.....	39
6. Jenis-jenis Hukuman.....	40
7. Kaidah Penerapan Hukuman dalam Pendidikan.....	47
8. Dampak Positif dan Dampak Negatif Pemberian Hukuman.....	51

	C. Kerangka Pikir	55
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	60-67
	A. Jenis dan Lokasi Penelitian	60
	B. Pendekatan Penelitian	61
	C. Sumber Data.....	62
	D. Metode Pengumpulan Data.....	63
	E. Instrumen Penelitian	64
	F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	65
BAB IV	PERSEPSI GURU DAN BENTUK PEMBERIAN HUKUMAN DI LINGKUNGAN SMA NEGERI 1 LEMBANG KABUPATEN PINRANG	68-127
	A. Profil SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang	68
	B. Gambaran Proses Pemberian Hukuman di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang	75
	C. Persepsi Guru Tentang Kesesuaian Kategori Pelanggaran dengan Jenis Hukuman Yang Diberikan Kepada Peserta Didik di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang	100
	D. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberian Hukuman di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang Serta Solusinya	122
BAB V	PENUTUP.....	128-130
	A. Kesimpulan.....	128
	B. Implikasi	129
	DAFTAR PUSTAKA	131-133
	DAFTAR LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Fokus Penelitian	17
Tabel 4.1 Keadaan Peserta Didik dan Jumlah Kelas	70
Tabel 4.2 Keadaan Sarana dan Prasarana	71
Tabel 4.3 Jenis Pelanggaran Berdasarkan Kriteria	75
Tabel 4.4 Klasifikasi Pelanggaran Berdasarkan Kategori	79
Tabel 4.5 Klasifikasi Hukuman Berdasarkan Bentuk Hukuman	83
Tabel 4.6 Frekuensi Bentuk Pelanggaran Periode Nov 2012-Januari 2013.....	91
Tabel 4.7 Klasifikasi Pelanggaran Berdasarkan Persepsi Guru	96

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	i	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef

ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah</i> dan <i>ya</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْل : *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ...	<i>fathāh</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
وِ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māṭa*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathāh*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditranslit

erasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمْ : *nu‘ima*

عُدُّوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِإِلَهِ *dīnullāh* بِإِلَهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat,

maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala bait wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārak

Syahrū Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

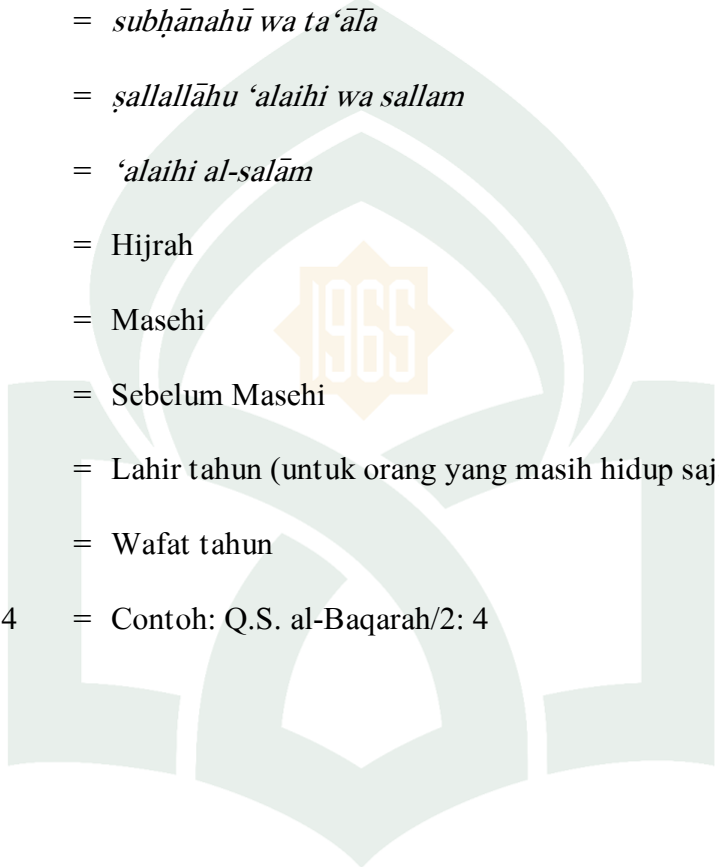
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contohnya:

Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:



swt.	=	<i>subhānahū wa ta‘āfa</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Maschi
SM	=	Sebelum Maschi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
Q.S. .../...: 4	=	Contoh: Q.S. al-Baqarah/2: 4

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama : Adriwati

NIM : 80100210007

Judul : Persepsi Guru Tentang Proses Pemberian Hukuman di Lingkungan Sekolah
(Studi Kasus di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa sampai saat ini pemberian hukuman di lingkungan sekolah masih menjadi perdebatan bahkan ada yang sampai merambah ke ranah hukum. Salah satunya disebabkan persepsi guru termasuk masyarakat tentang pemberian hukuman yang berbeda. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mendeskripsikan proses pemberian hukuman di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang, (2) untuk mendeskripsikan persepsi guru tentang kesesuaian kategori pelanggaran dengan jenis hukuman yang diberikan kepada peserta didik di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang, dan (3) untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat proses pemberian hukuman di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang serta solusinya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif karena penelitian ini menggambarkan kondisi riil tentang persepsi guru tentang proses pemberian hukuman di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan psikologis, pendekatan pedagogis, pendekatan sosiologis, pendekatan yuridis, dan pendekatan teologis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang langsung diterima di lapangan dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Instrumen penelitian yang digunakan meliputi pedoman observasi, pedoman wawancara, dan alat dokumentasi. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dilakukan mulai dari *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data) dan *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Proses pemberian hukuman terhadap peserta didik di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang mulai dari hukuman ringan, hukuman sedang, sampai kepada hukuman berat, (2) Persepsi guru terhadap pemberian hukuman terdapat perbedaan pendapat tentang relevansi kategori pelanggaran dengan jenis hukuman yang diberikan, (3) Faktor pendukung

dalam proses pemberian hukuman di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang adalah dukungan dari kepala sekolah dan guru serta orang tua peserta didik, kesadaran dari peserta didik dalam menaati peraturan sekolah. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam proses pemberian hukuman di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang meliputi 2 hal yaitu faktor internal yang berasal dari peserta didik dan guru serta faktor eksternal yaitu pengaruh yang datangnnya dari orang tua dan masyarakat. Upaya solutif yang dilakukan yaitu pihak sekolah senantiasa menjaga hubungan dan komunikasi yang baik kepada masyarakat terutama orang tua peserta didik.

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa implikasi kepada pihak yang berkompeten dalam proses pemberian hukuman di sekolah. Guru sangat berperan dalam proses pemberian hukuman di sekolah. Oleh karena itu guru perlu memiliki pengetahuan yang luas sehingga proses pemberian hukuman dilakukan secara adil dan bijaksana. Kerjasama serta komunikasi yang baik antara keluarga, sekolah serta masyarakat sehingga dapat berperan dalam pembentukan kepribadian yang baik bagi peserta didik. Hal ini perlu agar kesadaran mematuhi peraturan timbul dari dirinya sendiri sehingga hukuman tidak perlu lagi dilakukan.

**PERSEPSI GURU TENTANG PROSES PEMBERIAN HUKUMAN DI
LINGKUNGAN SEKOLAH (STUDI KASUS DI SMA NEGERI 1 LEMBANG
KABUPATEN PINRANG)**



Tesis

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister dalam Bidang Pendidikan dan Keguruan pada
Program Pascasarjana UIN Alauddin
Makassar

Oleh:

ADRIWATI

NIM: 80100210007

**PROGRAM PASCASARJANA
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2014

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prioritas pendidikan nasional adalah peningkatan sumber daya manusia (SDM). Hal ini tercermin dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa:

Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.¹

Seiring dengan perkembangan zaman yang diikuti oleh perkembangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, tuntutan masyarakat terhadap dunia pendidikan semakin kompleks pula. Dunia pendidikan diyakini memiliki kontribusi yang tidak sedikit terhadap perkembangan dan kemajuan masyarakat, diharapkan mampu mempersiapkan generasi yang handal. Kegagalan mereka untuk dapat menyesuaikan diri dengan kondisi sosial dianggap sebagai kegagalan institusi pendidikan secara umum.

Guru sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap proses pembentukan perilaku peserta didik di sekolah berusaha untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap dunia pendidikan. Segala potensi yang dimiliki oleh pendidik diterapkan dengan memanfaatkan sarana dan alat pendidikan baik alat material maupun nonmaterial, tindakan preventif, berupa larangan, dan tindakan kuratif, berupa hukuman yang kesemuanya bertujuan untuk memacu pembentukan mental peserta didik ke arah yang positif.

¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 7.

Pengendalian perilaku peserta didik, yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan pendidikan, terkadang dilakukan dengan cara memberikan hukuman yang dianggap tidak sesuai dengan kaidah dan tujuan pendidikan. Hal inilah yang menjadi sasaran kritikan para aktivis perlindungan anak atau orang tua yang beranggapan bahwa penerapan hukuman itu tidak sesuai dan tidak seimbang dengan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik. Bukan hanya orang tua, para pakar pendidikan pun tidak sepakat dengan usaha pengendalian perilaku peserta didik di sekolah dengan memberikan hukuman yang sama porsi dan tekanannya dengan penerapan hukuman yang berlaku di dunia hukum pidana maupun perdata.²

Dalam diskursus mengenai apakah perlu ada hukuman bagi kesalahan dan kelalaian peserta didik atau tidak, telah menjadi suatu perdebatan di antara pakar pendidikan. Hal ini telah menimbulkan pro dan kontra, setuju dan tidak setuju, dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan bahkan dilarang dilakukan.

Ada kecenderungan pendidikan modern sekarang ini memandang tabu hukuman dan dianggap tidak layak disebut-sebut, bahkan dikaitkan pula dengan HAM dan masuk kategori kekerasan. Namun pernyataan lain justru memandang bahwa hukuman perlu diterapkan sebagai bentuk pembelajaran bagi pelanggar yang dalam dunia pendidikan dijadikan sebagai motivasi bagi peserta didik untuk tidak mengulangi pelanggarannya.

Pada awal kemerdekaan, hukuman mendominasi usaha pengendalian perilaku seseorang termasuk peserta didik di sekolah. Bagi mereka yang hidup di zaman

²Prayitno, *Dasar Teori dan Praktis Pendidikan* (Cet. I; Jakarta: Grasindo. 2009), h. 152-153.

penjajahan atau awal kemerdekaan, kata hukuman merupakan hal yang tidak asing lagi.³

Meskipun zaman telah maju, hukuman sebagai salah satu alat pengendali perilaku peserta didik masih relevan digunakan. Hukuman secara fisik dan nonfisik dari pendidik terhadap peserta didik merupakan hal yang tidak jarang terjadi dalam sistem pendidikan di Indonesia. Padahal dalam kenyataannya pola pendidikan yang dilakukan dengan cara menyakiti peserta didik baik fisik maupun non fisik tidak sesuai dengan tujuan pendidikan dan merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Bab 54 yang dengan tegas menyatakan bahwa “Pendidik dan siapapun lainnya di sekolah dilarang untuk memberikan hukuman fisik kepada para peserta didik”.⁴

Hukuman fisik seperti jalan jongkok keliling halaman sekolah, bagi peserta didik yang terlambat, berdiri di tengah lapangan pada saat terik matahari karena tidak mengerjakan tugas, menggunting sebagian rambut kepala bagi peserta didik pria yang melebihi ukuran rambut yang telah ditentukan, memukul anggota badan dengan tangan atau kaki atau benda keras lainnya kadang diterapkan di lingkungan pendidikan termasuk di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang.

Hukuman psikis berupa ungkapan kata-kata yang kasar, suara yang keras, larangan mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu, larangan mengikuti kegiatan ekstra kurikuler, menggunting rok atau baju bagi peserta didik yang tidak sesuai ukuran baju dan model yang telah ditentukan, menyuruh peserta didik mengenakan pakaian yang tidak sesuai, peserta didik wanita mengenakan

³Sukardi, *Guru Powerful Guru Masa Depan* (Cet. III; Bandung: Kolbu. 2009), h. 122.

⁴Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

celana pria dan peserta didik pria mengenakan rok. Bentuk hukuman ini menjadi alat pendidikan di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang yang tidak jarang menimbulkan komentar dan tanggapan yang beragam dari para guru.

Menurut para ahli pendidikan modern, khususnya yang menganut pendekatan humanistik, hukuman sebaiknya tidak sering dilakukan. Mereka beranggapan bahwa hukuman yang sering dilakukan dapat menyebabkan anak atau peserta didik mengalami gangguan dalam pertumbuhan psikisnya. Aliran ini berpendapat, hukuman hendaknya dilakukan sebagai langkah terakhir apabila cara-cara pengendalian perilaku yang lain dianggap tidak ampuh.⁵

Pelanggaran terhadap aturan yang dilakukan oleh peserta didik dianggap oleh Oswald Kroch sebagaimana yang dikutip oleh Desmita adalah hal yang wajar dan dapat dikategorikan sebagai tahapan pengalaman kegoncangan jiwa yang dimanifestasikan dalam bentuk sifat *trotz* atau sifat “keras kepala”. Lebih lanjut ahli psikologi ini membagi tahapan pengalaman kegoncangan jiwa ke dalam tiga fase yaitu: fase anak awal, fase keserasian sekolah, dan fase kematangan.⁶

Guru sebagai orang yang terlibat langsung dalam proses pembentukan karakter peserta didik sebaiknya lebih bijak dalam menerapkan hukuman terhadap peserta didik. Kembali menurut Oswald, fase anak awal 0–3 tahun dan fase keserasian sekolah 3–13 tahun. Fase anak awal ditandai dengan anak serba

⁵Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, h. 123.

⁶Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik: Panduan bagi Orang Tua dan Guru dalam Memahami Psikologi Anak Usia SD, SMP, dan SMA* (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009) h. 24.

membantah atau menentang orang lain yang disebabkan anak mulai sadar akan kemampuannya untuk berkemauan dan anak ingin menguji kemauannya.⁷

Peserta didik yang berada pada fase kematangan 13–21 tahun mulai menyadari kekurangan dan kelebihan yang terdapat pada dirinya ditanggapi dengan sikap yang wajar, anak mulai dapat menghargai pendapat orang lain, dapat memberikan toleransi terhadap keyakinan orang lain serta hak orang lain.⁸ Penerapan hukuman pada fase–fase ini akan berdampak negatif terhadap proses perkembangan jiwa peserta didik.

Jika dilihat dari sudut pandang psikologi, hukuman dan ancaman pada umumnya dianggap sebagai cara yang sebaiknya dihindari, karena hukuman hanya akan menjauhkan seseorang dari perilaku yang tidak diinginkan, tetapi tidak mengarahkan agar menerapkan perilaku yang disukai. Hal ini juga berakibat pada orang-orang termasuk peserta didik cenderung terampil menghindari hukuman dan tidak menyebabkan mereka berperilaku sesuai dengan aturan. Hukuman dalam hal ini adalah apa saja yang membuat si terhukum tidak merasa nyaman, karena para psikolog berpendapat bahwa hukuman adalah apa saja yang cukup tidak disukai sehingga memacu seseorang termasuk peserta didik mengurangi perilaku yang menyebabkan mereka mendapat hukuman.⁹

Teori sosial yang berkaitan langsung dengan imbalan, hukuman, dan hasil yang diharapkan untuk pekerjaan mengemukakan, “Manusia adalah makhluk yang

⁷Desmita, h. 24 .

⁸Desmita, h. 24.

⁹Scoot Suair, *Motivasi Leadership* (Cet. I; Jakarta: Prenada. 2008), h. 120-122.

paling rumit”, sehingga mereka termotivasi untuk menjaga diri mereka dengan cara-cara tertentu yang dapat menghindarkan mereka dari teguran atau hukuman.¹⁰

Kenyataan yang terjadi di lingkungan masyarakat menunjukkan bahwa hukuman dianggap cara yang “cepat” dalam proses pengendalian perilaku, termasuk juga di lingkungan pendidikan khususnya sekolah. Penerapan hukuman kepada peserta didik yang melanggar peraturan dianggap paling cepat untuk mengembalikan mereka kepada aturan yang berlaku.¹¹

Hukuman yang diberikan kepada peserta didik yang membuat kesalahan saat proses pembelajaran berlangsung diharapkan supaya peserta didik mau mengubah diri dan berusaha memacu motivasi belajarnya. Pada lingkungan yang lain, fakta menyatakan bahwa orang-orang memiliki kecenderungan menyelesaikan suatu tugas jika mereka mengetahui hubungan langsung antara tugas dan imbalan yang diterima, termasuk akibat dari kelalaian mereka terhadap tugas yang diberikan.¹²

Ahli psikologi dan ahli pendidikan hampir sependapat bahwa cara orang tua memperlakukan anak atau mendidik anak di rumah sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku anak di lingkungannya. Pola penerapan dan pelaksanaan proses pendidikan di lingkungan sekolah memberikan pengaruh terhadap perkembangan psikologi peserta didik yang akan berdampak terhadap kesiapan peserta didik untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial.¹³

¹⁰Scoot Suair, *Motivasi Leadership*, h. 121.

¹¹Sukadi, *Guru Powerful Guru Masa Depan*. h.123.

¹²Scoot Suair, *Motivasi Leadership*, h. 121.

¹³Veithzal Rivai, dan Sylviana Murni, *Education Managemen Analisis Teori dan Praktik* (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pres. 2010), h. 54.

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara hukuman berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku diterapkan terhadap berbagai pelanggaran dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk menjaga dan menegakkan keamanan, ketertiban, dan keadilan dalam kehidupan. Hukuman yang dikenakan terhadap pelanggaran pidana dan perdata juga merupakan delik aduan, merupakan tindakan yang tidak tepat jika diterapkan dalam dunia pendidikan.

Sekolah sebagai lembaga formal, dalam menetapkan aturan dalam hal ini tata tertib sebaiknya melibatkan orang tua peserta didik untuk menentukan jenis dan bentuk hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik di sekolah. Pengalihan amanah dari orang tua peserta didik kepada pihak sekolah sebaiknya diawali dengan kesepakatan bersama melalui pertemuan antara pihak sekolah dan orang tua peserta didik.

Perlu menjadi bahan perhatian bahwa pelanggaran yang dilakukan peserta didik, khususnya dalam situasi pendidikan, adalah berbeda dari pelanggaran-pelanggaran oleh anggota masyarakat umum. Pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik sifatnya non formal seperti terlambat tiba di sekolah, tidak mengerjakan tugas, ukuran rambut yang tidak sesuai dengan aturan, model pakaian yang tidak sesuai dengan aturan, keluar masuk pada saat proses pembelajaran, tidur di ruang kelas atau mushalah pada saat jam belajar, mencoret dinding bangunan, lompat pagar, dan sebagainya adalah merupakan pelanggaran yang bersifat kondusif.

Pendidik perlu secara arif memahami tingkah laku yang ditampilkan oleh peserta didik dan menyikapinya dengan penuh pengakuan dan penerimaan yang indah, kasih sayang, dan kelembutan. Tindakan apapun dilakukan oleh pendidik harus tetap dalam rangka upaya pendidikan. Setegas apapun perlakuan pendidik

terhadap peserta didik harus diarahkan untuk mengembangkan pribadi peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan.¹⁴

Guru harus tetap melakukan pendekatan manusiawi dengan memanfaatkan segenap potensi kemanusiaannya, mengukur dan bertindak berdasarkan nurani, sehingga peserta didik yang memperoleh hukuman dapat memanfaatkan nuraninya untuk mencerna dan menerima hukuman yang diberikan. Hal ini pada akhirnya dapat membangkitkan kesadaran peserta didik untuk menolong dirinya dengan cara berbuat sesuai dengan aturan tata tertib yang berlaku di sekolah.

Usaha guru dalam menerapkan upaya untuk membentuk pribadi peserta didik sebaiknya tidak hanya mengandalkan penerapan hukuman apalagi jika didasari karena perasaan jengkel, balas dendam dan niat untuk menyakiti peserta didik, tetapi sebaiknya upaya itu diiringi dengan niat ikhlas diiringi dengan doa kepada Allah swt. semoga upaya itu dapat membantu peserta didik menemukan jati dirinya.

Pendidikan adalah usaha membentuk spektrum intelegensi manusia yang sasarannya bukan hanya intelegensi akademik tetapi juga harus meliputi intelegensi emosional, estetika, dan interpersonal.¹⁵ Untuk membentuk spektrum intelegensi manusia dibutuhkan seperangkat alat yang dapat berfungsi sebagai sarana yang dapat membantu mengembangkan potensi peserta didik sehingga dapat berkembang secara optimal, baik alat pendidikan yang bersifat preventif yang berusaha mengarahkan perilaku peserta didik ke arah yang positif, maupun alat pendidikan bersifat kuratif yang bermaksud mencegah terjadinya hal-hal yang tidak dikehendaki seperti

¹⁴Prayitno, *Dasar Teori dan Praktis Pendidikan*, h. 152-153.

¹⁵H.A.R. Tilaar. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional* (Cet. II; Jakarta: Renika cipta, 2004), h. 54.

tindakan sadis dan perilaku peserta didik yang tidak sesuai dengan tatanan yang ada dalam masyarakat.¹⁶

Guru yang bijaksana akan senantiasa mengendalikan sikap dan perilaku peserta didik dengan menggunakan pendekatan positif dan berusaha mencari serta menggunakan berbagai metode sehingga proses pendidikan dilakukan dengan cara efektif, menyenangkan, dan manusiawi. Jika pemanfaatan berbagai cara belum berhasil, penerapan hukuman dapat dilakukan tetapi harus dilakukan dengan menggunakan kaidah yang tepat. Penerapan hukuman yang diberikan tanpa memperhatikan kaidah penerapan hukuman dapat berakibat peserta didik kurang percaya diri, kreativitasnya terhambat, perkembangan jiwanya terganggu, bahkan akibat yang lebih parah peserta didik akan bersikap kasar dan sadis terhadap orang lain.

Hukuman sebagai salah satu alat pengendalian sikap dan perilaku tidak dapat digunakan untuk semua jenis pelanggaran dan untuk semua usia. Hukuman hanya diperlukan apabila pelanggaran yang dilakukan peserta didik sudah sangat serius, seperti peserta didik melakukan perbuatan yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, atau menentang kewibawaan orang tua secara terang-terangan.¹⁷

Agar penerapan hukuman sebagai alat pengendali perilaku peserta didik dapat berfungsi secara efektif, penerapannya harus dikombinasikan dengan metode lain yaitu, *reward* dan *reinforcement*.¹⁸

¹⁶Arif Rahman, *Spektrum Problematika Pendidikan di Indonesia* (Cet. V; Surabaya: Laksbang Mediatama Yogya, 2009), h.54.

¹⁷Charles Schaefer, *Cara Efektif mendidik dan Mendisiplinkan Anak* (Terj. Jakarta: Mitra Utama; 1994), h. 93.

¹⁸Mallary M. Collins, *Mengubah Perilaku Siswa Pendekatan Positif* (Terj. Jakarta: BPK Gunung Mulia; 1992), h. 75.

Meskipun hukuman sebagai alat pengendali perilaku peserta didik dapat dilakukan, akan tetapi guru yang profesional harus melakukan dengan penuh pertimbangan dan berusaha agar penerapan hukuman tidak dijadikan sebagai tradisi dalam usaha mengendalikan perilaku peserta didik. Peserta didik yang mendapatkan hukuman akan terganggu perkembangan kesehatan mental dan emosinya karena kebutuhan psikologis berupa kebutuhan memperoleh penghargaan, kepercayaan, rasa aman, dan kasih sayang tidak terpenuhi, sehingga akan membawa masalah-masalah emosional dengan bentuk *maladjustment* (salah pengaturan).

Sukadi sebagaimana yang dikutip oleh M. Dalyono bahkan lebih tegas mengemukakan penolakannya terhadap penerapan hukuman kepada anak termasuk peserta didik, karena menurutnya pemberian hukuman tidak menyelesaikan masalah, bahkan dapat menumbuhkan benih-benih kebencian dan pembangkangan di hati peserta didik dan mengajarkan melakukan tindak kekerasan terhadap orang yang dianggap telah melanggar haknya.¹⁹

Sebagaimana penulis telah paparkan sebelumnya bahwa dalam kenyataan yang terjadi di lingkungan masyarakat, hukuman dianggap cara yang “cepat” dalam proses pengendalian perilaku, termasuk juga di lingkungan pendidikan, khususnya di sekolah. Penerapan hukuman kepada peserta didik yang melanggar peraturan dianggap paling cepat untuk mengembalikan mereka kepada aturan yang berlaku. Akan tetapi di balik tindakan tersebut tersimpan dampak negatif yang tidak disadari.

Hukuman secara fisik dan psikis dari pendidik terhadap peserta didik merupakan hal yang tidak jarang terjadi dalam sistem pendidikan di Indonesia. Padahal dalam kenyataannya pola pendidikan yang dilakukan dengan cara menyakiti peserta

¹⁹M. Dalyono. *Psikologi Pendidikan* (Cet. V : Jakarta; 2009), h. 236.

didik baik fisik maupun nonfisik tidak sesuai dengan tujuan pendidikan dan merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23, Bab 54 yang dengan tegas menyatakan bahwa pendidik dan siapapun lainnya di sekolah dilarang untuk memberikan hukuman fisik kepada para peserta didik.²⁰

Hukuman selalu berkonotasi negatif, tidak mengenakkan, menyakitkan dan menyengsarakan. Hukuman adalah sesuatu yang tidak disukai, dihindari, dan sebaiknya tidak terjadi pada siapapun, kecuali pada penjahat dan pelanggar hukum. Kesalahan yang dilakukan peserta didik lebih beragam dari pelanggaran yang bersifat formal.²¹ Sifatnya lebih nonformal sampai pada hal yang sangat pribadi, seperti pelanggaran dalam pakaian seragam, kehadiran di sekolah, tata tertib, dan pelanggaran dalam mengikuti pelajaran. Pelanggaran yang sifatnya pribadi itu berada dalam kawasan pengembangan sehingga perlakuan terhadap pelanggaran pada kawasan ini harus menguntungkan atau minimal tidak merugikan peserta didik.²² Tindakan tegas memang harus diambil, kesalahan atau pelanggaran itu harus ditindak, tetapi hal ini tidak berarti bahwa pendidik boleh melakukan kekerasan, pemaksaan, tindakan fisik, apalagi balas dendam tetapi pendidik harus mengedepankan nilai-nilai positif pendidikan yang secara pasti mengarah kepada pengembangan peserta didik.²³

²⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

²¹Berupa pelanggaran terhadap hukum perdata, pidana dan delik aduan.

²²Prayitno, *Dasar Teori dan Praktis Pendidikan*, h.157.

²³Prayitno, *Dasar Teori dan Praktis Pendidikan*, h. 169.

Hukuman memberikan efek terhadap perilaku. Hukuman diartikan sebagai penguatan negatif akan berdampak terhadap peningkatan perilaku, tetapi pada sisi yang lain penerapan hukuman memiliki satu penurunan atau tekanan atas perilaku.²⁴

Hukuman yang dilakukan dengan tidak menggunakan kaidah-kaidah yang tepat dapat menyebabkan peserta didik kurang percaya diri, kreativitasnya terhambat, perkembangan jiwanya terganggu, bahkan dapat mengakibatkan mereka bersikap kasar dan sadis terhadap orang lain.²⁵ Hukuman dimaksudkan untuk melatih tanggung jawab, bukan untuk menekan perasaan peserta didik. Oleh karena itu, hukuman atau celaan hendaknya di arahkan pada tingkah lakunya yang salah, bukan pada diri peserta didik.

Hukuman juga harus konsisten, sebab hukuman yang dilakukan secara tidak konsisten, selain tidak efektif juga dapat berbahaya bagi pertumbuhan jiwa anak dan wibawa guru. Konsisten bukan berarti harus kaku. Aturan juga dapat berubah atau longgar pada kejadian-kejadian atau kasus-kasus luar biasa, atau dalam keadaan darurat.²⁶

Tujuan penerapan hukuman adalah untuk menghentikan perilaku yang tidak sesuai dengan aturan, dalam waktu lama bertujuan mengajar dan mendorong anak atau peserta didik untuk menghentikan sendiri perilaku yang salah agar mereka dapat mengarahkan dirinya sendiri. Penerapan hukuman bertujuan sebagai penem-

²⁴Anita E. Woolfolk dan Lorraine McCune-Nicolich, *Mengembangkan Kepribadian & Kecerdasan Anak-Anak* (Cet.I: Inisiasi Pres; Jakarta. 2004), h. 226.

²⁵Sukadi, *Guru Powerful Guru Masa Depan.*, h. 125.

²⁶Sukadi, *Guru Powerful Guru Masa Depan*, h. 128.

paan karakter.²⁷ Menghukum seharusnya menyadarkan orang akan kesalahannya serta menanamkan keinginan memperbaiki diri.²⁸

Setelah mengalami proses penyadaran, pendidikan akan mampu membebaskan manusia dari belenggu hidup dan pada akhirnya akan membebaskan manusia sekaligus mengembalikan kepada potensi fitri. Arti kebebasan (*liberation*) adalah pembebasan manusia dari belenggu penindasan yang menghambat kehidupannya secara lazim, proses pembebasan memiliki indikasi seperti optimisme, *resistensi*, dan kritis. Sikap optimis yang akan membangun manusia sebagai sosok yang penuh harapan, *resistensi* adalah karakter manusia yang paling dasar ketika mendapatkan tekanan, baik secara fisik maupun secara psikis.²⁹ Sedangkan sikap kritis merupakan manifestasi dari sikap seseorang yang mampu memahami kondisi sosial serta dirinya dalam pergumulan secara langsung dengan manusia lain.

Pemberian hukuman yang tidak sesuai dengan kaidah dapat berdampak psikologis terhadap peserta didik, mereka akan menderita trauma terhadap kejadian di sekolah, karena dibentak atau dipermalukan di depan peserta didik yang lain, melakukan kesalahan yang tidak akan berakibat fatal baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain, hanya karena tiba lebih lambat beberapa menit setelah bel tanda masuk dibunyikan.³⁰

²⁷Muctar Buchari, *Spektrum Problematika Pendidikan di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Tiara Wacana Yogya, 1994), h.131.

²⁸M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis* (Cet.VII; Bandung: Remajarosdakarya, 1994), h.53.

²⁹Veithzal Rivai dan Sylviana Murni, *Education Managemen : Analisis Teori dan Praktik*, h.53.

³⁰Munif Chatib, *Sekolahnya Manusia: Sekolah Berbasis Multiple Intelegency di Indunesia* (Cet. I; Bandung: Kaifa, 2009), h. 20.

Kanner yang dikutip oleh Veithzal Rivai dan Sylviana Murni menjelaskan hasil penelitian terhadap sejumlah peserta didik yang mengalami kesulitan dalam bergaul dengan teman-teman sebayanya, perilakunya kurang normal, sering merasa tegang seakan di bawah ancaman, sering menyendiri. Hal ini disebabkan karena anak tersebut sering melihat dan mengalami perlakuan kasar. Kasus lain ditemukan Kanner, ada sejumlah peserta didik yang sulit diatur, suka mengganggu teman, sering merebut barang-barang yang dimiliki temannya, memperlakukan teman sebagai pesuruh yang kadang-kadang berakhir dengan perkelahian. Setelah diteliti ternyata dalam keseharian anak tersebut diperlakukan dengan sikap manja yang berlebihan dan memenuhi semua keinginannya tanpa memikirkan dampak dari keinginan anak tersebut.³¹

Polemik yang terjadi antara orang tua dan aktivis perlindungan anak, juga pendidik terhadap pola penerapan pengendalian perilaku peserta didik di sekolah tidak mesti memvonis bahwa penerapan hukuman di lingkungan pendidikan tidak layak dilakukan. Namun perlu diketahui bagaimana pendidik di lingkungan sekolah menerapkan hukuman di sekolah, bagaimana persepsi guru tentang penerapan hukuman di sekolah. Penulis meyakini bahwa apabila penerapan hukuman diterapkan dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang telah ditentukan, dan persepsi guru tentang penerapan hukuman di sekolah mengarah kepada hal yang positif maka peng gugatan terhadap penerapan hukuman di lingkungan pendidik tidak terjadi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah pokok dalam tesis ini adalah bagaimana persepsi guru tentang penerapan hukuman di lingkungan sekolah

³¹Veithzal Rivai dan Sylviana Murni, *Education Managemen : Teori dan Praktik*, h. 54.

(Studi Kasus di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang). Adapun submasalah terbagi 3 yaitu:

1. Bagaimana proses pemberian hukuman di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana persepsi guru tentang kesesuaian kategori pelanggaran dengan jenis hukuman yang diberikan kepada peserta didik di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat pemberian hukuman di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang dan bagaimana solusinya?

C. Fokus Penelitian

Untuk menghindari interpretasi yang berbeda dan mempermudah dalam memahami, serta menentukan sasaran penelitian ini maka penulis perlu mengemukakan pengertian dalam hal ini definisi operasional terhadap beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian.

a. Persepsi Guru

Adapun yang penulis maksudkan dengan persepsi guru adalah berdasarkan pada pengertian yang penulis kemukakan sebagai berikut:

Persepsi secara bahasa berarti tanggapan (penerimaan) langsung dari suatu serapan, dapat juga diartikan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.³² Secara istilah ada beberapa pengertian tentang persepsi. Jika ditinjau dari istilah psikologi, antara lain Jalaluddin Rahmat mengemukakan bahwa persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan yang diper-

³²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. 3; Balai Pustaka, 1990), h. 675.

oleh dengan menyimpulkan informasi dan kemudian menafsirkan.³³ Sedangkan Siti Pratini Suardiman memberikan pengertian persepsi sebagai proses yang sifatnya kompleks dalam menerima dan menginterpretasikan informasi yang sumbernya dari berbagai indera.³⁴ Persepsi yang dimaksudkan dalam tesis ini adalah pandangan atau tanggapan guru tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi dalam proses pendidikan anak di sekolah yaitu tentang penerapan hukuman di lingkungan pendidikan.

b. Pemberian Hukuman

Pemberian hukuman adalah tindakan yang diberikan kepada peserta didik berupa pemberian sanksi terhadap perbuatan yang melanggar tata tertib yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, sanksi yang diberikan akibat tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan di lingkungan sekolah.

Fokus pembahasan pada penelitian tentang persepsi guru tentang proses pemberian hukuman di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang adalah menitikberatkan pada gambaran proses pemberian hukuman terhadap peserta didik di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang, persepsi guru tentang kesesuaian kategori pelanggaran dengan jenis hukuman serta faktor pendukung, penghambat dan solusi pemberian hukuman di sekolah khususnya di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang.

Agar lebih jelas fokus penelitian ini, penulis menguraikannya dalam bentuk tabel berikut ini:

³³Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi* (Cet. XXII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 51.

³⁴Siti Pratini Suardiman, *Psikologi Perkembangan* (Cet. I; Yogyakarta: t.p. 1990), h. 59.

Tabel 1.1
Fokus Penelitian

No	Masalah	Indikator
1.	Bagaimana proses pemberian hukuman terhadap peserta didik di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang?	1. Bentuk pelanggaran 2. Bentuk hukuman
2.	Bagaimana persepsi guru tentang kesesuaian kategori pelanggaran dengan jenis hukuman yang diberikan kepada peserta didik di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang?	Kesesuaian bentuk hukuman dengan kategori pelanggaran menurut persepsi guru terbagi 3 yaitu Sesuai, tidak sesuai, dan ada yang tidak memberikan tanggapan
3.	Faktor pendukung, faktor penghambat	1. Faktor pendukung : a. Dukungan dari kepala sekolah, para guru dan seluruh civitas sekolah dalam memberikan hukuman kepada peserta didik yang melanggar peraturan sekolah. b. Dengan adanya pemberian hukuman di sekolah tingkat kedisiplinan peserta didik meningkat. c. Sebagian besar peserta didik taat dan patuh terhadap peraturan-peraturan yang dibuat sekolah, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada beberapa peserta didik yang melanggar peraturan. d. Banyak peserta didik yang termotivasi dan sadar akan tanggungjawabnya sebagai peserta

		<p>didik untuk menaati peraturan sekolah.</p> <p>2. Faktor penghambat :</p> <p>a. Faktor internal yaitu peserta didik dan guru.</p> <p>b. Faktor eksternal yaitu orang tua dan masyarakat.</p> <p>3. Solusi :</p> <p>a. Melakukan <i>home visit</i>.</p> <p>b. Mengundang orang tua peserta didik yang bermasalah untuk konsultasi dan diskusi untuk mencari jalan keluar terbaik.</p> <p>c. Pihak sekolah terutama guru menjalin hubungan yang baik kepada semua peserta didik.</p> <p>d. Pihak sekolah menjaga dan menjalin silaturahmi kepada semua orang tua peserta didik.</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan objek kajian dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa karya ilmiah mahasiswa maupun buku yang memiliki relevansi, baik dari segi jenis maupun fokus penelitian penulis lakukan.

1. Literatur yang relevan

Dalam penulisan karya ilmiah, dibutuhkan dukungan teori dari berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana sebuah penelitian. Sebelum melakukan penelitian, penulis telah melakukan kajian terhadap karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini.

Karena penelitian ini merupakan kajian tentang pelaksanaan proses pendidikan dan pemanfaatan alat-alat pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan maka literatur yang penulis gunakan sebagai rujukan didominasi oleh buku-buku menyangkut psikologi pendidikan, psikologi belajar, dan psikologi perkembangan serta teori-teori yang berkaitan dengan pelaksanaan proses pendidikan.

Adapun buku yang penulis gunakan antara lain adalah buku yang ditulis oleh Sukardi berjudul: *Guru Powerful Guru Masa Depan*. Tulisan ini berisi pemaparan tentang keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru antara lain keterampilan menerapkan hukuman, termasuk prinsip-prinsip menjatuhkan hukuman, pedoman dalam menjatuhkan hukuman secara mendetail dengan mengutip beberapa pendapat para pakar pendidikan.

Selanjutnya buku yang ditulis oleh Abd. Rahman Assegaf berjudul *Pendidikan Tanpa Kekerasan; Tipologi, Kasus, dan Kondisinya*, diterbitkan oleh Tiara Wacana Yogyakarta tahun 2004. Dalam buku ini dibahas kondisi internal dan eksternal pendidikan, pemicu dan solusi, serta tipologi kekerasan dalam pendidikan. Dibahas juga konsep pendidikan tanpa kekerasan atau pendidikan damai (*peace education*). Sedangkan dalam Bab IV diuraikan makna dan prinsip damai dalam Islam serta Humanisme dalam pendidikan Islam.

Ada pula buku yang ditulis oleh Muhammad Nabil Kazhim berjudul *Mendidik Anak tanpa Kekerasan*. Pada Bab I dalam buku ini dibahas cara mendidik anak dengan kelembutan dan kasih sayang. Sedangkan pada bagian terakhir buku ini disimpulkan bahwa mendidik anak dengan kekerasan akan menyebabkan anak tumbuh menjadi anak nakal, pemberontak, dan pembohong.

Selanjutnya M. Noor Rochman Hadjam dan Wahyu Widhiarso dengan buku yang berjudul *Budaya damai anti kekerasan*. Pada Bab I dalam buku ini dibahas metode pendidikan damai, sedangkan pada bab berikutnya dijelaskan aspek kedamaian di sekolah, perilaku yang mencerminkan kedamaian di sekolah dan program-program yang direkomendasikan untuk mewujudkan pendidikan damai di sekolah.

Selanjutnya tulisan Sujarwo yang berjudul *Mempertanyakan Kembali Hukuman dalam Pendidikan*. Dalam Republika (Surabaya, 13 Oktober 2005) yang memaparkan data dan fakta penerapan hukuman yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik yang tidak memenuhi kaedah-kaedah yang tepat.

Prayitno, *Dasar Teori dan Praktis Pendidikan*, pada Bab I dalam buku ini membahas tentang sasaran pendidikan adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, pada bagian selanjutnya dibahas tentang manusia, kemanusiaan dan pendidikan. Bab V dalam buku ini membahas terselenggaranya hubungan pendidikan antara peserta didik dan pendidik memerlukan dua pilar proses pembelajaran yaitu kewibawaan dan kewiyataan. Bab VI dalam buku ini menguraikan tentang bagaimana situasi pendidikan yang terjadi dengan berbagai komponen yang ada di dalamnya. Bab VII dalam buku ini menguraikan tentang tindakan tegas dalam pendidikan berbeda dengan hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran pidana dan perdata, serta delik aduan dalam bidang hukum.

Abd Rahman al-Nahlawi telah menulis buku dengan judul *Usul al-Tarbiyyah al-Islamiyyah wa Asalibuha fil al-Bait wa al-Madrasah wa al-Mujtamaah*. Di dalam buku ini dijelaskan secara lengkap metode hukuman yang sebaiknya dilakukan di lingkungan pendidikan informal, formal dan nonformal.

2. Hasil Penelitian yang Relevan

- a. Tesis Abbas Thalib alumni PPs UIN Alauddin tahun 2004 yang berjudul: “Hubungan Penerapan Pendidikan Agama Islam dengan Perilaku Beragama Siswa SMA Negeri 2 Gorontalo”. Tesis ini membahas bahwa perilaku beragama siswa SMA Negeri 2 Gorontalo sangat ditentukan oleh penerapan pendidikan Agama Islam, faktor pendidikan, pergaulan, dan lingkungan, sehingga perlu adanya pemantapan penerapan Pendidikan Agama Islam di sekolah untuk mewujudkan perilaku peserta didik.
- b. Tesis Abd. Hafid alumni PPs UNM tahun 2011 yang berjudul: “Pengaruh Disiplin dan Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa SMP Negeri di Kab. Mamasa”. Dalam tesis tersebut dikatakan bahwa disiplin di sekolah adalah suatu cara guru mengajar anak berperilaku moral yang disetujui kelompok. Indikator disiplin di sekolah terdiri dari patuh atau taat terhadap tata tertib di sekolah, persiapan belajar siswa, perhatian terhadap kegiatan pembelajaran, dan menyelesaikan tugas pada waktunya.
- c. Tesis saudari Patma Pasolorang berjudul: “Pengaruh Persepsi siswa tentang Iklim dan Budaya Sekolah terhadap Motivasi Belajar pada Siswa SMP Negeri 2 Rante Pao”. Tesis ini mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan persepsi siswa tentang iklim sekolah dan budaya sekolah terhadap motivasi belajar siswa.
- d. Tesis saudara Misdar Junaid yang berjudul: “Persepsi Keluarga Bugis tentang Pendidikan Islam Bagi Anak (Studi kasus di pulau Gorom Kabupaten Bula Seram Bagian Timur Maluku). Tesis ini mengatakan bahwa persepsi masyarakat Bugis tentang pendidikan Islam bagi anak cukup positif, dengan metode pendidikan yang variatif.

Setelah mencermati beberapa hasil penelitian yang dipaparkan sebelumnya, penulis belum menemukan tulisan yang berkaitan dengan persepsi guru tentang proses pemberian hukuman di lingkungan sekolah. Penulis berpikir bahwa persepsi guru tentang proses pemberian hukuman di lingkungan sekolah penting untuk dikaji karena guru yang memiliki tanggung jawab dalam mendidik peserta didik untuk membentuk karakter peserta didik, salah satunya ditempuh dengan cara memberikan hukuman. Selain itu persepsi tentang sesuatu berpengaruh terhadap tanggapan dan reaksi begitu juga dengan persepsi guru sangat berpengaruh terhadap proses pemberian hukuman. Hal inilah yang memotivasi penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang persepsi guru dalam proses pemberian hukuman di lingkungan sekolah khususnya di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui proses pemberian hukuman di SMA Negeri I Lembang Kabupaten Pinrang.
- b. Untuk mengetahui persepsi guru tentang kesesuaian kategori pelanggaran dengan jenis hukuman yang diberikan kepada peserta didik di SMA Negeri I Lembang Kabupaten Pinrang.
- c. Untuk mengungkapkan faktor yang mendukung dan menghambat proses pemberian hukuman di SMA Negeri I Lembang Kabupaten Pinrang serta solusinya.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat:

- 1) Memberi kontribusi akademis bagi praktisi pendidikan, terutama guru dalam memberikan hukuman terhadap peserta didik
- 2) Dapat menjadi bahan acuan bagi para peneliti selanjutnya yang hendak mendalami kajian tentang proses pemberian hukuman kepada peserta didik.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi para pendidik khususnya guru dalam memberikan hukuman kepada peserta didik sehingga tujuan pemberian hukuman dapat tercapai yang pada gilirannya pemberian hukuman dapat memberikan konstribusi positif terhadap perilaku peserta didik.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang edukatif kontsruktif untuk menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pihak SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang, masyarakat, pemerintah, dan orang tua peserta didik.

- 1) Kepala sekolah selaku pihak penentu kebijakan terhadap proses pemberian hukuman di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang.
- 2) Orang tua peserta didik sebagai pihak yang memberikan kepercayaan kepada pihak sekolah memperoleh informasi yang riil tentang pemberian salah satu alat pendidikan dalam upaya membentuk perilaku peserta didik sehingga polemik yang terjadi antara pihak sekolah dan orang tua tentang proses pemberian hukuman dapat diminimalisir.
- 3) Guru sebagai pihak yang terlibat langsung dalam proses pemberian hukuman memperoleh tambahan pengetahuan tentang pengalaman dalam penerapan

hukuman sehingga dapat menjadi bahan rujukan dalam menentukan jenis hukuman yang tepat.

- 4) Masyarakat secara umum lebih bijak dalam menanggapi polemik yang terjadi terkait tentang proses pemberian hukuman di sekolah.
- 5) Pemerintah sebagai pihak yang berkompeten untuk membuat aturan yang baku tentang proses pemberian hukuman di lingkungan sekolah sebagai acuan sekaligus payung hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pemberian hukuman.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Persepsi*

1. Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu suatu stimulus yang diterima oleh individu melalui alat reseptor yaitu indera. Hal senada disampaikan oleh Stephen P. Robbins bahwa persepsi adalah sebuah proses saat individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka.¹ Pengertian lain dikemukakan oleh Jalaluddin Rahmat bahwa persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan kemudian menafsirkan.² Dapat dipahami bahwa kesan-kesan yang diterima oleh alat indera akan melahirkan makna. Jadi alat indera menjadi penghubung antara individu dengan dunia luarnya. Dengan demikian persepsi ada karena stimulus yang diindera oleh individu, diorganisasikan kemudian diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan mengerti tentang apa yang diindera.

Dengan kata lain persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Persepsi merupakan keadaan *integrated* dari individu terhadap stimulus yang diterimanya. Apa yang ada dalam diri individu, pikiran, perasaan, pengalaman-pengalaman individu akan ikut aktif berpengaruh dalam proses persepsi.

¹Stephen P. Robbins, *Perilaku Organisasi Buku 1*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), h. 174-184.

²Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi* (Cet. XXII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 51.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian persepsi merupakan suatu proses penginderaan, stimulus yang diterima oleh individu melalui alat indera yang kemudian diinterpretasikan sehingga individu dapat memahami dan mengerti tentang stimulus yang diterimanya tersebut. Proses menginterpretasikan stimulus ini biasanya dipengaruhi pula oleh pengalaman dan proses belajar individu. Alat indera yang dimaksud mencakup semua panca indera.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam penelitian ini yang membahas tentang persepsi guru terhadap penerapan hukuman di lingkungan sekolah adalah adanya persepsi guru melalui stimulus yang diterima melalui alat indera baik melihat, mendengar, maupun merasakan stimulus tersebut. Stimulus yang dimaksud adalah penerapan hukuman terhadap peserta didik yang dirasakan oleh indera, baik dengan melihat, mendengar maupun merasakan akan melahirkan arti atau persepsi yang berbeda pada setiap guru.

2. Faktor-faktor yang Memengaruhi Persepsi

Kunci utama dari persepsi adalah stimulus yang diterima di sistem reseptor. Informasi yang diterima individu melalui alat indera dipersepsikan di otak dengan mengorganisasikan dan menginterpretasikan stimulus yang diterimanya, sehingga stimulus tersebut mempunyai arti bagi individu yang bersangkutan. Terbentuknya sebuah persepsi dapat dipengaruhi beberapa hal. Pada dasarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya persepsi pada seseorang, yaitu sebagai berikut³:

a. Faktor internal. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya persepsi dalam diri individu antara lain:

³Lihat www.dunia-psikologi.com/persepsi-pengertian-defenisi-dan-faktor-yang-mempengaruhi/ Makassar Tanggal 20 Juli 2003.

1) Fisiologis. Informasi yang masuk atau diperoleh melalui alat indera, akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk memberikan arti terhadap lingkungan sekitarnya. Kapasitas indera untuk mempersepsi pada tiap orang berbeda-beda sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga dapat berbeda.

2) Perhatian. Individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu obyek. Energi tiap orang berbeda-beda sehingga perhatian seseorang terhadap obyek juga berbeda dan hal ini akan mempengaruhi persepsi terhadap suatu obyek.

3) Minat. Persepsi terhadap suatu obyek bervariasi tergantung pada seberapa banyak energi atau *perceptual vigilance* yang digerakkan untuk mempersepsi. *Perceptual vigilance* merupakan kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari stimulus atau dapat dikatakan sebagai minat.

4) Kebutuhan yang searah. Faktor ini dapat dilihat dari bagaimana kuatnya seorang individu mencari obyek-obyek atau pesan yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan dirinya.

5) Pengalaman dan ingatan. Pengalaman dapat dikatakan tergantung pada ingatan dalam arti sejauhmana seseorang dapat mengingat kejadian-kejadian lampau untuk mengetahui suatu rangsang dalam pengertian luas.

6) Suasana hati. Keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang, *mood* ini menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktu yang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang dalam menerima, bereaksi dan mengingat.

b. Faktor Eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi, merupakan karakteristik dari lingkungan dan obyek-obyek yang terlibat didalamnya. Elemen-

elemen tersebut dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap dunia sekitarnya dan mempengaruhi bagaimana seseorang merasakannya atau menerimanya. Sementara itu faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi adalah :

1) Ukuran dan penempatan dari obyek atau stimulus. Faktor ini menyatakan bahwa semakin besarnya hubungan suatu obyek, maka semakin mudah untuk dipahami. Bentuk ini akan mempengaruhi persepsi individu dan dengan melihat bentuk ukuran suatu obyek individu akan mudah untuk perhatian pada gilirannya membentuk persepsi.

2) Warna dari obyek-obyek. Obyek-obyek yang mempunyai cahaya lebih banyak, akan lebih mudah dipahami (*to be perceived*) dibandingkan dengan yang sedikit.

3) Keunikan dan kontrasan stimulus. Stimulus luar yang penampilannya dengan latar belakang dan sekelilingnya yang sama sekali di luar sangkaan individu yang lain akan banyak menarik perhatian.

4) Intensitas dan kekuatan dari stimulus. Stimulus dari luar akan memberi makna lebih bila lebih sering diperhatikan dibandingkan dengan yang hanya sekali dilihat. Kekuatan dari stimulus merupakan daya dari suatu obyek yang dapat mempengaruhi persepsi.

5) *Motion* atau gerakan. Individu akan banyak memberikan perhatian terhadap obyek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan dibandingkan obyek yang diam.

Persepsi guru terhadap penerapan hukuman di sekolah dipengaruhi beberapa faktor baik faktor internal maupun faktor eksternal. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan jika terdapat persepsi yang berbeda dari setiap guru tentang penerapan hukuman di sekolah. Ada yang menganggap penerapan hukuman penting dilakukan

dengan pertimbangan bahwa hukuman itu dapat menimbulkan efek jera serta bersifat preventif bagi peserta didik lain. Ada pula yang menganggap penerapan hukuman tidak perlu dilakukan dengan pertimbangan bahwa peserta didik tidak membutuhkan hukuman untuk dapat mencegah mereka melakukan pelanggaran terhadap peraturan sekolah.

B. Hukuman dalam Dunia Pendidikan

1. Pengertian Hukuman

Hukuman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki beberapa arti yaitu: 1. Siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang-orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya; 2. Keputusan yang dijatuhkan oleh hakim; 3. Hasil atau akibat menghukum.⁴ Sedangkan dalam Bahasa Arab hukuman diistilahkan dengan “*iqab, jaza*”, dan “*uqubah*”. Kata *iqab* juga berarti balasan. Pengertian *iqab* sebagai hukuman dijelaskan Allah dalam firman-Nya Q.S. al-Baqarah/2: 211

سَلَّ بَنِي إِسْرَءِيلَ كَمَا ءَاتَيْنَهُمْ مِّنْ ءَايَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١١﴾

Terjemahnya:

Tanyakanlah kepada Bani Israil: “Berapa banyak bukti nyata yang telah Kami berikan kepada mereka: Barangsiapa menukar nikmat Allah setelah (nikmat itu) datang kepadanya, maka sungguh Allah sangat keras hukuman-Nya.”⁵

Kata *iqab* pada ayat sebelumnya menunjukkan arti keburukan dan azab yang menyedihkan karena didahului kata *syadid* yang berarti yang paling, amat dan sangat.⁶

⁴Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. I, Edisi III; Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 247.

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. IX; Bandung: Diponegoro, 2007), h. 35.

Secara terminologi, hukuman memiliki beberapa arti sebagai berikut:

Hukuman adalah menghadirkan atau memberikan sebuah situasi yang tidak menyenangkan atau situasi yang ingin dihindari untuk menurunkan tingkah laku.⁷

Pengertian lain dikemukakan oleh Anita E. Wool Folk dkk mengatakan bahwa:

Hukuman memberikan efek terhadap perilaku. Hukuman diartikan sebagai penguatan negatif akan berdampak terhadap peningkatan perilaku, tetapi pada sisi yang lain penerapan hukuman memiliki satu penurunan atau tekanan atas perilaku.⁸

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa secara umum hukuman berarti penyajian stimulus yang tidak menyenangkan untuk menghilangkan dengan segera perilaku yang tidak diharapkan, sehingga hukuman dapat pula diartikan suatu bentuk sanksi yang diberikan baik sanksi fisik maupun psikis apabila melanggar peraturan atau melakukan kesalahan.

Sedangkan dalam dunia pendidikan, hukuman memiliki beberapa pengertian, sebagai berikut:

Menurut Syaiful Bahri Djamarah, hukuman merupakan salah satu alat pendidikan yang diperlukan dalam pendidikan.⁹ Sebagai alat pendidikan, hukuman diberikan jika tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan oleh orang yang bersangkutan atau orang yang bersangkutan tidak memberikan respon atau tidak menampilkan sebuah tingkah laku yang diharapkan.

⁶Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 129.

⁷Baharuddin, *Teori Belajar dan Pembelajaran* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), 74.

⁸Anita E. Woolfolk dan Lorraine McCune-Nicolich, *Mengembangkan Kepribadian & Kecerdasan Anak-Anak* (Cet. I; Jakarta: Inisiasi Pres, 2004), h. 226.

⁹Lihat Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 196.

Pendapat lain dikemukakan oleh M. Ngalim Purwanto, menurutnya hukuman adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang (orang tua, guru dan sebagainya) sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan atau kesalahan.¹⁰

Berdasarkan pengertian tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwa hukuman merupakan tindakan apapun yang tidak disenangi oleh peserta didik yang diterapkan secara sadar oleh guru kepada peserta didik jika melakukan pelanggaran atau melakukan tindakan yang tidak diinginkan yang bertujuan ke arah perbaikan dan menyadari kesalahannya.

2. Dasar Pemberian Hukuman dalam Pendidikan

Al-Qur'an dan Sunnah merupakan panduan setiap muslim dalam menjalankan kehidupannya termasuk melaksanakan profesi seperti guru. Setiap pendidik muslim harus mendasarkan segala kegiatan yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran kepada ajaran Islam, termasuk pelaksanaan hukuman. Ayat Allah yang menunjukkan tentang hukuman terdapat pada QS An-Nisa'/4: 34

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Terjemahnya:

...Wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu¹¹ maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka.¹¹

¹⁰Lihat M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 186.

¹¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002), h. 109.

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang suami diperkenankan memperbaiki pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan istrinya yang selingkuh dengan laki-laki lain (*nusyuz*). Tahapan paling awal adalah memberikan nasehat dengan cara dan pada waktu yang tepat. Jika cara nasehat tidak berhasil maka diberikan alternatif hukuman berikutnya, yaitu dengan bentuk ‘pengabaian’. Maksud dari pengabaian adalah suami memisahkan diri dari isterinya, menghindarinya secara fisik dan membelakanginya ketika tidur di pembaringan. Setelah tindakan pengabaian tak juga membawa hasil, barulah tahapan terakhir yaitu tahapan fisik. Hukuman fisik diperbolehkan sebagai tahapan akhir. Pukulan yang diperbolehkan dalam ayat tersebut adalah pukulan yang sifatnya mendidik, tidak keras, tidak menyebabkan luka dan tidak meretakkan tulang.¹² Dengan catatan bahwa pukulan yang diberikan tidaklah sampai membekas, yang berarti pukulan itu tidaklah terlalu keras dan tidak terlalu menyakitkan.

Demikian pula terhadap mendidik anak apabila melakukan pelanggaran baik menyangkut norma agama maupun masyarakat. Usaha pertama yang dilakukan adalah dengan lemah lembut dan menyentuh perasaan peserta didik. Jika dengan usaha itu belum berhasil maka pendidik boleh menggunakan hukuman pengabaian dengan mengabaikan atau mengacuhkan peserta didik. Jika hukuman psikologis itu belum juga berhasil maka pendidik boleh menggunakan pukulan, tentunya pukulan yang tidak menyiksa atau bahkan merusak fisik peserta didik.

Adapun perintah mendidik anak, telah ditegaskan oleh Nabi Muhammad saw. yang berbunyi:

¹²Muhammad Ustman al-Khusyt, *Membangun Harmonisme Keluarga* (Cet. I; Jakarta: Qisthi Press, 2007), h. 91.

حدثنا محمد بن عيسى يعني ابن الطباع ثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم " مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها"¹³

Artinya:

Muḥammad bin Isā, yaitu ibn al-Ṭabā'i menceritakan kepada kami, Ibrāhīm bin Sa'ad kepada kami dari Abdul Mālik bin al-Rabī' bin Sabrah dari bapaknya, dari kakeknya berkata: "Rasulullah bersabda, "perintah-kanlah anak kalian untuk mengerjakan shalat apabila telah berusia tujuh tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya bila telah berusia sepuluh tahun".

3. Kedudukan Hukuman dalam Dunia Pendidikan

Hukum merupakan masalah etis, menyangkut dua perkara yaitu baik dan buruk. Dalam dunia pendidikan, pemberian hukuman bukan lagi menjadi hal yang tabuh, sebab dari dahulu sampai sekarang, masih digunakan. Hukuman dalam pembelajaran terkadang perlu dilakukan untuk menjaga kondisi pembelajaran agar berjalan dengan baik, atau dengan tujuan-tujuan lain yang membantu pendidik. Namun perlu diingat bahwa hukuman dilakukan dalam proses yang sadar. Dalam memberikan hukuman, seorang guru tentu perlu memperhatikan berbagai aspek yang akan ditimbulkan, baik negatif maupun positifnya, dan lain-lain.

Menurut Zuhairimi, hukuman merupakan alat pendidikan.¹⁴ Sebagai alat pendidikan, hukuman merupakan alat pendidikan represif dan korektif. Sebagai alat pendidikan represif, hukuman dilakukan bila terjadi suatu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan peraturan. Sedangkan sebagai alat pendidikan korektif, hukuman bertujuan untuk menyadarkan anak kembali kepada hal-hal yang benar atau yang sesuai dengan peraturan.

¹³Abū Dāwud Sulaymān bin al-‘Asy’as bin Ishāk al-Azdiy al-Sijastāni, *Sunan Abū Dāwud*, juz 1 (Cet; II, Mesir: Muṣṭāfa al-Bāby al-Ḥalaby, 1403 H/ 1983 M), h. 130.

¹⁴Zuhairimi, dkk, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 181.

Menurut M. Ngalim Purwanto, pemilihan alat-alat pendidikan yang baik dan sesuai harus memperhatikan empat syarat, yaitu:

- a. Tujuan apakah yang hendak dicapai dengan alat itu?
- b. Siapa (pendidik) yang menggunakan alat itu?
- c. Anak (peserta didik) yang mana yang dikenai alat itu?
- d. Bagaimana menggunakan alat itu?¹⁵

Pendapat M. Ngalim Purwanto di atas mengisyaratkan bahwa hukuman sebagai alat pendidikan dilakukan dengan tujuan yang jelas, menimbulkan sikap jera dan tidak mengulangi kesalahannya. Dalam menggunakan hukuman sebagai alat pendidikan, pribadi orang yang menggunakannya sangat penting, sehingga penggunaan alat pendidikan itu bukan sekedar persoalan teknis belaka, akan tetapi menyangkut persoalan batin atau pribadi anak.

Pendapat lain dikemukakan oleh M. Arifin, bahwasanya hukuman merupakan metode pendidikan.¹⁶ Sebagai metode, hukuman dilakukan untuk mencapai tujuan serta bermakna transformasi dan internalisasi nilai. Untuk itu, hukuman dilakukan bukan bersifat intimidasi melainkan secara intensional yang mencerminkan nilai pendidikan.

Berdasarkan pendapat tersebut, pemberian hukuman bukanlah sesuatu yang mutlak diperlukan dalam mendidik. Hanya saja, jika nasehat dan teguran belum mampu memperbaiki akhlak seseorang, maka hukuman adalah alternatif terakhir untuk dilakukan. Hal ini bisa saja terjadi, disebabkan tidak semua peserta didik memiliki karakter dan kepatuhan yang sama dalam menerima sesuatu pesan dari guru. Ada yang hanya dengan nasehat dan teguran saja, tetapi ada juga peserta didik

¹⁵M. Ngalim Purwanto, *op. cit.*, h. 177.

¹⁶H.M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam; *Tinjauan Teoretis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisilner* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 217.

yang perlu untuk diberi sanksi atau hukuman, karena dengan sanksi atau hukuman, peserta didik dapat mengalami perubahan.

Dalam dunia pedagogis, hukuman itu merupakan hal yang wajar jika hukuman mampu memberikan sumbangan bagi perkembangan moral peserta didik. Perkembangan moral yang dimaksud adalah keinsyafan terhadap moralitas dan kerelaan untuk berbuat sesuatu sesuai dengan moralitas atau peraturan yang berlaku.

Hukuman sebagai salah satu teknik pengelolaan kelas sebenarnya masih terus menjadi bahan perdebatan. Namun, menurut penulis, hukuman sebenarnya diperlukan dalam keadaan sangat terpaksa, katakanlah semacam pintu darurat yang suatu saat mungkin diperlukan. Dalam konteks pemberian hukuman, pemberiannya harus didasari oleh kesadaran dari pemberi hukuman dan juga harus bertujuan menginsafkan peserta didik. Oleh karena itu, jika akibat dari perbuatan buruk yang dilakukan oleh peserta didik terjadi karena faktor alam atau tidak sengaja ditimpakan, maka hukuman tidak perlu dilakukan. Demikian juga tidak dapat dikatakan hukuman (pedagogik), jika hukuman yang ditimpakan karena faktor kebencian dan balas dendam.

Pada dasarnya terdapat dua pandangan tentang perlu tidaknya hukuman digunakan, yaitu pendidik tradisional dan pendidik modernis. Pendidik tradisional meyakini bahwa hukuman berkontribusi penting dalam pendidikan. Sedangkan pendidik modernis menganggap hukuman itu tidak memiliki arti dalam proses pendidikan.

Terkait dengan golongan pendidik tradisional dan modernis, Dewa Ketut Sukardi berpendapat:

- (1) Peserta didik tidak akan dapat menyesuaikan dirinya dan meningkatkan kegiatannya jika tidak disertai hukuman atau ancaman,
- (2) Disiplin hanya

dapat diterapkan dengan menggunakan pemukul. Sedangkan golongan pendidik modernis berpendapat: (1) hukuman tidak lebih dari suatu alat yang digunakan untuk menakut-nakuti anak dalam waktu yang singkat, (2) hukuman tidak dapat digunakan sebagai alat yang bermanfaat dalam mendidik anak.¹⁷

Menurut penulis, pendapat di atas terkesan menganggap hukuman sebagai cara kuno yang tidak layak digunakan dalam proses pendidikan dan pembelajaran modern. Sedangkan kenyataan yang terjadi, jika dalam proses pendidikan dan pembelajaran tidak diterapkan sistem hukuman maka akan menimbulkan kebebasan mutlak yang tak terkendali. Apabila hukuman ditiadakan niscaya perilaku peserta didik akan lebih tak terarah. Dapat dibayangkan, ada penerapan hukuman saja masih ada yang melanggar, apalagi jika hukuman ditiadakan.

Pendidikan yang berlangsung dengan banyak atau justru tanpa hukuman, pada akhirnya akan berpengaruh terhadap masalah pedagogis dan sosial. Terlalu banyak menghukum sehingga tindakan pendidik menjadi kebiasaan, sewenang-wenang, kejam dan sadis akan menginjak-injak martabat kemanusiaan peserta didik. Cara menghukum seperti ini jelas tidak dibenarkan dalam pendidikan karena hukuman harus mengandung nilai pedagogis atau mendidik (edukatif).

Pendidikan yang berlangsung tanpa hukuman akan melahirkan generasi yang tidak mampu memilah hal yang tepat untuk dilakukan, peserta didik yang memiliki perilaku yang tidak terkontrol, dan nurani yang tidak peka.

4. Tujuan Hukuman dalam Pendidikan

Setiap aktivitas yang dilakukan tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tanpa tujuan, maka aktivitas tersebut tidak mempunyai arti apa-apa dan akan

¹⁷Dewa Ketut Sukardi, *Proses Bimbingan dan Konseling di Sekolah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 70.

menimbulkan kerugian serta kesia-siaan. Seperti halnya dengan hukuman, merupakan sebuah proses dan aktivitas yang bersifat intensional, sadar dan bertujuan.

Sehubungan dengan tujuan pendidikan, yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 tahun 2003 yakni untuk mengembangkan potensi kognitif, sikap dan keterampilan peserta didik maka pendidik/tenaga kependidikan memikul tanggung jawab untuk membimbing, mengajar dan melatih peserta didik atas dasar norma-norma yang berlaku baik norma agama, adat, hukum, ilmu, dan kebiasaan-kebiasaan yang baik.

Untuk mewujudkan tujuan itu perlu ditanamkan sikap disiplin, tanggung jawab, berani, mawas diri, beriman dan lain-lain. Hukuman pun kadang diterima peserta didik manakala mereka melanggar tata tertib yang telah disepakati. Hukuman itu dimaksudkan sebagai upaya mendisiplinkan peserta didik terhadap peraturan yang berlaku.

Pada dasarnya tujuan utama dari hukuman sama sekali bukanlah untuk menyakiti atau untuk menjaga kehormatan guru atau sebaliknya agar guru itu ditaati oleh peserta didik, akan tetapi tujuan hukuman sebenarnya adalah agar peserta didik yang melanggar peraturan merasa jera dan tidak akan mengulangnya lagi.

Hal yang sama dikatakan oleh Syaiful Bahri Djamarah bahwa diterapkannya hukuman dalam proses pendidikan pada dua hal, yaitu:

- a. Hukuman diadakan dengan maksud agar tidak atau jangan terjadi pelanggaran. Sifatnya untuk mencegah jangan sampai terjadi pelanggaran.
- b. Hukuman dilakukan karena adanya pelanggaran yang telah diperbuat.¹⁸

Berdasarkan pendapat tersebut, penulis beranggapan bahwa pelaksanaan hukuman dalam proses pendidikan menyangkut dua aspek yaitu, hukuman dilakukan

¹⁸Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, h. 203.

dengan maksud agar tidak terjadi atau mencegah pelanggaran. Hal ini berarti hukuman berorientasi pada masa yang akan datang atau dikenal dengan istilah preventif. Sedangkan aspek yang kedua adalah hukuman dilakukan sebagai konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan. Hal ini berarti hukuman berorientasi pada masa lampau atau dikenal dengan istilah kuratif.

Pendapat lain dikemukakan oleh Irawati Istadi, bahwa tujuan utama dari pemberian hukuman adalah menginginkan adanya penyadaran agar peserta didik tidak lagi melakukan kesalahan.¹⁹ Pendapat berbeda dikatakan oleh M. Arifin bahwa tujuan hukuman lain yang paling pokok dalam pendidikan adalah untuk membangkitkan dan menumbuhkan perasaan tanggung jawab peserta didik.²⁰

Menurut penulis, kedua pendapat di atas menitikberatkan pada aspek kesadaran, perbaikan dan tanggung jawab. Artinya bahwa penerapan hukuman dalam proses pendidikan dilakukan dengan tujuan agar peserta didik mampu menyadari kesalahan yang dilakukan dan bertekad tidak mengulangi kesalahannya, yang lebih penting adalah mau memperbaiki kesalahannya. Selain itu hukuman yang diterima peserta didik bertujuan mampu menghadirkan sikap tanggung jawab sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, hukuman pantas dilakukan jika nestapa/akibat yang ditimbulkan mempunyai nilai positif atau mempunyai nilai pedagogis.

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan sebelumnya, menurut penulis tujuan pokok diterapkannya hukuman dalam proses pendidikan adalah:

¹⁹Irawati Istadi, *Agar Hadiah dan Hukuman Efektif*, (Jakarta, 2005), h. 81.

²⁰H.M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam; Tinjauan Teoretis dan Prkatis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, h. 217.

- a) Mencegah terjadi pelanggaran
- b) Menciptakan kesadaran dan tanggung jawab peserta didik untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat.
- c) Membentuk kepribadian peserta didik.

Dalam memberikan suatu hukuman, para pendidik hendaknya berpedoman kepada prinsip pokok yaitu dihukum karena telah bersalah, dan dihukum agar tidak lagi berbuat kesalahan. Selain itu perlu dipahami oleh setiap pendidik bahwa hukuman merupakan alat pendidikan terakhir digunakan setelah alat-alat pendidikan lain tidak memberikan hasil.

5. Penerapan Hukuman di Sekolah

Hukuman merupakan sesuatu yang tidak asing lagi termasuk di lingkungan sekolah. Dalam lingkungan sekolah, pemberian hukuman biasanya terjadi pada peserta didik yang melakukan pelanggaran seperti tidak mengerjakan PR, mengganggu teman, ribut pada saat proses pembelajaran, berkelahi, pakaian seragam yang tidak sesuai dengan aturan, terlambat tiba di sekolah, dan lain-lain.

Hal yang sangat disayangkan pada pemberian hukuman di sekolah adalah adanya pemberian hukuman yang sering kali disertai dengan tindakan kekerasan dan hal-hal lainnya yang sangat tidak layak dilakukan oleh seorang pendidik. Pemberian hukuman dengan cara yang berlebihan dan diikuti oleh tindakan kekerasan tidak pernah diinginkan oleh siapapun, termasuk di lembaga pendidikan yang sepatutnya menyelesaikan permasalahan secara edukatif.

Tidak dapat diingkari telah banyak kejadian yang membuktikan bahwa terkadang pemberian hukuman kepada peserta didik terdapat unsur kekerasan. Salah satu peristiwa yang terjadi pada tanggal 14 Oktober 2005, di salah satu SMP Johar

Baru Jakarta Pusat seorang pelajar dianiaya 3 gurunya di ruang BP hanya karena pada saat jam pelajaran tidak ada gurunya dan peserta didik tersebut bersorak. Kasus lainnya adalah di SMP 24 Makassar, peserta didik dihajar dengan menggunakan gagang sapu sampai babak belur. Masih banyak peristiwa lainnya yang membuktikan pemberian hukuman di sekolah disertai dengan kekerasan. Pemberian hukuman yang disertai kekerasan di lingkungan sekolah tidak sesuai dengan etika dan bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan.

Memang logis setiap orang yang salah harus mendapat hukuman dan yang berbuat baik harus mendapat ganjaran. Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup manusia memberikan tuntunan kepada pendidik agar berlaku bijaksana saat memilih dan menggunakan metode yang tepat dalam pemberian hukuman, tepatnya pada Q.S. Ali Imran ayat 134 yang artinya

...dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain...

Berdasarkan ayat tersebut dipahami bahwa kesalahan yang dilakukan peserta didik di lingkungan sekolah terkadang memang pantas mendapatkan hukuman, tetapi jenis hukuman itulah yang seharusnya disesuaikan dengan lingkungan sekolah sebagai sarana pendidikan dan pembelajaran, bukan penghakiman. Dikemukakan oleh Prayitno bahwa pakar pendidikan tidak sepakat dengan usaha pengendalian perilaku peserta didik di sekolah dengan memberikan hukuman yang sama porsi dan tekanannya dengan penerapan hukuman yang berlaku di dunia hukum pidana maupun perdata.²¹

²¹Prayitno, *Dasar Teori dan Praktis Pendidikan* (Cet. I; Jakarta: Grasindo. 2009), h. 152-153.

Penanaman disiplin terhadap peserta didik di sekolah dapat diterapkan tanpa memberikan hukuman. Sebagai alternatif bagi pendidik dalam mengendalikan perilaku peserta didik dan menanamkan disiplin di lingkungan sekolah terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menerapkan disiplin yaitu

- a. Berikan contoh perilaku disiplin melalui pola sikap para guru di sekolah. Pembelajaran disiplin melalui contoh langsung dari para guru lebih memotivasi peserta didik untuk meniru perilaku yang sama.
- b. Berikan pemahaman tentang keuntungan dan kerugian dari penerapan disiplin di sekolah dan di luar sekolah. Penjelasan yang diberikan dapat didekati dari berbagai sudut pandang ilmu.
- c. Berikan kesempatan kepada peserta didik dalam mengapresiasi perilaku disiplinnya. Jangan biarkan peserta didik sendirian tanpa diberi wadah untuk mengapresiasi perilaku disiplinnya. Misalnya, guru mengadakan jadwal piket untuk kebersihan sekolah.
- d. Sediakan sarana dan prasarana yang memadai. Adakalanya peserta didik tidak berperilaku disiplin karena pihak sekolah tidak menyediakan fasilitas yang memadai. Misalnya, peserta didik dimotivasi untuk membuang sampah pada tempatnya, tetapi karena tidak tersedia tempat sampah yang memadai, akhirnya peserta didik membuang sampah bukan pada tempatnya.
- e. Berikan penghargaan kepada peserta didik yang mengekkan perilaku disiplin. Penghargaan ini penting diberikan untuk meningkatkan motivasi peserta didik dalam berdisiplin. Selain itu penghargaan ini sebagai bukti perhatian guru dan sekolah kepada peserta didik yang telah berusaha disiplin.²²

²²<http://pbis.org>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2014.

6. Fungsi Hukuman dalam Pendidikan

Hukuman yang diberikan guru kepada peserta didik diharapkan mampu membangkitkan rasa rendah hati, keinginan untuk mengakui kesalahan serta memperbaiki kesalahannya. Dengan demikian hukuman berfungsi untuk memperkenalkan kepada peserta didik perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Dalam dunia pendidikan, hukuman dapat menjadi alat motivasi atau alat pendorong agar peserta didik dapat menampilkan perilaku yang baik. Untuk itu, hukuman yang diberikan harus bersifat dan bernilai pedagogis.

Menurut Henry A. Paul, ada beberapa fungsi hukuman dalam pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi preventif, yaitu memberikan dampak pada peserta didik yang lain, sehingga peserta didik yang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan terhukum.
- b. Fungsi kuratif, yaitu mampu memberikan perbaikan sikap dan perilaku moral peserta didik (terhukum) di kemudian hari.
- c. Fungsi edukatif, yaitu mampu menumbuhkan hasrat peserta didik (terhukum) untuk merubah pola hidupnya sehingga ia akan menjauhi perbuatan buruk atau perbuatan yang melanggar aturan (agama dan sosial) bukan karena takut hukuman melainkan semata-mata kesadarannya dan ketidaksenangannya terhadap perbuatan jahat.
- d. Fungsi represif, yaitu memberikan dampak positif bagi peserta didik (terhukum) sehingga ia tidak lagi melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya terhukum lagi.
- e. Fungsi motivatif, yaitu memberikan dorongan kepada peserta didik untuk belajar tanpa adanya tekanan mental, berkesadaran pribadi dan terlepas dari bentuk pemaksaan.²³

Menurut penulis, kelima bentuk fungsi hukuman di atas mencerminkan bentuk hukuman yang bersifat pedagogis, yaitu hukuman dilakukan bukan karena faktor balas dendam atau apapun melainkan karena ingin mengadakan perbaikan pada diri peserta didik serta mencegah terjadinya pelanggaran. Berdasarkan

²³Henry A. Paul, *Konseling dan Psikoterapi Anak; Panduan Lengkap Memahami Karakter, Perasaan dan Emosi Anak* (Yogyakarta: Idea Publishing, 2008), h. 158.

pendapat Henry A. Paul di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya ada 3 fungsi utama diterapkannya sebuah hukuman, yaitu: untuk memperbaiki individu yang bersangkutan agar menyadari kekeliruannya dan tidak mengulangnya lagi, melindungi pelakunya agar tidak melanjutkan pola tingkah laku yang menyimpang, buruk, dan tercela, melindungi masyarakat luar dari perbuatan-perbuatan salah (nakal, jahat, asusila, kriminal, abnormal, dan lain-lain) yang dilakukan oleh anak atau orang dewasa.

Pada prinsipnya hukuman diberikan karena ada pelanggaran atau adanya kesalahan yang dilakukan peserta didik. Jadi hukuman merupakan suatu akibat dari pelanggaran dan sebagai titik tolak untuk mengadakan perbaikan. Oleh karena itu para ahli mengemukakan pandangannya tentang jenis-jenis hukuman. Salah satunya dikemukakan oleh Abdullah Munir. Menurutnya hukuman dalam pendidikan jika ditinjau dari tingkatannya terbagi 3, yaitu hukuman ringan: di antaranya kontrol sederhana (perubahan mimik wajah, pelototan mata), pertemuan individual dengan cara memanggil anak yang melanggar, hukuman sedang: di antaranya menghilangkan hak istimewa dan menahan di sekolah *distensi*, dan hukuman berat: di antaranya hukuman badan (pukulan), diskorsing dari kegiatan sekolah.²⁴

M. Ngalim Purwanto mengemukakan bahwasanya berdasarkan perkembangan anak, maka hukuman terbagi atas 3 jenis, yaitu:

a. Hukuman asosiatif. Dalam hukuman asosiatif, pada umumnya pendidik mengasosiasikan antara hukuman dengan bentuk pelanggaran, antara penderitaan yang diakibatkan oleh hukuman dengan perbuatan pelanggaran yang telah

²⁴Lihat Abdullah Munir, *Pendidikan Karakter; Membangun Karakter Anak Sejak dari Rumah* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Abadi, 2010), h. 136.

dilakukannya. Biasanya anak akan menjauhi perbuatan yang tidak baik atau dilarang guru, untuk menghindari hukuman.²⁵

b. Hukuman logis. Hukuman ini diterapkan pada anak usia 10-16 tahun ke atas. Diterapkannya hukuman logis pada usia tersebut karena dianggap mereka telah mampu memahami bahwa hukuman yang diberikan merupakan hukuman wajar dari perbuatan yang dilakukan.²⁶

c. Hukuman normatif. Hukuman normatif diterapkan untuk memperbaiki moral peserta didik yang sangat erat kaitannya dengan pembentukan watak anak. Hukuman normatif diterapkan terhadap pelanggaran-pelanggaran mengenai norma-norma etika seperti: berdusta, menipu dan mencuri.²⁷

Ditambahkan oleh M. Ngalim Purwanto bahwa jika ditinjau dari segi sifatnya, hukuman dalam pendidikan terbagi 2 bagian, yaitu:

a. Hukuman preventif, yaitu hukuman yang dilakukan dengan maksud agar supaya tidak atau sengaja terjadi pelanggaran. Hukuman ini bermaksud untuk mencegah jangan sampai terjadi pelanggaran, sehingga hal itu dilakukannya sebelum pelanggaran dilakukan.²⁸

b. Hukuman represif, yaitu hukuman yang dilakukan karena adanya pelanggaran. Jadi hukuman dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau kesalahan.²⁹

Sedangkan jika ditinjau dari segi cara atau bentuk, maka hukuman terbagi menjadi empat macam yaitu:

²⁵ Anwar sadat, Jurnal Zaitun, Volume V Nomor 1, Juli 2009 h. 28.

²⁶ Anwar Sadat, Jurnal Zaitun.

²⁷ Anwar Sadat, Jurnal Zaitun.

²⁸ Lihat Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoretis dan Prkatis*, h. 190.

²⁹ Lihat Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis*, h. 189.

a. Hukuman dengan isyarat, yaitu hukuman yang diberikan kepada peserta didik dengan cara memberikan isyarat melalui mimik atau pantomimik. Misalnya: pandangan mata, gerakan anggota badan, raut muka, dan sebagainya. Hukuman ini dapat diberikan atau digunakan terhadap pelaku perbuatan atau tingkah laku peserta didik. Isyarat merupakan manifestasi balas perbuatan yang dikehendaki dan tidak berkenaan dengan hati orang lain.³⁰

b. Hukuman melalui perkataan. Hukuman melalui perkataan terbagi beberapa kategori yaitu:

- 1) Memberi tujuan nasehat
- 2) Teguran
- 3) Peringatan
- 4) Ancaman

c. Hukuman dengan perbuatan

Hukuman dengan perbuatan harus mengarah pada hal yang mendidik dan sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang telah diperbuat. Hukuman hanya diberikan oleh guru dalam konteks mendidik. Seperti, memberi hukuman dengan cara membersihkan kelas, membuat resume atau ringkasan, menghafal beberapa ayat al-Qur'an atau beberapa kosa kata dalam bahasa Arab atau bahasa Inggris atau apa saja yang mempunyai tujuan mendidik.³¹

d. Hukuman badan

Hukuman badan merupakan hukuman yang diberikan atau dijatuhkan dengan cara menyakiti anak (badan anak) dan sebagainya.³² Hukuman badan merupakan

³⁰Lihat Ngilim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis*, h. 189

³¹Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, h. 165.

³²Anwar Sadat, *Jurnal Zaitun*.

tindakan yang tidak mendidik. Misalnya, memukul siswa yang tidak bersalah hingga mengalami luka. Tindakan ini kurang bijaksana dalam pendidikan. Sikap ini akan mendatangkan permusuhan dan kebencian peserta didik.

Pemberian hukuman fisik/badan diberikan apabila dalam keadaan darurat, bukan merupakan suatu metode yang harus dan rutin dilakukan dalam proses pendidikan. Oleh karena itu pendidikan dalam pandangan Islam bukan didasarkan atas paksaan atau kekerasan melainkan berdasarkan pengertian dan rasa kasih sayang.

Selain jenis-jenis hukuman yang telah dikemukakan di atas, masih ada jenis-jenis hukuman yang lain, yaitu:

a. Hukuman Alam.

Hukuman ini dianjurkan oleh J.J. Resseau. Menurutnya, anak-anak ketika dilahirkan adalah suci, bersih dari segala noda dan kejahatan. Adapun yang menyebabkan rusaknya anak adalah masyarakat itu sendiri. Maka dari itu ia menganjurkan supaya anak-anak dididik menurut alamnya. Demikian pula mengenai hukuman, ia menganjurkan 'hukuman alam'.³³ Biarlah alam yang menghukum anak itu. Jika seorang anak yang bermain pisau kemudian tersayat jari tangannya maka itu adalah hukuman alam. Biarlah anak itu akan insyaf sendiri akibat yang sewajarnya dari perbuatannya itu; nantinya anak itu akan insyaf dengan sendirinya.

Tetapi apabila ditinjau dari segi pedagogis, hukuman alam itu tidak mendidik. Dengan mengandalkan hukuman alam saja, anak tidak dapat mengetahui norma-norma etika mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh diper-

³³ Anwar Sadat, *Jurnal Zaitun*, h. 95.

buat dan mana yang tidak. Lagi pula hukuman alam itu ada kalanya sangat membahayakan anak, bahkan hukuman alam itu dapat membinasakannya.

b. Hukuman ganti rugi.

Dalam hal ini, anak diminta untuk bertanggungjawab atau menanggung resiko dari perbuatannya, misalnya anak yang mengotorkan atau merobekkan buku milik kawannya, maka harus menggantinya.³⁴

c. Hukuman menakut-nakuti

Hukuman ini diberikan untuk menakut-nakuti anak agar tidak melakukan pelanggaran atau perbuatan yang dilarang. Pada dasarnya nilai didik itu telah ada, hanya saja perlu diperhatikan bahwa hal ini harus dijaga jangan sampai anak itu tidak berbuat kesalahan lagi hanya karena rasa takut saja, melainkan tidak berbuat kesalahan lagi karena adanya kesadaran, sebab apabila tidak berbuat kesalahan itu karena hanya takut, takut kepada bapak atau ibu guru. Maka jika tidak ada bapak atau ibu guru, kemungkinan besar ia akan mengulang kembali perbuatannya. Ia akan mengulangi perbuatannya secara sembunyi-sembunyi. Jika terjadi demikian, maka dapat dikatakan bahwa nilai pedagogis dari hukuman tersebut sangat minim sekali.

d. Hukuman Balas Dendam

Hukuman balas dendam merupakan jenis macam hukuman yang paling jelek, yang paling jahat dan paling tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam dunia pendidikan. Motif hukuman seperti ini dapat ditimbulkan oleh kekecewaan-kekecewaan (frustasi) yang dialami oleh guru, baik mengenai hubungannya dengan orang-orang lain, maupun hubungannya dengan peserta didik secara langsung. Misalnya, karena

³⁴ Anwar Sadat, *Jurnal Zaitun*.

seorang guru merasa dikecewakan dalam hal cinta oleh seorang gadis atau pemuda, maka ia melampiaskan kekecewaannya itu kepada peserta didiknya.

e. Hukuman Memperbaiki

Satu-satunya hukuman yang dapat diterima oleh dunia pendidikan adalah jenis hukuman yang memperbaiki, hukuman yang dapat menyadarkan anak kepada keinsafan atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Dengan adanya keinsafan, anak berjanji dalam hatinya sendiri tidak akan mengulangi kesalahannya kembali. Hukuman yang demikian inilah yang dikehendaki dalam dunia pendidikan. Hukuman yang bersifat memperbaiki ini disebut juga hukuman yang bernilai didik atau hukuman pedagogis.

Dari semua uraian sebelumnya merupakan jenis-jenis hukuman ditinjau dari beberapa aspek yang dilakukan pendidik dalam menghukum peserta didik. Jadi jenis-jenis hukuman ditinjau dari beberapa aspek yang dilakukan pendidik dalam menghukum peserta didik haruslah mengacu pada usaha pendidikan untuk memperbaiki kelakuan dan budi pekerti peserta didik. Sebab masalah hukuman merupakan masalah etis yang mencakup soal baik dan buruk, dan soal norma-norma.

Berdasarkan jenis-jenis hukuman yang telah dipaparkan, dapat dipahami bahwasanya kadang-kadang hukuman diperlukan dalam proses pembelajaran. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa kepribadian dari setiap peserta didik berbeda sehingga memerlukan penanganan yang berbeda pula. Tetapi tidak kalah pentingnya juga harus diketahui bahwa hukuman tidak selamanya identik dengan hukuman fisik saja, melainkan masih banyak jenis hukuman lain yang sifatnya lebih mendidik dan tentunya tidak merenggut hak hidup peserta didik.

Meskipun sampai saat ini hukuman masih menjadi bahan perdebatan namun menurut penulis dalam proses pendidikan hukuman itu wajar dan diperlukan dengan syarat bersifat mendidik. Maksudnya adalah dengan adanya hukuman diharapkan peserta didik menjadi tahu dan faham tentang kesalahan yang dilakukannya, tanpa merampas “batas kemanusiaannya.” Dengan kata lain hukuman dari pendidik kepada peserta didik harus bersifat mendidik. Jadi hukuman harus ada relasi dengan pengetahuan, pengembangan mental, disiplin, sifat kemanusiaan, kemandirian dan ketidakragu-raguan. Misalnya hukuman menghafalkan pembukaan UUD 1945, membuat puisi, menambah jumlah soal PR, membuat cerpen tentang siswa terhukum dan lain-lain. Pendeknya hukuman itu ada gunanya bagi pengembangan wawasan, kreativitas, kesadaran peserta didik yang terhukum. Bukan sebaliknya seperti yang terjadi di beberapa daerah, hukuman yang dilakukan bersifat menyusahkan bahkan terkadang menyiksa fisik serta psikis peserta didik sehingga bukannya menimbulkan keinsyafan pada peserta didik akan kesalahan yang dilakukan tetapi justru meninggalkan rasa jengkel, tidak puas dan menambah rasa benci peserta didik terhadap pendidiknya.

7. Kaidah Penerapan Hukuman dalam Pendidikan

Pelaksanaan hukuman sebagai salah satu alat pendidikan boleh dilakukan sebagai jalan terakhir dan harus dilakukan secara terbatas dan tidak menyakiti peserta didik. Tujuan utama hukuman dalam proses pendidikan adalah untuk menyadarkan peserta didik dari kesalahan yang dilakukan. Pemberian hukuman harus dimulai dari tindakan sebelumnya yang dimulai dari pemberian nasehat, teguran langsung, melalui sindiran, melalui celaan, dan melalui pukulan.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa prinsip pokok dalam mengaplikasikan hukuman kepada peserta didik adalah hukuman dilakukan setelah terjadi pelanggaran aturan dan hukuman dilakukan sebagai jalan terakhir yang ditempuh seorang pendidik serta dilakukan secara bertahap. Agar benar-benar menjadi sarana untuk mencapai tujuan pendidikan, maka sebelum menjatuhkan hukuman pada peserta didik yang melakukan pelanggaran, hendaknya setiap guru memperhatikan syarat-syarat dalam menggunakan alat pendidikan berupa hukuman. Hal ini perlu diketahui, karena guru sebagai tonggak utama bukan hanya berdiri di depan kelas, namun lebih dari itu guru dituntut lebih bertanggungjawab dalam membentuk moral dan etika peserta didik agar dapat meningkatkan kedisiplinan, sehingga dapat mencapai prestasi belajar yang baik.

Menurut Armai Arief ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh setiap guru sebelum menerapkan hukuman, yaitu

- a. Pemberian hukuman harus tetap dalam jalinan cinta, dan kasih sayang.
- b. Harus didasarkan pada alasan keharusan.
- c. Harus menimbulkan kesan di hati anak.
- d. Harus menimbulkan keinsyafan dan penyesalan kepada anak didik.
- e. Harus diikuti dengan pemberian maaf dan harapan serta kepercayaan.³⁵

Sedangkan menurut M. Ngalim Purwanto, syarat-syarat hukuman yang bersifat pedagogis adalah sebagai berikut:

- a. Setiap hukuman hendaklah dapat dipertanggungjawabkan
- b. Hukuman itu diusahakan bersifat memperbaiki kelakuan dan moral anak-anak
- c. Hukuman tidak boleh bersifat ancaman atau pembalasan dendam
- d. Jangan menghukum pada waktu sedang marah

³⁵Lihat Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, h. 133.

- e. Hukuman harus diberikan dengan sadar dan sudah diperhitungkan atau dipertimbangkan
- f. Dapat dirasakan anak sebagai penderitaan yang sebenarnya
- g. Usahakan jangan melakukan hukuman badan
- h. Hukuman tidak boleh merusak hubungan baik antara si pendidik dan anak didiknya
- i. Guru sanggup memberi maaf setelah anak itu menginsafi kesalahannya.³⁶

Hukuman dapat menimbulkan nestapa pada diri peserta didik yang melakukan pelanggaran dan dapat menimbulkan akibat yang bermacam-macam. Oleh karena itu, seorang guru hendaknya mengusahakan pulihnya kembali hubungan dengan peserta didiknya setelah hukuman diberikan. Dengan demikian dapat menghindarkan perasaan sakit hati yang mungkin timbul pada diri peserta didik.

Lebih jauh Abdullah Nasih Ulwan menyebutkan beberapa persyaratan memberikan hukuman pukulan, antara lain:

- a. Pendidik tidak terburu-buru.
- b. Pendidik tidak memukul ketika dalam keadaan sangat marah.
- c. Menghindari anggota badan yang peka seperti kepala, muka, dada dan perut.
- d. Tidak terlalu keras dan tidak menyakiti.
- e. Tidak memukul anak sebelum ia berusia 10 tahun.
- f. Jika kesalahan anak adalah untuk pertama kalinya, hendaknya diberi kesempatan untuk bertobat, minta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya itu.
- g. Pendidik menggunakan tangannya sendiri.
- h. Jika anak sudah menginjak usia dewasa dan dengan 10 kali pukulan tidak juga jera maka boleh ia menambah dan mengulangnya sehingga anak menjadi baik kembali.³⁷

Berdasarkan pernyataan di atas, dipahami bahwa hukuman fisik boleh diberikan kepada anak yang berusia minimal sepuluh tahun karena dikhawatirkan atas

³⁶M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis*, h. 191.

³⁷Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam*, terj. Jamaludin Miri (Jakarta, 1994), h. 333.

kondisi fisik anak yang masih lemah dan bahaya yang ditimbulkan pada kesehatan dan perkembangannya. Namun demikian, kebolehan menghukum bukan berarti pendidik dapat melakukan hukuman sekehendak hatinya, khususnya hukuman fisik.

Ada beberapa bagian anggota badan tertentu yang disarankan untuk dihindari dikenai hukuman fisik. Misalnya jangan memukul muka karena luka pada muka atau mata akan membekas atau menjadikan cacat pada wajah yang akan membuat anak minder. Jangan pula memukul kepala, karena akan membahayakan otak atau syaraf lainnya di kepala.

Oleh karena itu, apabila hukuman harus dilakukan maka pendidik memilih hukuman yang paling ringan akibatnya. Apabila hukuman badan harus dijatuhkan maka pendidik memilih anggota badan lain yang lebih aman dan kebal terhadap pukulan seperti, pantat dan kaki.

Abdul Majid dan Muhaimin menambahkan bahwa hukuman yang diberikan haruslah:

- a. Mengandung makna edukasi
- b. Merupakan jalan/solusi terakhir dari beberapa pendekatan dan metode yang ada
- c. Diberikan setelah peserta didik mencapai usia 10 tahun.³⁸

Dari beberapa pendapat di atas, diketahui bahwa para tokoh pendidikan saling melengkapi dalam mengemukakan syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam menerapkan hukuman. Hal yang penting diketahui dalam memberikan hukuman kepada peserta didik adalah dapat menimbulkan perasaan menyesal atas kesalahan yang diperbuat, berjanji tidak mengulanginya lagi serta tidak menyakiti fisik atau psikis peserta didik. Seperti yang dikemukakan oleh Sukardi bahwa:

³⁸ Abd. Majid & Muhaimin, *Pemikiran Pendidikan Islam; Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar* (Bandung: Trigenda Karya, 1993), h. 271.

Hukuman yang dilakukan dengan tidak menggunakan kaidah-kaidah yang tepat dapat menyebabkan peserta didik kurang percaya diri, kreatifitasnya terhambat, perkembangan jiwanya terganggu, bahkan bisa mengakibatkan mereka bersikap kasar dan sadis terhadap orang lain.³⁹

Hukuman merupakan alat pendidikan terakhir yang digunakan setelah alat-alat pendidikan lain tidak memberikan hasil. Dalam hal ini perlu diketahui bersama, bahwa hendaknya jangan terlalu terbiasa memberikan hukuman. Boleh menggunakan hukuman kalau memang hal itu benar-benar diperlukan, tetapi juga harus diberikan secara bijaksana.

Pendidikan tanpa adanya hukuman sedikitpun, walaupun peserta didik sering melanggar peraturan dan perbuatan salah, maka akan membentuk pribadi berkela-kuan buruk dan susah diatur, bahkan menimbulkan kesombongan dan kesewenang-wenangan pada diri peserta didik. Hal ini dapat menyebabkan banyak bermunculan kasus kenakalan remaja dan masalah-masalah sosial.

Hukuman diberikan sebagai petunjuk akan adanya tindakan indisipliner, juga memiliki nilai formal yang langsung bersentuhan dengan hati nurani peserta didik. Jadi pemberian hukuman kepada peserta didik tidak boleh menimbulkan rasa kecewa yang berlebihan, putus asa, menjauhkan diri dari guru dan menghilangkan rasa percaya diri peserta didik. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pemberian hukuman adalah kadar dan efek yang ditimbulkan apabila guru memberikan hukuman, sehingga harus disesuaikan dengan perbuatannya.

Dari beberapa pendapat di atas tentang kaedah penerapan hukuman, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Hukuman harus ada hubungannya dengan kesalahan
- b. Hukuman harus adil

³⁹Sukardi, *Guru Powerful Guru Masa Depan* (Cet. III; Bandung: Kolbu, 2009), h. 125.

- c. Hukuman lekas diterapkan agar peserta didik mengerti sebab dia dihukum dan apa arti hukuman tersebut.
- d. Pemberian hukuman harus dalam keadaan tenang
- e. Hukuman harus sesuai dengan umur anak
- f. Hukuman harus disertai dengan penjelasan, sebab hukuman bertujuan membentuk kata hati, tidak hanya menghukum saja.
- g. Hukuman harus diikuti pemberian ampun
- h. Hukuman digunakan jika terpaksa atau hukuman itu merupakan alat pendidikan yang terakhir karena penggunaan alat pendidikan yang lain tidak bermanfaat.

8. Dampak Positif dan Dampak Negatif Pemberian Hukuman

Dalam proses pembelajaran, pemberian hukuman digunakan setelah metode, alat dan usaha yang lain digunakan. Pada prinsip pokok penerapan metode itu sendiri adalah untuk mencapai tujuan, dan hal ini jelas membawa pengaruh yang besar bagi peserta didik, sebagai objek hukuman.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sampai saat ini pemberian hukuman di lembaga pendidikan masih menjadi bahan perdebatan. Ada yang pro dan tidak sedikit pula yang kontra. Bagi yang pro, menganggap hukuman sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan, tetapi tidak secara mutlak. Sedangkan bagi yang pro, menganggap hukuman sebagai salah satu metode merusak karakter peserta didik.

Hukuman adalah instrumen sekunder dan diberikan dalam kondisi serta syarat tertentu. Jadi, menurut mereka, kalau guru atau orang tua masih dapat menangani peserta didiknya dengan nasihat-nasihat atau dengan penjelasan rasional, maka tidak perlu memberikan hukuman. Hukuman boleh diberikan setelah nasihat-nasihat verbal atau apa saja tidak lagi dapat mengusik kesadaran peserta didik.

Sedangkan bagi yang kontra, mereka menilai jika hukuman dilaksanakan dalam proses pembelajaran, secara tidak sadar pendidik sedang mengajarkan bahwa kebenaran itu (harus dilakukan) dengan paksaan. Efek negatif lain dari hukuman yang diterima anak-anak adalah anak-anak tidak melakukan pelanggaran karena takut akan pukulan (bukan lahir dari kesadaran mereka), sementara sifat buruknya tetap bersemayam di dalam dirinya.

Menurut penulis, adanya pendapat yang pro dan kontra dalam memahami pemberian hukuman di lembaga pendidikan salah satunya dipengaruhi oleh pandangan atau pola pikir yang berbeda. Selain itu tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada kasus pemberian hukuman yang berlebihan terhadap peserta didik dan ironisnya dilakukan oleh guru mereka sendiri. Niat guru memberikan hukuman agar peserta didik tidak melakukan kesalahan yang sama dan dapat memperbaiki kesalahannya. Tetapi cara yang digunakan tidak sesuai dengan etika sebagai guru dan pastinya sangat bertentangan dengan nilai-nilai kependidikan, khususnya Al-Qur'an dan Sunnah sebagai petunjuk hidup manusia. Berikut ini penulis menguraikan dampak positif dan dampak negatif dari hukuman, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pendidik sebelum melakukan hukuman.

Menurut M. Ngalim Purwanto ada tiga dampak negatif dari pemberian hukuman, yaitu:

- a. Menimbulkan perasaan dendam pada si terhukum. Akibat ini harus dihindari karena hukuman ini adalah akibat dari hukuman yang sewenang-wenang dan tanpa tanggung jawab.
- b. Anak menjadi lebih pandai menyembunyikan pelanggaran. Ini bukanlah akibat yang diharapkan oleh pendidik.

c. Si pelanggar menjadi kehilangan perasaan salah, karena si pelanggar merasa telah membayar hukumannya dengan hukuman yang telah diterimanya.⁴⁰

Pendapat berbeda disampaikan oleh Armai Arief dalam bukunya *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, mengatakan bahwa dampak negatif yang muncul dari pemberian hukuman yang tidak efektif, antara lain:

- a. Membangkitkan suasana rusuh, takut, dan kurang percaya diri.
- b. Peserta didik akan selalu merasa sempit hati, bersifat pemalas, serta akan menyebabkan ia suka berdusta (karena takut dihukum).
- c. Mengurangi keberanian anak untuk bertindak.⁴¹

Dalam buku yang lain, Syaikh Jamil Zainu berpendapat bahwa dampak negatif dari pemberian hukuman fisik ada tujuh, yaitu:

- a. Mengacaukan dan menghambat jalannya pelajaran bagi peserta didik secara keseluruhan.
- b. Guru dan peserta didik akan terpengaruh ketika diberlakukannya hukuman dan hal itu akan membekas pada keduanya secara bersamaan.
- c. Adanya bekas yang merugikan pada diri peserta didik yang terkena pukulan baik pada wajah, mata, telinga atau anggota badan lainnya.
- d. Kesulitan pemahaman terhadap pelajaran bagi peserta didik yang dihukum
- e. Kesulitan yang akan dihadapi guru untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan hakim, keluarga dan penyidik
- f. Terbuangnya waktu peserta didik untuk belajar dan mereka akan terpengaruh dengan apa yang tengah terjadi ketika pelajaran berlangsung.
- g. Hilangnya rasa saling memuliakan dan menghormati antara peserta didik dan guru.⁴²

Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari pemberian hukuman, maka menurut penulis mengindikasikan

⁴⁰Lihat M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoretis dan Prkatis.*, h. 177.

⁴¹Armai Arief, *Pengantar Ilmu Pendidikan dan Metodologi Pendidikan Islam*, h. 133

⁴²Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu, *Seruan Kepada Pendidik dan Orangtua, terj.* Abu Hanan dan Ummu Dzakiyya (Solo, 2005), h. 166-167.

bahwa hukuman tidak gampang dilakukan apalagi jika dilakukan dalam keadaan emosi atau marah dan sebagai ajang balas dendam. Oleh karena itu, guru perlu mempertimbangkan terlebih dahulu baik buruknya sebelum menggunakan hukuman dalam proses pembelajaran. Hal ini salah satunya dikarenakan jangan sampai hukuman yang dilakukan bukannya menyelesaikan masalah tetapi malah menambah masalah baru.

Sebagaimana tujuan mendasar dari pemberian hukuman dalam pendidikan yaitu membangun kesadaran peserta didik untuk mematuhi peraturan sekolah serta tidak mengulangi pelanggaran yang dilakukan, maka tentunya hukuman diharapkan dapat membawa dampak positif atau bernilai guna.

Menurut penulis hukuman akan membawa dampak yang baik jika dilakukan secara baik pula, bukan sewenang-wenang. Menurut Armai Arief dampak positif dari hukuman antara lain:

- a. Menjadikan perbaikan-perbaikan terhadap kesalahan murid.
- b. Murid tidak lagi melakukan kesalahan yang sama.
- c. Merasakan akibat perbuatannya sehingga ia akan menghormati dirinya.⁴³

Ditambahkan oleh M. Ngalim Purwanto bahwa dampak positif hukuman menjadi dua, yaitu:

- a. Memperbaiki tingkah laku si pelanggar.
- b. Memperkuat kemauan si pelanggar untuk menjalankan kebaikan.⁴⁴

Bentuk hukuman yang diberikan terhadap peserta didik dengan tujuan memperbaiki tingkah laku peserta didik adalah hukuman atas pelanggaran-pelang-

⁴³ Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam.*, h. 133.

⁴⁴ M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis*, h. 180.

garan, seperti peserta didik tidak mengerjakan PR bahasa Arab, akan dihukum menghafal 20 kosakata bahasa Arab. Karena mendapat hukuman itu anak-anak merubah sikap malasnya mengerjakan PR, menjadi rajin mengerjakan PR bahasa Arab.

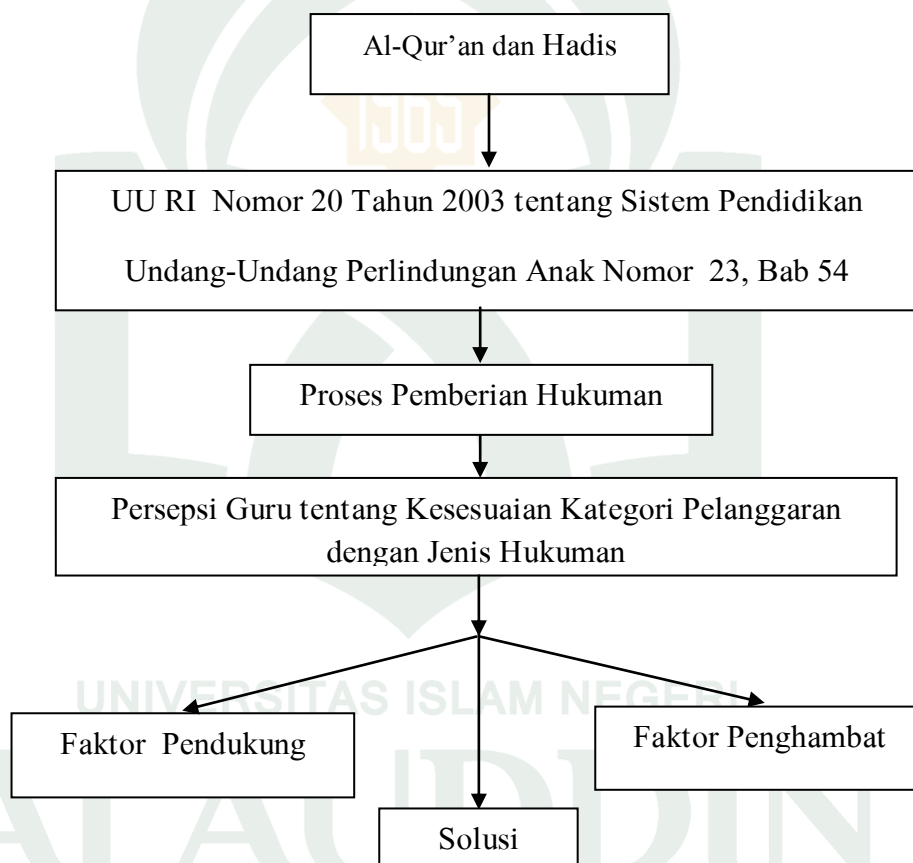
C. Kerangka Konsep

Landasan teoretis yang telah dikemukakan sebelumnya menjadi landasan bagi peneliti dalam menerapkan penelitian tentang persepsi guru terhadap penerapan hukuman bagi peserta didik di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang.

Tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah yang terdapat dalam al-Qur'an dan dijelaskan serta dipertegas oleh hadis Nabi Muhammad saw. yang dijabarkan dalam bentuk perundang-undangan, salah satunya UU SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pendidikan adalah dengan berusaha memanfaatkan alat pendidikan dengan baik di antaranya adalah hukuman.

Penerapan hukuman dapat membawa dampak positif juga negatif. Alasannya karena pemahaman yang berbeda dari setiap peserta didik dalam menanggapi hukuman. Hukuman berdampak positif jika peserta didik dapat menyadari serta mengubah kelakuannya menjadi lebih baik. Namun hukuman menjadi negatif jika peserta didik justru merasa jengkel atau marah dan kecewa menerima hukuman atas pelanggaran yang dilakukan. Selain itu kadang reaksi tidak setuju muncul dari orang tua peserta didik jika anaknya dihukum. Adanya dampak yang berbeda dari penerapan hukuman melahirkan persepsi yang berbeda pula termasuk persepsi guru tentang penerapan hukuman yang ideal bagi peserta didik yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah. Ada guru yang menganggap hukuman cukup

dilakukan dengan pemberian teguran dan nasihat. Namun ada juga guru yang menganggap hukuman tidak cukup hanya dengan teguran dan nasihat tetapi lebih dari itu seperti menyuruh peserta didik berdiri di depan kelas, menambah PR, membersihkan kelas bahkan ada guru yang menganggap hukuman fisik dalam waktu tertentu diperlukan dengan syarat tidak melukai fisik dan psikis peserta didik. Untuk lebih jelasnya kerangka pikir tersebut dapat dilihat pada paradigma berikut:



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan *field research* yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Penelitian yang dilakukan di lapangan adalah meneliti masalah yang sifatnya kualitatif, yakni penelitian bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang diamati.¹ Penelitian yang penulis lakukan bertujuan menganalisis dan menggambarkan penelitian secara objektif dan mendetail untuk memperoleh hasil yang akurat sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif.

Secara teoretis, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu merupakan penyingkapan fakta dengan menganalisa data.² Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan persepsi guru tentang proses pemberian hukuman di lingkungan sekolah yaitu sebuah studi kasus di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang. SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang ada di Kabupaten Pinrang, dan satu-satunya sekolah menengah

¹Lexy J. Molcong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 6.

²Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Renika Cipta, 2007), h. 234.

tingkat atas yang ada di kecamatan lembang, yang menampung hampir seluruh alumni Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Lembang.

SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang pernah memberlakukan penerapan sistem poin terhadap peserta didik yang melanggar tata tertib sekolah. Namun hal tersebut tidak lagi diterapkan saat ini dan kembali memberlakukan penerapan hukuman terhadap peserta didik yang melanggar tata tertib. Penulis berpikir peralihan pemberlakuan sistem poin ke penerapan hukuman di lembaga formal ini memberikan kesan dan pengalaman yang tidak sedikit terhadap guru yang ada di sekolah ini. Kesan dan pengalaman ini sangat berpengaruh terhadap persepsi mereka tentang penerapan salah satu dari alat non material pendidikan dalam hal ini penerapan hukuman.

Penegakan disiplin di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang menjadi perhatian seluruh komponen pendidik di sekolah ini. Pembentukan karakter dan perilaku yang baik menjadi titik berat dalam penegakan tata tertib sekolah, sehingga sesederhana apa pun bentuk ketidaktaatan peserta didik terhadap peraturan sekolah akan menjadi perhatian dari komponen pendidik yang ada di sekolah ini yang selanjutnya akan mendapatkan konsekuensi berupa hukuman, yang ditanggapi keliru oleh orang tua peserta didik sehingga pernah menyentuh ranah hukum.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan psikologis, pedagogis, sosiologis dan pendekatan yuridis.

1. Pendekatan psikologis adalah pendekatan yang digunakan untuk mengetahui kondisi kejiwaan guru dan peserta didik ketika diterapkannya hukuman di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang.

2. Pendekatan pedagogis, digunakan untuk mengetahui bagaimana dunia pendidikan memandang penerapan hukuman terhadap peserta didik.
3. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang digunakan untuk mengetahui interaksi yang terjadi antara guru dengan peserta didik, antara guru dengan orang tua peserta didik, dan antara orang tua dengan peserta didik.
4. Pendekatan yuridis, digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap penelitian ini yang mengacu pada Undang-undang RI tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 pasal 1 ayat 1 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
5. Pendekatan teologis normatif, pada prinsipnya merupakan pendekatan dasar yang diturunkan dari ajaran agama Islam.³

C. Sumber Data

Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diambil dari pelaku utama dalam obyek penelitian. Dalam penelitian ini data primer diambil langsung dari para informan yaitu guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, peserta didik dan orang tua peserta didik.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui pengamatan (observasi) dan penelusuran terhadap dokumen yang berkaitan dengan objek yang diteliti berupa catatan nama peserta didik yang pernah melakukan pelanggaran dan perubahan perilaku setelah mendapatkan hukuman. Data sekunder dalam penelitian ini adalah semua data yang

³Lihat Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan Agama Islam* (Cet.I; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), h. 47.

dapat menunjang penelitian ini seperti buku, karya ilmiah, majalah, brosur dan catatan dokumentasi yang berkenaan dengan persepsi guru tentang penerapan hukuman di lingkungan sekolah.

D. Metode Pengumpulan Data

Kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu, untuk menjangkau data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan data, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah metode ilmiah yang biasa diartikan sebagai pengamatan melalui pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan semua alat indera. Teknik ini dilakukan sebagai studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti di lokasi penelitian, dan untuk mengetahui kondisi informan. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, observasi tidak terbatas pada orang tetapi melibatkan objek lain.⁴

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan dilakukan terhadap objek di tempat kejadian atau berlangsungnya peristiwa penerapan hukuman yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik, termasuk mengambil data dari guru BP tentang jenis pelanggaran dan prosedur penanganannya.

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 310.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data secara langsung dalam bentuk tanya jawab dengan informan. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁵ Metode ini adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab kepada seseorang yang dianggap kompeten untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan persepsi guru tentang proses pemberian hukuman di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang. Bentuk wawancara yang digunakan peneliti dalam menggali informasi dari informan adalah dengan menggunakan bentuk wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting dari berbagai sumber data yang ditemukan di lokasi penelitian atau pada lokasi lain yang berpengaruh terhadap fokus dan objek penelitian. Dalam menggunakan metode dokumentasi, peneliti menyediki dokumen-dokumen tertulis berupa catatan administrasi guru BP yang berisi tentang daftar penanganan peserta didik yang pernah melanggar peraturan sekolah dan tindaklanjutnya serta data-data lain yang berkaitan dengan penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Penelitian yang bermutu dapat dilihat dari hasil penelitiannya, sedangkan kualitas hasil penelitian sangat tergantung pada instrumen dan kualitas pengumpulan data. Instrumen merupakan alat bantu yang sangat penting dalam kegiatan

⁵ *Ibid*, h. 317.

penelitian, karena data yang ada diperoleh melalui instrumen. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai *human instrument*, berfungsi menentukan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, menilai kualitas data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Penulisan tesis ini menggunakan beberapa jenis instrumen, yaitu:

1. Pedoman observasi adalah alat bantu berupa pedoman pengumpulan data yang digunakan pada saat proses penelitian.
2. Pedoman wawancara adalah alat berupa catatan pertanyaan yang digunakan dalam pengumpulan data.
3. Alat dokumentasi berupa catatan peristiwa yang berbentuk tulisan langsung atau arsip-arsip, gambar, serta alat perekam gambar dan suara untuk mengumpulkan arsip-arsip gambar dan suara.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data, peneliti melakukan analisis data. Namun, sebelum peneliti menganalisis data, dilakukan proses pengolahan data melalui tiga tahap, yaitu:

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data perlu dilakukan dalam menganalisa data, karena data yang diperoleh di lapangan cukup banyak. Hasil reduksi data akan membantu peneliti dalam memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Pada tahap ini setelah peneliti memperoleh data dari informan, peneliti

memilih data yang dibutuhkan dan mendukung terkait persepsi guru tentang penerapan hukuman di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Namun, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan memahami apa yang telah terjadi, dan merencanakan langkah kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Pada tahapan ini peneliti memberikan gambaran dalam bentuk narasi terkait persepsi guru tentang penerapan hukuman di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang, berdasarkan data yang diperoleh dari informan dan hasil pengamatan penulis.

3. *Conclusion Drawing* (Penarikan kesimpulan)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap awal. Namun apabila ada bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang dapat berupa deskripsi suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas kemudian menjadi jelas, dapat pula berupa hubungan kausal atau interaktif, dan hipotesis atau teori.⁶ Penarikan kesimpulan menggunakan teori dan pendekatan yang terkait dengan sasaran penelitian.

⁶Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Cet. VI; Bandung: CV. Alfabeta, 2009), h. 247-253.

Tiga tahap tersebut harus dilakukan secara bertahap oleh peneliti. Diawali dari tahap mereduksi data, menyajikan data, kemudian menarik kesimpulan dari keseluruhan penelitian. Di samping ketiga tahap analisis data tersebut, peneliti juga menggunakan analisis data dengan cara tipologi, yaitu pengelompokan data yang di dalamnya terdiri atas kategori-kategori berdasarkan aspek-aspek tertentu.⁷ Selanjutnya, data yang diperoleh/terkumpul dianalisis secara deskriptif untuk mencari dan menemukan esensi persoalan yang menjadi objek pembahasan. Dari hasil analisa tersebut maka peneliti dapat memberi gambaran substansi objek kajian mengenai persepsi guru tentang proses pemberian hukuman di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang.



⁷Lihat Ag. Bambang Setiyadi, *Metode Penelitian untuk Pengajaran Bahasa Asing Pendekatan Kuantitatif dan kualitatif* (Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 256.

BAB IV

PERSEPSI GURU DAN PROSES PEMBERIAN HUKUMAN DI LINGKUNGAN SMA NEGERI 1 LEMBANG KABUPATEN PINRANG

A. Profil SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang

1. Gambaran Umum SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang

Secara geografis SMA Negeri 1 Lembang berada di bagian utara Kabupaten Pinrang, yang terletak di tapal batas Provinsi Sulawesi-Selatan yaitu sekitar 226 km ke utara dari ibu kota Provinsi Sulawesi-Selatan (Makassar), 37 km ke utara dari pusat kota Pinrang. Sekolah ini terletak 50 m dari Jalan Poros Pinrang Polman Km. 37 Tuppu, Kelurahan Tadokkong, Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang memiliki luas lahan 2.065 m². Sekolah ini didirikan pada tahun 2000 dan telah mengalami perubahan kepemimpinan sebanyak 3 kali. Adapun jumlah kelas reguler saat ini adalah 20 kelas. Prestasi tertinggi yang pernah diraih oleh SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang adalah pada tahun 2002 menjadi juara nasional untuk kategori Lomba Lingkungan Sekolah Sehat, pada tahun 2004 meraih Juara I Nasional untuk kategori Lomba sekolah Berbudaya Lingkungan dan pada tahun 2007 meraih Juara I Sekolah Model Adiwiyata Tingkat Nasional.

a. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah

Sebagai sebuah lembaga pendidikan formal, SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang juga memiliki visi, misi dan tujuan sekolah. Berikut penulis uraikan visi, misi dan tujuan sekolah

1) Visi Sekolah: Berlandaskan Iman dan Takwa, Terbaik dalam Ilmu Pengetahuan dan teknologi, serta teladan dalam bersikap dan berperilaku.¹

2) Misi Sekolah:

- a) Meningkatkan kegiatan belajar mengajar secara efektif, sehingga setiap siswa berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- b) Menciptakan kompetisi yang sehat untuk menumbuhkan semangat keunggulan bagi seluruh warga sekolah
- c) Mendorong dan membantu siswa untuk mengenal potensi dirinya sehingga dapat berkembang secara optimal.²

3) Tujuan Sekolah:

- a) Meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga edukatif sesuai kompetensi mengajar yang diharapkan.
- b) Menjalin kerjasama antar warga sekolah dengan *stakeholder* yang ada dalam rangka pengembangan pendidikan.
- c) Meningkatkan mutu dan prestasi kerja siswa, baik kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
- d) Melanjutkan kegiatan proses pembelajaran berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi.
- e) Melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
- f) Mengupayakan sarana dan prasarana yang dapat mendukung kegiatan pembelajaran berbasis ICT.³

¹Dokumentasi Tata Usaha SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang.

²Dokumentasi Tata Usaha SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang.

³Dokumentasi Tata Usaha SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang.

b. Keadaan Guru, Pegawai dan Peserta Didik

1) Keadaan Guru

Pada tahun pelajaran 2012/2013, SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang memiliki 35 orang tenaga guru.⁴ Berdasarkan informasi yang diperoleh dari bagian tata usaha, diketahui bahwa ada 1 orang guru bergelar magister (S2), 34 orang guru bergelar sarjana (S1). Dari segi status, guru di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang diklasifikasi menjadi guru PNS dan guru honor. Tercatat 21 orang berstatus PNS dan 14 orang berstatus honor.

Berdasarkan data di atas penulis berkesimpulan bahwa semua guru telah mengikuti jenjang pendidikan pada perguruan tinggi untuk tingkat sarjana, bahkan ada yang telah bergelar magister. Hal ini berarti bahwa standar kualifikasi sarjana (S1) telah menjadi standar persyaratan penuh bagi perkembangan sekolah, salah satunya melalui kualitas pendidikan tenaga guru. Walaupun semua guru telah bergelar sarjana (S1), tetapi jika dibandingkan dengan jumlah peserta didik maka jumlah guru masih dapat dikategorikan kurang karena tidak seimbang antara rasio guru dengan rasio peserta didik. Hal ini tentunya dapat berpengaruh bagi proses pembelajaran karena jumlah guru yang masih kurang.

2) Keadaan Pegawai

Masa depan sebuah sekolah sebagian besar ditentukan oleh orang-orang yang ada dalam lingkungan sekolah termasuk keberadaan pegawai. Oleh karena itu, seyogyanya setiap pegawai di sekolah saling bersinergi dan bekerja sama untuk mewujudkan masa depan sekolah yang lebih baik. Penempatan pegawai administrasi di sekolah seharusnya benar-benar mempertimbangkan mutu, kemampuan dan

⁴Dokumentasi Tata Usaha SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang.

kecakapan yang memadai untuk melaksanakan tugas mereka pada bidang masing-masing.

Berdasarkan data pegawai yang diterima dari bagian tata usaha, diketahui bahwa keberadaan tenaga pegawai administrasi di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang mencapai 8 orang.⁵ Dari segi status pegawai di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang diklasifikasi menjadi pegawai PNS dan pegawai honor. Tercatat 3 orang yang berstatus pegawai PNS dan 5 orang berstatus pegawai honor.

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa setiap pegawai bertugas dalam beberapa bidang. Tugas tersebut meliputi, membantu proses pembelajaran, urusan kesiswaan, kepegawaian, peralatan sekolah, urusan infrastruktur sekolah, keuangan, bekerja di laboratorium, dan perpustakaan. Menurut penulis, jumlah pegawai yang ada di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang dikategorikan masih kurang karena jika dibandingkan dengan jumlah peserta didik terjadi perbedaan yang sangat jauh yakni jumlah peserta didik yang mencapai 1000 orang sedangkan pegawai yang ada hanya 8 orang. Selain itu, semua pegawai yang ada di sekolah ini baik PNS maupun honor belum ada yang bergelar sarjana (S1). Sedangkan menurut penulis tingkat pendidikan seseorang berpengaruh terhadap kinerjanya.

3) Keadaan Peserta Didik

Keadaan peserta didik di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang setiap tahun mengalami peningkatan. Berikut keadaan peserta didik pada tabel berikut

⁵Dokumentasi Tata Usaha SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang.

Tabel 4.1

Tabel Keadaan Peserta Didik dan Jumlah Kelas

Kls	Pembagian Kelas							Jenis Kelamin		Jum
	1	2	3	4	5	6	7	LK	PR	
X	53	53	50	52	52	51	50	162	199	361
XI	46	45	46	45	45	37	41	125	180	305
XII	59	58	55	58	54	50		140	194	334
Jml	1000							1000		1000

Sumber Data: Tata Usaha SMA Negeri 1 Lembang⁶

Berdasarkan tabel 4.1. diketahui bahwa jumlah peserta didik di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang pada tahun pelajaran 2012/2013 mencapai 1000 orang. Setiap kelas yaitu kelas X, XI, XII terbagi ke dalam beberapa kelas. Kelas X terbagi menjadi 7 kelas yaitu X.₁, X.₂, X.₃, X.₃, X.₄, X.₅, X.₅, X.₆, dan X.₇. Kelas XII terbagi menjadi 7 kelas juga yaitu XI IPA₁, XI IPA₂, XI IPA₃, XI IPA₄, XI IPA₅, XI IPS₁, dan XI IPS₂. Sedangkan kelas XII terbagi menjadi 6 kelas yaitu XII IPA₁, XII IPA₂, XII IPA₃, XII IPA₄, XII IPS₁, DAN XII IPS₂.

Jumlah peserta didik yang mencapai 1000 orang tentunya menjadi suatu kebanggaan bagi SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang karena telah mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk mendidik anaknya di sekolah ini. Tetapi di sisi lain, hal ini sekaligus menjadi tantangan bagi SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang untuk dapat bekerja optimal sehingga mampu berperan dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan dan pembelajaran.

c. Keadaan Sarana dan Prasarana

Pada dasarnya keadaan sarana dan prasarana di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang dapat dikategorikan belum memadai. Hal ini dapat dilihat pada

⁶Dokumentasi Tata Usaha SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang.

jumlah kelas hanya 20 kelas sedangkan jumlah peserta didik yang ditampung sebanyak 1000 orang. Rata-rata setiap kelas menampung 50-52 peserta didik, sedangkan idealnya setiap kelas menampung maksimal 35 orang. Selain itu sarana yang lain seperti perpustakaan, laboratorium, kamar mandi serta sarana yang lain masih perlu perbaikan. Kondisi seperti ini tentunya memerlukan perhatian khusus dari pihak sekolah karena kondisi sarana dan prasarana berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Berikut penulis uraikan kondisi sarana dan prasarana di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang dalam bentuk tabel.

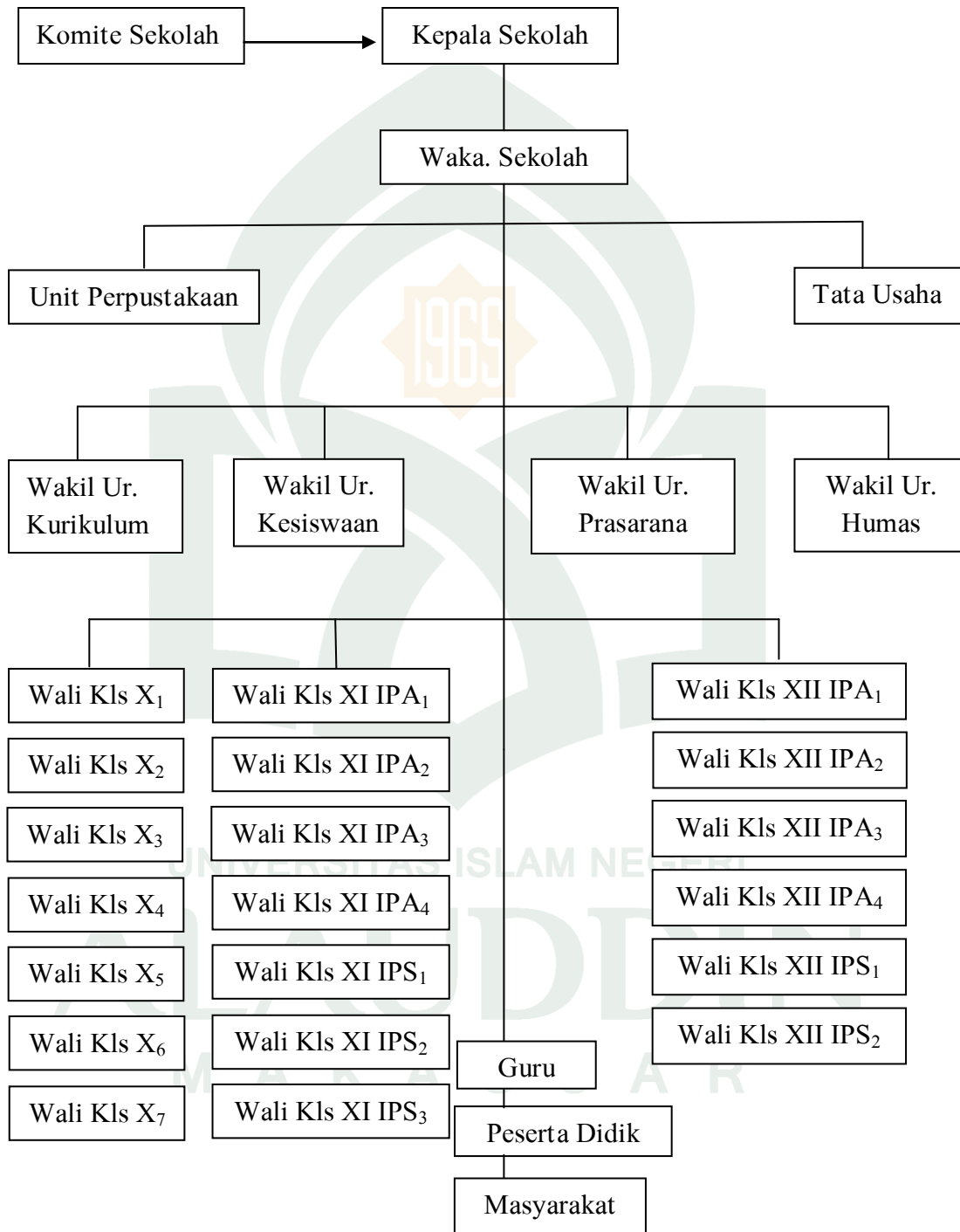
Tabel 4.2
Keadaan Sarana dan Prasarana

No	Jenis Ruangan	Jum	Luas (m ²)	Kondisi	
				Baik	Rusak
1.	Kelas / Ruang Teori	20	864	10	10
2.	Lab. IPA	-	-	-	-
3.	Lab. Fisika	1	120	1	-
4.	Lab. Biologi	1	120	1	-
5.	Lab. Kimia	1	120	1	-
6.	Lab. Komputer	-	-	-	-
7.	Lab. Bahasa	1	120	1	-
8.	Lab. IPS	-	-	-	-
9.	Ruang Perpustakaan	1	120	1	-
10.	Ruang Kopsis	1	24	1	-
11.	Ruang Kepala Sekolah	1	54	1	-
12.	Ruang Guru	1	60	1	-
13.	Ruang Tata Usaha	1	63	1	-
14.	Ruang OSIS	1	24	-	1
15.	Gudang	1	54	1	-
16.	KM/WC Guru	1	18	1	-
17.	KM/WC Siswa	1	49		1

Sumber Data: Tata Usaha SMA Negeri 1 Lembang⁷

⁷Dokumentasi Tata Usaha SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang.

Untuk melengkapi data yang telah dituliskan berikut penulis cantumkan struktur organisasi SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang⁸



⁸Tata Usaha SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang

B. Gambaran Proses Pemberian Hukuman di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang

SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang merupakan satu-satunya sekolah menengah tingkat atas yang ada di Kecamatan Lembang. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa peserta didik yang ada di sekolah ini tergolong banyak yaitu 1000 orang. Sebagai sebuah lembaga pendidikan, SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang juga menerapkan beberapa peraturan bagi peserta didiknya. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk mengatur jalannya proses pembelajaran dalam sekolah dan untuk membentuk kedisiplinan dalam proses pembelajaran.

Pada dasarnya peraturan yang ada di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang telah menaungi semua aspek penting, meliputi kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Di sisi lain, untuk menunjang jalannya proses pembelajaran, sekolah ini juga telah membuat peraturan yang berkaitan dengan seragam sekolah, upacara bendera, kesopanan atau etika, kebersihan dan keindahan, busana dan rambut serta sanksi-sanksi bagi yang melanggar peraturan tersebut.

Berikut ini penulis uraikan semua bentuk pelanggaran yang perlu dihindari oleh peserta didik meliputi komponen keterlambatan, kerajinan, kerapian, kepribadian, ketertiban, pelanggaran terhadap kepala sekolah, guru dan karyawan.

1. Keterlambatan, mencakup:
 - a. Terlambat masuk sekolah
 - b. Terlambat masuk karena izin keluar
 - c. Izin keluar pekarangan sekolah dan tidak kembali lagi
2. Kerajinan, mencakup:
 - a. Siswa tidak masuk karena sakit dengan keterangan atau tanpa keterangan (alpa)
 - b. Tidak masuk dengan keterangan palsu
 - c. Meninggalkan kelas tanpa keterangan dan tidak kembali lagi
 - d. Tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler/sakit
 - e. Tidak mengikuti upacara bendera hari Senin dan hari besar nasional
 - f. Tidak mengikuti kegiatan hari besar agama di sekolah

3. Kerapian, mencakup:
 - a. Seragam tidak sesuai dengan ketentuan
 - b. Seragam tidak lengkap
 - c. Tidak memasukkan baju seragam
 - d. Tidak bersepatu hitam
 - e. Baju ketat, rok di atas mata kaki
 - f. Seragam sobek dan ada coretan
 - g. Menggunakan topi selain topi OSIS di lingkungan sekolah
 - h. Mengubah pakaian seragam (Baju, Celana, Rok dan Jilbab)
 - i. Memakai sandal, sepatu sandal ke sekolah
 - j. Siswa berhias berlebihan
 - k. Siswa memakai perhiasan (aksesoris)
 - l. Siswa berambut panjang
 - m. Mencat rambut, kuku tangan dan kaki
 - n. Bertato
4. Kepribadian, mencakup:
 - a. Bermesraan di lingkungan sekolah
 - b. Meludah tidak pada tempatnya
 - c. Membuang sampah sembarangan
 - d. Merusak tanaman hias dan pohon
 - e. Melanggar norma susila
 - f. Mencuri/mengambil barang milik orang lain
 - g. Mencoret-coret dinding, tembok, meja, kursi dan pagar sekolah
 - h. Menulis atau mencoret buku paket sekolah
 - i. Mengambil dengan paksa (merampas)
 - j. Merusak/menghilangkan harta benda milik sekolah, guru, karyawan dan teman
 - k. Keluar tanpa melalui pintu depan
5. Ketertiban, mencakup:
 - a. Membawa rokok sendiri/titipan
 - b. Menghisap rokok di lingkungan sekolah
 - c. Memperjualbelikan rokok
 - d. Membawa buku/majalah/kaset/VCD porno, membawa sendiri atau titipan
 - e. Menjualbelikan/ menyewakan buku, majalah/kaset VCD porno
 - f. Mengajak, membawa/ memperjualbelikan/ menyewakan barang-barang tersebut
 - g. Membawa senjata tajam dan senjata api
 - h. Menggunakan senjata tajam dan senjata api
 - i. Menyuruh membawa/mempergunakan senjata tajam dan senjata api
 - j. Membawa/mempergunakan narkoba dan zat adiktif lainnya
 - k. Memperjualbelikan narkoba dan zat adiktif lainnya
 - l. Mengajak untuk membawa/memperjualbelikan narkoba dan zat adiktif lainnya
 - m. Membawa HP
 - n. Menghasut dan mengkoordinir hingga menimbulkan perkelahian
 - o. Perkelahian di lingkungan sekolah
 - p. Perkelahian di luar lingkungan sekolah
 - q. Terlibat dalam tawuran pelajar

- r. Membawa alat judi
- s. Terlibat perjudian/taruhan
- t. Memarkir kendaraan secara sembarangan
- u. Menerima tamu tanpa melaporkan ke tugas piket
- v. Mengganggu kelas yang sementara belajar
- w. Ditemukan di luar sekolah pada saat jam pelajaran berlangsung
- x. Naik kendaraan di lingkungan sekolah dengan ugal-ugalan
- 6. Pelanggaran terhadap Kepala Sekolah, Guru dan Karyawan, mencakup:
 - a. Melawan Kepala Sekolah, Guru dan Karyawan dengan ucapan/tulisan dengan kata-kata kasar
 - b. Melawan Kepala Sekolah, disertai ancaman
 - c. Melawan Kepala Sekolah, Guru dan Karyawan disertai pemukulan.⁹

Semua jenis pelanggaran yang telah disebutkan merupakan hasil keputusan rapat Musyawarah Perwakilan Kelas Pengurus OSIS dan Dewan Guru. Peraturan tersebut dibuat secara resmi oleh pihak sekolah dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah. Peraturan tersebut memuat hal-hal yang diharuskan dan dilarang bagi peserta didik selama berada di lingkungan sekolah. Apabila mereka melakukan pelanggaran, pihak sekolah berwenang untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berikut ini penulis memaparkan jenis pelanggaran berdasarkan pengelompokan bentuk pelanggaran dalam bentuk tabel.

Tabel 4.3

Jenis Pelanggaran Berdasarkan Kriteria

No	Bentuk	Rincian	Kategori
1	Keterlambatan	1. Terlambat masuk sekolah (Tiba)	Ringan
		2. Terlambat masuk karena izin keluar (pada saat proses pembelajaran)	Sedang
		3. Izin keluar pekarangan sekolah dan tidak kembali lagi	Berat
2	Kerajinan	1. Siswa tidak masuk karena sakit dengan tanpa keterangan (alpa)	Ringan
		2. Tidak masuk dengan keterangan palsu	Berat

⁹Dokumentasi Bimbingan Konseling SMA Negeri 1 Lembang, 2011.

		3. Meninggalkan kelas tanpa keterangan dan tidak kembali lagi	Berat
		4. Tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler / sakit(tanpa keterangan)	Ringan
		5. Tidak mengikuti upacara bendera hari Senin dan hari besar nasional (Tanpa keterangan)	Ringan
		6. Tidak mengikuti kegiatan hari besar agama di sekolah (Tanpa keterangan)	Ringan
3	Kerapian	1. Seragam tidak sesuai dengan ketentuan (model)	Ringan
		2. Seragam tidak lengkap	Sedang
		3. Tidak memasukkan baju seragam	Ringan
		4. Tidak bersepatu hitam	Sedang
		5. Baju ketat, rok di atas mata kaki	Sedang
		6. Seragam sobek dan ada coretan	Sedang
		7. Menggunakan topi selain topi OSIS di lingkungan sekolah	Sedang
		8. Mengubah pakaian seragam (Baju, Celana, Rok dan Jilbab)	Sedang
		9. Memakai sandal, sepatu sandal ke sekolah	Sedang
		10. Siswa berhias berlebihan	Sedang
		11. Siswa memakai perhiasan (aksesoris)	Sedang
		12. Siswa berambut panjang	Sedang
		13. Mencat rambut, kuku tangan dan kaki	Sedang
		14. Bertato	Sedang
4	Kepribadian	1. Bermesraan di lingkungan sekolah	Berat
		2. Meludah tidak pada tempatnya	Sedang
		3. Membuang sampah sembarangan	Sedang
		4. Merusak tanaman hias dan pohon	Berat
		5. Melanggar norma susila	Berat
		6. Mencuri/mengambil barang milik orang lain	Berat
		7. Mencoret-coret dinding, tembok, meja, kursi	Berat

		dan pagar sekolah	
		8. Menulis atau mencoret buku paket sekolah	Sedang
		9. Mengambil dengan paksa (merampas)	Berat
		10. Merusak/menghilangkan harta benda milik sekolah, guru, karyawan dan teman	Berat
		11. Keluar tanpa melalui pintu depan	Berat
5	Ketertiban	1. Membawa rokok sendiri/titipan	Berat
		2. Menghisap rokok di lingkungan sekolah	Berat
		3. Memperjualbelikan rokok	Berat
		4. Membawa buku / majalah / kaset / VCD porno, membawa sendiri atau titipan	Berat
		5. Menjualbelikan/menyewakan buku, majalah / kaset VCD porno	Berat
		6. Mengajak, membawa/memperjualbelikan/ menyewakan barang-barang tersebut	Berat
		7. Membawa senjata tajam dan senjata api	Berat
		8. Menggunakan senjata tajam dan senjata api	Berat
		9. Menyuruh membawa / mempergunakan senjata tajam dan senjata api	Berat
		10. Membawa/mempergunakan narkotika dan zat adiktif lainnya	Berat
		11. Memperjualbelikan narkotika dan zat adiktif lainnya	Berat
		12. Mengajak untuk membawa / memperjualbelikan narkotika dan zat adiktif lainnya	Berat
		13. Membawa HP	Berat
		14. Menghasut dan mengkoordinir hingga menimbulkan perkelahian	Berat
		15. Perkelahian di lingkungan sekolah	Berat
		16. Perkelahian di luar lingkungan sekolah	Berat
		17. Terlibat dalam tawuran pelajar	Berat

		18. Membawa alat judi	Sedang
		19. Terlibat perjudian/taruhan	Berat
		20. Memarkir kendaraan secara sembarangan	Ringan
		21. Menerima tamu tanpa melaporkan ke tugas piket	Ringan
		22. Mengganggu kelas yang sementara belajar	Berat
		23. Ditemukan di luar sekolah pada saat jam pelajaran berlangsung	Berat
		24. Naik kendaraan di lingkungan sekolah dengan ugal-ugalan	Berat
6	Pelanggaran terhadap Kepala Sekolah, Guru dan Karyawan	1. Melawan Kepala Sekolah, Guru dan Karyawan dengan ucapan/tulisan dengan kata-kata kasar	Berat
		2. Melawan Kepala Sekolah, disertai ancaman	Berat
		3. Melawan Kepala Sekolah, Guru dan Karyawan disertai pemukulan	Berat

Berdasarkan tabel 4.3 tergambar bahwa jenis pelanggaran yang terkait dengan keterlambatan terdiri dari 3 item, dengan rincian 1 item pelanggaran ringan, 1 item pelanggaran sedang, dan 1 item pelanggaran berat. Terkait dengan kerajinan terdiri dari 6 item, dengan rincian 2 item pelanggaran berat dan 4 item pelanggaran ringan. Terkait dengan kerapian terdiri dari 14 item, dengan rincian 12 item pelanggaran sedang dan 2 item pelanggaran ringan. Terkait dengan kepribadian terdiri dari 11 item pelanggaran, dengan rincian 2 pelanggaran ringan dan 9 pelanggaran sedang. Terkait dengan ketertiban terdiri dari 24 item pelanggaran, dengan rincian 21 pelanggaran berat, pelanggaran sedang 1 dan ringan 2 dan terkait dengan pelanggaran terhadap kepala sekolah, guru dan karyawan terdiri dari 3 item dengan rincian kategori berat. Jumlah secara keseluruhan perbuatan yang harus dihindari oleh peserta didik di SMA Negeri 1 Lembang sebanyak 61 item. Jenis pelanggaran

yang berkaitan dengan sikap dan perilaku peserta didik baik terhadap guru dan pegawai maupun terhadap peserta didik yang lain pada umumnya dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Hal ini memberi gambaran bahwa peraturan yang ada di SMA Negeri 1 Lembang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku peserta didik menjadi manusia yang berkepribadian yang luhur.

Untuk lebih jelasnya tentang pengelompokan bentuk pelanggaran berdasarkan kategori berat, sedang dan ringan penulis memaparkan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 4.4

Klasifikasi Pelanggaran Berdasarkan Kategori

No	Kategori	Rincian
1	Ringan	1. Memarkir kendaraan secara sembarangan 2. Menerima tamu tanpa melaporkan ke tugas piket 3. Tidak memasukkan baju seragam 4. Seragam tidak sesuai dengan ketentuan (model) 5. Tidak mengikuti kegiatan ekskul/sakit(tanpa keterangan) 6. Tidak mengikuti upacara bendera hari Senin dan hari besar nasional (Tanpa keterangan) 7. Tidak mengikuti kegiatan hari besar agama di sekolah (Tanpa keterangan) 8. Siswa tidak masuk karena sakit dengan tanpa keterangan (alpa) 9. Terlambat masuk sekolah (tiba)
2	Sedang	1. Seragam tidak lengkap 2. Terlambat masuk karena izin keluar (pada saat proses belajar) 3. Tidak bersepatu hitam 4. Baju ketat, rok di atas mata kaki 5. Seragam sobek dan ada coretan

		6. Menggunakan topi selain topi OSIS di lingkungan sekolah 7. Mengubah pakaian seragam (Baju, Celana, Rok dan Jilbab) 8. Memakai sandal, sepatu sandal ke sekolah 9. Siswa berhias berlebihan 10. Siswa memakai perhiasan (aksesoris) 11. Siswa berambut panjang 12. Mencat rambut, kuku tangan dan kaki 13. Bertato 14. Meludah tidak pada tempatnya 15. Membuang sampah sembarangan 16. Menulis atau mencoret buku paket sekolah 17. Membawa alat judi
3	Berat	1. Melawan Kepala Sekolah, Guru dan Karyawan dengan ucapan/tulisan dengan kata-kata kasar 2. Melawan Kepala Sekolah, disertai ancaman 3. Melawan Kepala Sekolah, Guru dan Karyawan disertai pemukulan. 4. Mengganggu kelas yang sementara belajar 5. Ditemukan di luar sekolah pada saat jam pelajaran berlangsung 6. Naik kendaraan di lingkungan sekolah dengan ugal-ugalan 7. Terlibat perjudian/taruhan 8. Membawa rokok sendiri/titipan 9. Menghisap rokok di lingkungan sekolah 10. Memperjualbelikan rokok 11. Membawa buku/majalah/kaset/VCD porno, membawa sendiri atau titipan 12. Menjualbelikan/ menyewakan buku, majalah/kaset VCD porno

	<p>13. Mengajak, membawa/ memperjualbelikan/ menyewakan barang-barang tersebut</p> <p>14. Membawa senjata tajam dan senjata api</p> <p>15. Menggunakan senjata tajam dan senjata api</p> <p>16. Menyuruh membawa/mempergunakan senjata tajam dan senjata api</p> <p>17. Membawa/mempergunakan narkoba dan zat adiktif lainnya</p> <p>18. Memperjualbelikan narkoba dan zat adiktif lainnya</p> <p>19. Mengajak untuk membawa/memperjualbelikan narkoba dan zat adiktif lainnya</p> <p>20. Membawa HP</p> <p>21. Menghasut dan mengkoordinir hingga menimbulkan perkelahian</p> <p>22. Perkelahian di lingkungan sekolah</p> <p>23. Perkelahian di luar lingkungan sekolah</p> <p>24. Terlibat dalam tawuran pelajar</p> <p>25. Mengambil dengan paksa (merampas)</p> <p>26. Merusak/menghilangkan harta benda milik sekolah, guru, karyawan dan teman</p> <p>27. Keluar tanpa melalui pintu depan</p> <p>28. Merusak tanaman hias dan pohon</p> <p>29. Melanggar norma susila</p> <p>30. Mencuri/mengambil barang milik orang lain</p> <p>31. Mencoret-coret dinding, tembok, meja, kursi dan pagar sekolah</p> <p>32. Bermesraan di lingkungan sekolah</p> <p>33. Izin keluar pekarangan sekolah dan tidak kembali lagi</p> <p>34. Tidak masuk dengan keterangan palsu</p> <p>35. Meninggalkan kelas tanpa keterangan dan tidak kembali lagi</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan tabel 4.4 tergambar bahwa jenis pelanggaran kategori ringan terdapat 9 item, pelanggaran dengan kategori sedang terdapat 17 item dan pelanggaran yang dikategorikan berat terdiri dari 35 item.

Adapun proses pemberian hukuman yang diberikan kepada peserta didik yang melanggar peraturan sekolah, adalah sebagai berikut:

1. Teguran dan peringatan secara lisan sebanyak tiga kali (3X)
2. Peringatan tertulis sebanyak 2 kali (2X) yang diketahui oleh wali kelas, guru BK, dan orang tua wali.
3. Peringatan tertulis ketiga kalinya dengan memanggil orang tua/wali ke sekolah
4. Skorsing (dinonaktifkan dari sekolah untuk sementara)
5. Dikembalikan kepada orang tua.¹⁰

Dengan memperhatikan proses hukuman yang berlaku di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang, penulis menyimpulkan bahwa kaidah pemberian hukuman yang berlaku dilaksanakan secara bertahap. Jika ada peserta didik yang melanggar peraturan, maka sanksi diawali dengan pemberian nasihat. Jika pelanggaran tersebut terulang lagi, maka dilakukan peringatan tertulis sampai ketiga kalinya. Apabila pelanggaran tersebut masih terulang juga, pihak sekolah melakukan skorsing. Jika tindakan skorsing tidak berhasil, sebagai langkah terakhir peserta didik yang melanggar peraturan dikembalikan kepada orang tuanya. Berikut ini penulis memaparkan proses pemberian hukuman berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan dan jenis hukuman berdasarkan kategori hukuman ringan hukuman sedang dan hukuman berat dalam bentuk tabel.

¹⁰Bimbingan Konseling SMA Negeri 1 Lembang, 2011.

Tabel 4.5
Klasifikasi Hukuman Berdasarkan Bentuk Hukuman

No	Jenis Hukuman	Kategori hukuman		
		Ringan	Sedang	Berat
1	Isyarat	Perubahan mimik wajah	Menampakkan wajah masam	Melototkan mata/memandang tajam
2	Perkataan	Nasihat	Teguran	Ancaman
3	Perbuatan	Tugas yang berkaitan dengan pelajaran		1. Membersihkan lingkungan sekolah. 2. Membersihkan We guru. 3. Jalan jongkok(pr) 4. Push up(lk) 5. Dicoret. 6. Ganti pakaian 7. Di sita. 8. Melakukan perbuatan dengan jumlah yang lebih banyak. 9. Dijemur. 10. Membersihkan WC. 11. Hukuman fisik.
4	Administrasi	Perjanjian lisan	Perjanjian tertulis di saksikan wali kelas	Perjanjian tertulis di saksikan guru BP dan orang tua Wali peserta didik

Peraturan yang ada di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang merupakan peraturan yang dibuat sendiri oleh peserta didik, yaitu perwakilan dari setiap kelas. Meskipun demikian, peraturan tersebut awalnya dirancang konsepnya oleh

pihak sekolah meliputi kepala sekolah, wakil kepala sekolah bagian kesiswaan dan perangkatnya, serta guru BK. Setiap tahun pelajaran (TP) baru, peraturan tersebut ditinjau untuk melihat keefektifannya pada tahun pelajaran yang lalu. Jika peraturan tersebut dianggap telah memenuhi atau mencakup semua aspek yang diperlukan dalam proses pendidikan, maka tahap selanjutnya adalah peraturan tersebut disahkan dalam rapat pleno OSIS. Rapat pleno OSIS dihadiri oleh semua elemen penting sekolah yaitu kepala sekolah, semua wakil kepala sekolah, semua guru, semua peserta didik yang diwakili oleh pengurus OSIS dan komite sekolah.

Peraturan dan sanksi yang telah disahkan di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang kemudian disosialisasikan kepada semua peserta didik dan orang tua peserta didik yang diwakili oleh komite sekolah. Hal ini penting untuk menyatukan persepsi antara pihak sekolah, peserta didik, dan komite sekolah tentang prosedural peraturan dan sanksi yang berlaku di sekolah. Selain itu, sosialisasi perlu dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman dengan orang tua peserta didik jika suatu saat salah satu di antara anak mereka ada yang mendapatkan sanksi karena telah melanggar peraturan sekolah.

Telah terjadi beberapa kejadian, orang tua peserta didik marah atau bahkan melaporkan guru ke pihak yang berwajib karena anaknya mendapatkan sanksi. Menurut penulis salah satu penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi pihak sekolah kepada orang tua peserta didik tentang peraturan yang dibuat.

Cara lain yang dilakukan pihak sekolah dalam mensosialisasikan peraturan dan sanksi yang berlaku adalah pada pelaksanaan upacara bendera setiap hari Senin. Pembina upacara dalam amanatnya selalu menyampaikan tentang perlunya mengikuti peraturan yang telah ditetapkan demi kelancaran proses pendidikan di sekolah.

Pada momen lain, guru dalam setiap proses pembelajaran selalu menyampaikan tentang perlunya sikap disiplin dan pelanggaran yang harus dijaui oleh semua peserta didik.

Selain cara di atas, cara lain yang dilakukan oleh guru dan perwakilan OSIS dalam mensosialisasikan peraturan sekolah yaitu pada masa orientasi siswa (MOS) dan pra MOS. Pada masa MOS yang berlangsung selama 3 hari serta pra MOS yang juga berlangsung selama 3 hari, digunakan guru terutama guru BK dan perwakilan OSIS untuk mensosialisasikan peraturan sekolah kepada peserta didik yang baru masuk sekolah. Selain itu, pada masa MOS peserta didik diberikan beberapa materi yang berkaitan dengan peraturan sekolah dan lingkungan sekolah, seperti materi wawasan widyata mandala, tata tertib, kedisiplinan, dan sebagainya. Pernyataan ini diperkuat oleh A. Nurhidaya, S.IP melalui hasil wawancara, menegaskan bahwa:

Pada masa kegiatan MOS, panitia MOS memberikan materi-materi yang berkaitan dengan tata tertib sekolah meliputi kerajinan, kerapian, kepribadian, ketertiban, keterlambatan dan pelanggaran terhadap kepala sekolah, guru dan karyawan.¹¹

Pada dasarnya peraturan yang berlaku di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang tidak menjelaskan secara rinci tentang penerapan hukuman fisik kepada peserta didik. Namun demikian berdasarkan hasil observasi, penulis menemukan ada guru yang menerapkan hukuman fisik kepada peserta didik. Ketika hal ini penulis konfirmasi kepada guru maka guru tersebut mengatakan bahwa:

Penerapan hukuman fisik kepada peserta didik masih diperlukan. Hal ini dikarenakan latar belakang peserta didik yang variatif. Ada yang hanya dengan nasehat atau teguran tidak melanggar peraturan. Namun tidak jarang pula ada yang nanti tidak melanggar peraturan jika diberikan hukuman fisik. Akan tetapi kami sebagai pendidik tetap dalam batas kewajaran ketika memberikan hukuman fisik. Artinya bahwa hukuman fisik yang kami terapkan tidak sampai

¹¹A. Nurhidaya, Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris, *Wawancara* oleh Penulis di SMA Negeri 1 Lembang tanggal 5 Desember 2012.

membuat cacat fisik peserta didik dan ketika kami memberikan hukuman fisik maka kami melakukannya dengan cara dan pada daerah tubuh yang aman seperti mencubit.¹²

Hasil wawancara di atas sejalan dengan pendapat Zuhairimi yang mengatakan bahwa hukuman merupakan alat pendidikan represif dan korektif.¹³ Model pendidikan yang diterapkan tersebut merupakan model pendidikan tradisional. Hal ini diperkuat pendapat Dewa Ketut Sukardi yang mengatakan bahwa:

1. Peserta didik tidak akan dapat menyesuaikan dirinya dan meningkatkan kegiatannya jika tidak disertai hukuman dan ancaman
2. Disiplin hanya dapat diterapkan dengan menggunakan pemukul¹⁴

Meskipun hukuman fisik tetap diterapkan tetapi guru perlu mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik dan dampak psikologis yang ditimbulkan dari penerapan hukuman. Guru perlu memahami bahwa hukuman fisik adalah alternatif terakhir yang dilakukan dengan tetap mengacu pada kaedah-kaedah penerapan hukuman.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, maka peneliti berkesimpulan bahwa sanksi yang diterapkan di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang telah memenuhi kaidah utama dari pemberian hukuman. Kaidah utama yang dimaksud adalah pemberian hukuman yang bersifat pedagogis. Artinya bahwa hukuman yang diberikan mampu menimbulkan efek jera dan menumbuhkan sikap bertanggung jawab untuk tidak mengulangi pelanggaran tersebut pada peserta didik. Selain itu, pemberian hukuman dilakukan secara bijaksana, dalam keadaan sadar,

¹²Muh. Kasim. M, Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris, *Wawancara* oleh Penulis di SMA Negeri 1 Lembang tanggal 20 Desember 2012.

¹³Zuhairimi, dkk, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 181.

¹⁴Dewa Ketut Sukardi, *Proses Bimbingan dan Konseling di Sekolah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 70.

dan dilakukan sebagai solusi terakhir jika cara lain sudah tidak dapat digunakan lagi dalam mengatasi perilaku peserta didik yang melanggar peraturan.

Keberadaan peraturan sekolah memegang peranan penting, yaitu sebagai alat untuk mengatur perilaku atau sikap peserta didik di sekolah. Dengan adanya peraturan, sekolah diharapkan mampu menjamin kehidupan yang tertib, tenang, sehingga kelangsungan hidup sekolah dapat tercapai.

Peraturan yang direalisasikan dengan tepat, jelas, dan konsekwen, serta diawasi dengan sungguh-sungguh, akan memberikan dampak terciptanya suasana masyarakat belajar yang tertib, damai, tenang, dan tentram di sekolah.

Sesungguhnya peraturan sekolah tidak hanya memuat hal-hal yang harus dilakukan peserta didik, tetapi juga tahapan-tahapan sanksi yang akan diterima jika peserta didik melanggarnya. Hal ini juga berlaku di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang. Rumusan peraturan memuat segala tingkah laku yang harus dilakukan, perilaku-perilaku yang harus dihindari oleh semua peserta didik dan sanksi yang akan diterima jika melanggar peraturan.

Peraturan sekolah dibuat sebagai wadah yang berfungsi mendidik dan membina perilaku peserta didik di sekolah. Dikatakan demikian karena peraturan sekolah berisikan hal-hal yang harus dilaksanakan oleh peserta didik. Selain itu peraturan sekolah juga berfungsi sebagai “pengendali” bagi perilaku peserta didik, karena peraturan sekolah berisi larangan terhadap peserta didik tentang suatu perbuatan dan juga mengandung sanksi bagi peserta didik yang melanggarnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mansyur, dikatakan bahwa:

Tata tertib yang berlaku di sekolah khususnya SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang sangat berperan dalam membangun kedisiplinan peserta didik. Melalui tata tertib tersebut, mereka (peserta didik) tahu apa yang mesti dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dengan demikian proses

pembelajaran dapat berjalan lancar. Walaupun kami dari pihak sekolah tidak dapat memungkiri bahwa meskipun peraturan telah ada tetapi masih ada saja peserta didik yang melanggar peraturan.¹⁵

Penerapan hukuman dilakukan jika tidak ada lagi jalan atau solusi terakhir yang ditempuh untuk memperbaiki tingkah laku peserta didik yang melanggar peraturan. Hukuman dilakukan karena terpaksa, sebab tidak mungkin lagi dipergunakan peringatan lisan untuk mengubah perilaku peserta didik yang menyimpang. Hukuman diberikan untuk membangun kesadaran dan keinsyafan peserta didik agar selalu bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, dengan hukuman diharapkan mampu menciptakan rasa tanggung jawab bagi peserta didik untuk mengakui kesalahannya serta berjanji tidak mengulangi pelanggaran sekolah.

M. Arifin mengemukakan bahwa hukuman merupakan metode pendidikan.¹⁶ Senada dengan M. Arifin, M. Ngali Purwanto mengisyaratkan bahwa hukuman sebagai alat pendidikan dilakukan dengan tujuan yang jelas, menimbulkan sikap jera dan tidak mengulangi kesalahannya.¹⁷ Dalam menggunakan hukuman sebagai alat pendidikan, pribadi orang yang menggunakannya sangat penting, sehingga penggunaan alat pendidikan itu bukan sekedar persoalan teknis belaka, tetapi menyangkut persoalan batin atau pribadi anak.

Peraturan sekolah merupakan salah satu bentuk aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan bukan hanya peserta didik, tetapi juga oleh guru. Peraturan sekolah sebagai suatu perwujudan kehidupan yang sadar akan hukum dan aturan. Tata tertib

¹⁵Mansur, Guru Mata Pelajaran Sejarah SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang, Wawancara oleh Penulis di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang tanggal 26 Desember 2013.

¹⁶H.M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam; *Tinjauan Teoretis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 217.

¹⁷M.Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 177.

sekolah adalah rambu-rambu kehidupan bagi peserta didik dan guru untuk melaksanakan kehidupan dalam masyarakat sekolah. Oleh karena itu, kekompakan guru dan peserta didik dalam menaati peraturan sangat diperlukan.

Berdasarkan observasi, penulis menilai bahwa para guru di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang juga senantiasa menaati peraturan yang berlaku di sekolah. Hal ini penting karena sosok guru merupakan sosok yang diteladani oleh peserta didik. Hal ini sesuai dengan pendapat E. Mulyasa bahwa

Keteladanan guru sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Keteladanan ini memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam pembentukan kepribadian anak.¹⁸

Pendapat di atas mengisyaratkan bahwa sudah menjadi hal yang urgen sebelum guru mengajarkan kepada peserta didik untuk menaati peraturan yang berlaku maka tentu guru itu sendiri yang terlebih dahulu menaati peraturan yang berlaku. Hal ini perlu karena guru sebagai sosok yang diteladani baik kata maupun sikap.

Kekompakan antara peserta didik dengan guru dalam menaati peraturan yang berlaku sangat diperlukan, jika tidak maka peraturan di sekolah hanya bersifat formalitas belaka di mata peserta didik. Di sekolah, peserta didik berpura-pura menjalankan aturan, tetapi di luar sekolah mereka memandang remeh atau menertawakan aturan sekolah tersebut. Peserta didik menjadi tidak hormat dengan aturan sekolah.

Anomali dan kontradiksi yang dialami oleh peserta didik, tidak jarang membuat mereka berpikir bahwa aturan hanyalah sebuah tontonan semata. Dengan kata lain, peserta didik tidak ada rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap aturan

¹⁸E.Mulyasa, *Manajemen Pendidikan Karakter* (Cet.II; Jakarta: Budi Aksara, 2012), h. 169.

sekolah tersebut. Rendahnya rasa memiliki terhadap aturan tersebut, dapat berujung pada penolakan secara langsung atau tidak langsung terhadap aturan itu sendiri.

Hal senada disampaikan oleh Alimuddin bahwa:

Para guru datang sebelum pukul 06.50 WITA. Sekolah telah membuat peraturan tentang kedisiplinan dan semua pihak baik peserta didik maupun guru harus mematuhi. Jika seorang guru menghukum peserta didik karena datang terlambat, tetapi ia sendiri sering datang terlambat maka akan menjadi cemoohan para peserta didik. Seorang guru harus menjadikan dirinya sebagai teladan yang baik.¹⁹

Ketaatan peserta didik terhadap peraturan yang diterapkan di sekolah bervariasi. Demikian juga bentuk hukuman yang diterapkan. Hukuman yang diterapkan disesuaikan dengan kategori pelanggaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru BP tentang penerapan hukuman di SMA Negeri 1 Lembang diperoleh informasi bahwa

Jenis pelanggaran yang terjadi di sekolah ini dibagi menjadi 3 yaitu pelanggaran berat, pelanggaran sedang dan pelanggaran ringan. Adapun yang termasuk dalam kategori pelanggaran berat yaitu malas ke sekolah, terlambat, berpakaian tidak seragam dan bolos. Untuk kategori pelanggaran sedang seperti rambut yang belum dirapikan, suka keluar kelas pada saat proses pembelajaran berlangsung dan tidak masuk belajar. Sedangkan yang termasuk kategori pelanggaran ringan adalah tidak mengerjakan tugas dan terlambat masuk belajar.²⁰

Ada beberapa bentuk pelanggaran yang penulis temukan selama melakukan penelitian sejak bulan November 2012 sampai bulan Januari 2013, diantaranya peserta didik terlambat masuk sekolah, bolos, keluar kelas saat pembelajaran sedang

¹⁹ Alimuddin, Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang, *Wawancara* oleh Penulis di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang tanggal 26 Desember 2012.

²⁰ Muhammad Rais, Guru BP SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang, *Wawancara* oleh Penulis di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang tanggal 17 Desember 2012.

berlangsung, dan tidak menjaga kerapian seragam sekolah. Untuk lebih jelasnya berikut penulis tampilkan tabel frekuensi pelanggaran yang terjadi selama penulis melakukan penelitian.

Tabel 4.6
Frekuensi Bentuk Pelanggaran Periode November 2012-Januari 2013

No	Bentuk Pelanggaran	Bentuk Hukuman	Frek. Huku man	Tanggapan Guru			
				S	TS	Netral	Jml
1	Terlambat tiba di sekolah	Membersihkan lingkungan sekolah	50 X	5	25	-	30
		Nasehat	2 X	25	5	-	30
		Peringatan	18 X	29	1	-	30
Frekuensi Pelanggaran			70 X	-	-	-	-
2	Tidak Mengerjakan Tugas	Dijemur di halaman sekolah	10 X	5	24	1	30
		Jalan jongkok	15 X	3	26	1	30
		Memberi tugas tambahan	15 X	26	3	1	30
Frekuensi Pelanggaran			40 X	-	-	-	-
3	Tidak Hadir di sekolah 3 hari berturut-turut tanpa keterangan	Diancam untuk dikembalikan ke orang tua	1 X	26	4	-	30
		Membersihkan lingkungan sekolah	7 X	28	2	-	30
		Membersihkan WC	2 X	10	10	10	30
Frekuensi Pelanggaran			10 X	-	-	-	-
4	Pakaian tidak sesuai dengan model yang ditetapkan oleh sekolah	Mengganti pakaian laki-laki dengan pakain perempuan atau sebaliknya	5 X	1	29	-	30
		Dicoret pakaiannya	50 X	20	10	-	30
		Disita pakaiannya	10 X	29	-	1	30
Frekuensi Pelanggaran			65 X	-	-	-	-

5	Ukuran rambut	Digunting sebagian Peringatan	2 X 1 X	25 5	- 25	5 -	30 30
Frekuensi Pelanggaran			3 X	-	-	-	-
6	Mengganggu saat belajar	Jalan jongkok untuk perempuan dan <i>push up</i> untuk laki-laki	2 X	-	27	3	30
		Ditegur	5 X	28	-	2	30
Frekuensi Pelanggaran			7 X	-	-	-	-
7	Ribut pada saat belajar	Berdiri di depan kelas	2 X	28	2	-	30
		Diberi tugas	2 X	28	2	-	30
Frekuensi Pelanggaran			4 X	-	-	-	-
8	Merusak alat sekolah	Mengganti alat sekolah	2 X	30	-	-	30
Frekuensi Pelanggaran			2 X	-	-	-	-
9	Merokok	Mengisap rokok dalam jumlah yang banyak tanpa istirahat	1 X	7	23	-	30
		Dijemur	1 X	23	7	-	30
Frekuensi Pelanggaran			2 X	-	-	-	-
10	Membawa Hp ke sekolah	Disita oleh guru	2 X	24	-	6	30
Frekuensi Pelanggaran			2 X	-	-	-	-
11	Berkelahi di luar lingkungan sekolah	Hukuman fisik dipukul oleh guru BP	1 X	3	25	2	30
		Dilapor kepada pihak yang berwajib		20	-	10	30
Frekuensi Pelanggaran			1 X	-	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas pendapat guru tentang bentuk pelanggaran yang dilakukan peserta didik yaitu terlambat tiba di sekolah dengan bentuk hukuman membersihkan lingkungan sekolah (setuju 5 orang dan tidak setuju 25 orang), pemberian nasehat (setuju 25 orang dan tidak setuju 5 orang) dan peringatan (setuju 29 orang dan tidak setuju 1 orang). Persepsi guru adalah sebaiknya tidak diberi hukuman membersihkan lingkungan sekolah karena tidak mengikuti proses

pembelajaran yang tentunya merugikan peserta didik, sebaiknya diberi nasehat dan peringatan saja.

Pendapat guru tentang pelanggaran yang dilakukan peserta didik yaitu tidak mengerjakan tugas dengan hukuman menjemur peserta didik di bawah terik matahari (setuju 5 orang, tidak setuju 24 orang), jalan jongkok (setuju 3 orang, tidak setuju 26 orang, dan netral 1 orang), diberikan tugas tambahan (setuju 26 orang, tidak setuju 3 orang dan netral 1 orang). Persepsi guru adalah hukuman bagi peserta didik yang tidak mengerjakan tugas yaitu dengan menjemur di bawah terik matahari adalah tidak sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Hukuman seperti ini dapat menyebabkan peserta didik sakit dan tidak dapat mengikuti proses pembelajaran. Hukuman yang tepat menurut pendapat guru adalah diberikan tugas tambahan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.

Pendapat guru tentang pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik yaitu tidak hadir di sekolah 3 hari berturut-turut tanpa keterangan adalah diancam untuk dikembalikan ke orang tua (setuju 26 orang dan tidak setuju 4 orang), membersihkan lingkungan sekolah (setuju 28 orang dan tidak setuju 2 orang), membersihkan WC (setuju 10 orang, tidak setuju 10 orang dan netral 10 orang). Persepsi guru adalah mengancam peserta didik bukan solusi terbaik, sebaiknya peserta didik membuat perjanjian disaksikan oleh wali peserta didik.

Pendapat guru tentang pelanggaran yang dilakukan peserta didik yaitu pakaian tidak sesuai dengan model sekolah adalah mengganti pakaian laki-laki dengan pakaian perempuan atau sebaliknya (setuju 1 orang dan tidak setuju 29 orang), dicoret pakaiannya (setuju 20 orang dan tidak setuju 10 orang), disita pakaian (setuju 29 orang dan netral 1 orang). Persepsi guru adalah pemberian

hukuman dengan cara mengganti pakaian laki-laki menjadi pakaian perempuan atau sebaliknya sangat tidak relevan dengan tujuan pemberian hukuman karena akan berdampak psikologis terhadap peserta didik.

Pendapat guru tentang pelanggaran yang dilakukan peserta didik yaitu ukuran rambut tidak sesuai aturan sekolah adalah digunting sebagian (setuju 25 orang dan netral 5 orang), diberikan peringatan (setuju 5 orang dan tidak setuju 25 orang). Persepsi guru adalah sebaiknya digunting dan dirapikan di sekolah, jangan memperlihatkan ke masyarakat karena merupakan hal yang tidak etis.

Berdasarkan hasil observasi, penulis menemukan fakta bahwa jenis pelanggaran yang sering terjadi di kalangan peserta didik adalah terlambat tiba di sekolah dan kurang menjaga kerapian seragam sekolah. Hal ini diperkuat hasil wawancara dengan guru BP yang mengungkapkan bahwa:

Pada dasarnya peserta didik yang ada di sekolah ini boleh dikatakan setiap hari semakin disiplin. Namun demikian kami tidak dapat memungkiri bahwa meskipun kami dari pihak sekolah telah menetapkan peraturan dan mensosialisasikannya kepada semua peserta didik tetapi tetap saja ada yang masih melanggar peraturan. Ada yang alpa, bolos, terlambat ke sekolah dan melanggar peraturan tentang kerapian seragam sekolah. Di antara jenis pelanggaran tersebut yang paling sering terjadi adalah mereka (peserta didik) kurang memperhatikan kerapian seragam sekolah. Kami dari pihak guru ketika melihat pelanggaran tersebut terjadi maka kami selalu mengacu kepada peraturan sanksi yang berlaku.²¹

²¹ST. Suleha, Guru BP SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang, *Wawancara* oleh Penulis di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang tanggal 27 Desember 2012.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru BP, dipahami bahwa peraturan yang berlaku di sekolah belum mampu menumbuhkan secara total kesadaran bagi semua peserta didik untuk menaati peraturan yang berlaku. Hal ini terjadi karena mengacu pada kondisi riil di lapangan yaitu sekolah harus mendidik dan mengasuh ratusan bahkan ribuan peserta didik dengan karakter dan kebiasaan yang berbeda-beda. Untuk itu, perlu adanya peran yang lebih dari guru untuk membuat seorang peserta didik tidak melakukan pelanggaran lebih lanjut. Peran tersebut dapat dilakukan dengan cara menjadi teladan atau contoh yang baik serta memberikan konseling bagi peserta didik. Melalui bimbingan konseling, seorang peserta didik dapat menyampaikan keluhan kesahnya dengan guru Pembina, sehingga guru Pembina dapat mengerti dan dapat menemukan jalan bagi masalah yang telah tersirat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa guru diketahui bahwa SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang pernah memiliki kasus hingga berujung kepada ranah hukum. Kasus ini diakibatkan salah seorang guru menghukum peserta didik dengan cara hukuman fisik. Kejadian ini tidak diterima oleh orang tua peserta didik sehingga melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

Belajar dari kejadian tersebut, penulis menilai bahwa kadang reaksi guru terhadap pelanggaran yang berulang kali dilakukan peserta didik, yaitu dengan memberikan hukuman fisik, kurang dipahami dengan baik atau diterima orang tua peserta didik juga masyarakat luas. Kemarahan seorang guru selalu diterjemahkan sebagai bentuk arogansi jabatan, padahal guru yang merupakan manusia biasa tentu saja mempunyai potensi untuk khilaf dan marah tatkala menghadapi peserta didik yang sering melanggar peraturan.

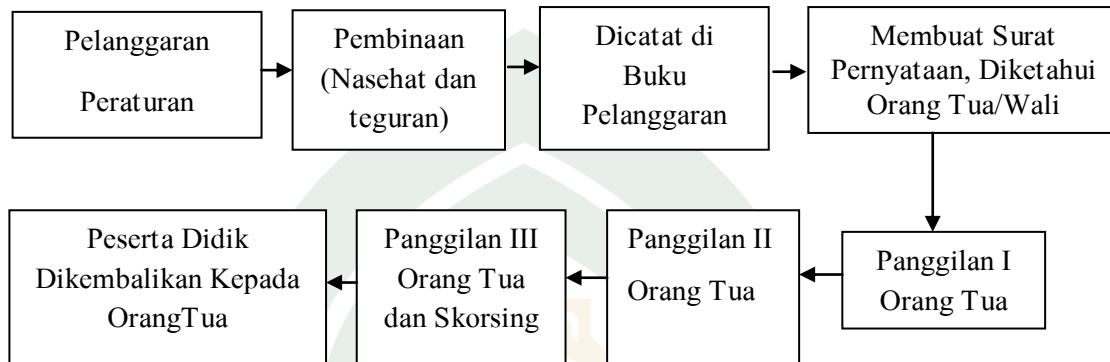
Untuk pelanggaran kategori ringan dan sedang pihak sekolah masih dapat mentolerir dengan pemberian sanksi teguran, baik lisan maupun tulisan. Namun untuk kategori berat seperti perbuatan amoral, tindak kriminal, melawan guru, menonton video mesum, tawuran, dan sebagainya tentu tidak cukup sebatas teguran. Perlu adanya hukuman extra dengan maksud memberi efek jera pada si anak. Di antaranya dapat berbentuk hukuman fisik tentunya tetap dalam koridor kewajaran, seperti tidak menimbulkan cacat fisik atau meninggalkan luka psikis pada anak.

Menurut penulis, pada umumnya pemberian hukuman kepada peserta didik di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang telah melalui prosedur yang dirumuskan pihak sekolah. Guru mata pelajaran mempunyai hak untuk menangani sendiri jika ada peserta didiknya yang melanggar peraturan sebelum melimpahkannya kepada wali kelas, guru agama, guru BP, wakil kepala sekolah urusan kesiswaan dan akhirnya kepada kepala sekolah.

Jika terdapat peserta didik tidak masuk sekolah lebih dari tiga hari tanpa ada pemberitahuan atau izin dari orang tua/wali surat sakit dari dokter, maka wali kelas berkewajiban mengunjunginya atau melakukan *home visit*. Kunjungan tersebut bermaksud mencari penyebab mengapa peserta didik tersebut tidak masuk sekolah kepada orang tua/wali. Cara seperti ini merupakan pendekatan positif yang dilakukan guru untuk mengetahui penyebab pasti peserta didik tidak ke sekolah.

Setiap guru mempunyai hak dalam menangani pelanggaran peraturan sekolah yang dilakukan oleh peserta didik, dengan syarat harus berpatokan pada prosedur penanganan yang telah dirumuskan sekolah. Prosedur yang ditetapkan oleh sekolah tentunya berlandaskan pada nilai-nilai pedagogis. Berikut penulis paparkan alur

penanganan pelanggaran peraturan yang berlaku di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang pada gambar struktur berikut ini:



Sumber: BK SMA Negeri I Lembang Kabupaten Pinrang

Berdasarkan alur penanganan pelanggaran peraturan di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang diketahui bahwa pembinaan berupa pemberian nasihat dan teguran secara lisan sampai 3 kali merupakan langkah awal yang dilakukan pihak sekolah bagi peserta didik yang melanggar peraturan. Jika pelanggaran tersebut terjadi lagi maka peserta didik yang melanggar peraturan wajib membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar. Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh orang tua/wali.

Jika pelanggaran tersebut masih terjadi maka pihak sekolah memanggil orang tua/wali peserta didik sampai 3 kali. Adapun bentuk hukuman terberat di sekolah ini adalah mengembalikan peserta didik kepada orang tua/wali bagi peserta didik yang melakukan pelanggaran berat seperti hamil sebelum menikah, penyalahgunaan narkoba, melakukan pelecehan seksual atau pelanggaran berat lainnya.

Memperhatikan alur penanganan pelanggaran peraturan di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang serta wawancara dan observasi yang dilakukan, menunjukkan adanya keseimbangan antara penerapan hukuman dengan kaidah penerapan hukuman dalam pendidikan. Hal ini menandakan bahwa penerapan

hukuman di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang menggunakan tahapan-tahapan positif serta tidak melanggar aturan hukum.

C. Persepsi Guru tentang Kesesuaian Kategori Pelanggaran dengan Jenis Hukuman Yang Diberikan Kepada Peserta Didik di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang

1. Gambaran Persepsi Guru Tentang Pemberian Hukuman di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang

Setiap orang memiliki persepsi atau pandangan terhadap suatu objek. Persepsi atau pandangan tersebut tidak menutup kemungkinan mengalami perbedaan. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan pengalaman dan penafsiran terhadap suatu objek. Seperti yang dikemukakan oleh Jalaluddin Rahmat bahwa persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan kemudian menafsirkan.²² Adanya perbedaan panca indera dalam menerima pengalaman serta penafsiran yang berbeda tentang suatu objek sehingga membuka peluang terjadinya perbedaan persepsi.

Guru di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang berbeda persepsi tentang kesesuaian hukuman dengan jenis pelanggaran yang dilakukan peserta didik. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, penulis menemukan fakta bahwa guru di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang berbeda persepsi tentang kesesuaian hukuman dengan jenis pelanggaran yang dilakukan peserta didik.

²²Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi* (Cet. XXII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 51.

Jenis pelanggaran yang ada berdasarkan kategori pelanggaran ada 3 yaitu kategori ringan, kategori sedang dan kategori berat. Berikut ini penulis memaparkan klasifikasi pelanggaran berdasarkan kategori pelanggaran dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 4.7
Klasifikasi Pelanggaran Berdasarkan Kategori

No	Kategori Pelanggaran	Jenis Pelanggaran	Jumlah Guru yang Menganggap Kategori Pelanggaran		
			Ringan	Sedang	Berat
1	Ringan	1. Memarkir kendaraan secara sembarangan	10	25	-
		2. Menerima tamu tanpa melapor ke tugas piket	15	20	-
		3. Tidak memasukkan baju seragam	16	19	-
		4. Seragam tidak sesuai dengan ketentuan (model)	10	25	-
		5. Tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler/tanpa keterangan)		35	-
		6. Tidak mengikuti upacara bendera hari Senin dan hari besar nasional (Tanpa keterangan)	15	15	-
		7. Tidak mengikuti kegiatan hari besar agama di sekolah	35	-	-
		8. Siswa tidak masuk karena sakit dengan tanpa keterangan (alpa)	35	-	-
		9. Terlambat masuk sekolah	-	25	15
2	Sedang	1. Seragam tidak lengkap	-	35	-
		2. Terlambat masuk karena izin keluar (pada saat proses belajar)	-	35	-
		3. Tidak bersepatu hitam	13	22	-

		4. Baju ketat, rok di atas mata kaki	5	30	-
		5. Seragam sobek dan ada coretan	13	22	-
		6. Menggunakan topi selain topi OSIS di lingkungan sekolah	5	30	-
		7. Mengubah pakaian seragam (Baju, Celana, Rok dan Jilbab)			
		8. Memakai sandal, sepatu sandal ke sekolah	-	35	-
		9. Siswa berhias berlebihan	-	35	-
		10. Siswa memakai perhiasan (aksesoris)	5	30	-
		11. Siswa berambut panjang	-	35	-
		12. Mencat rambut, kuku tangan dan kaki	-	35	-
		13. Bertato	-	30	5
		14. Meludah tidak pada tempatnya	5	30	-
		15. Membuang sampah sembarangan	10	25	-
		16. Menulis atau mencoret buku paket sekolah	5	30	-
		17. Membawa alat judi	-	20	15
3	Berat	1. Melawan Kepala Sekolah, Guru dan Karyawan dengan ucapan/tulisan dengan kata-kata kasar	-	-	35
		2. Melawan Kepala Sekolah, disertai ancaman	-	-	25
		3. Melawan kepala sekolah, guru dan karyawan disertai pemukulan	-	-	35
		4. Mengganggu kelas yang sementara belajar	-	15	20
		5. Ditemukan di luar sekolah pada saat jam pelajaran	-	-	35

	berlangsung			
	6. Naik kendaraan di lingkungan sekolah dengan ugal-ugalan	-	-	35
	7. Terlibat perjudian/taruhan	-	-	35
	8. Membawa rokok sendiri / titipan	-	-	35
	9. Menghisap rokok di lingkungan sekolah	-	-	35
	10. Memperjualbelikan rokok	-	-	35
	11. Membawa buku / majalah/ kaset / VCD porno, membawa sendiri atau titipan	-	-	35
	12. Menjualbelikan/menyewakan buku, majalah/kaset VCD porno	-	-	35
	13. Mengajak,membawa/memper jualbelikan/menyewakan barang-barang tersebut	-	-	35
	14. Membawa senjata tajam dan senjata api			
	15. Menggunakan senjata tajam dan senjata api	-	-	35
	16. Menyuruh membawa / mempergunakan senjata tajam dan senjata api	-	-	35
	17. Membawa/mempergunakan narkotika dan zat adiktif lainnya	-	-	35
	18. Memperjualbelikan narkotika dan zat adiktif lainnya	-	-	35
	19. Mengajak untuk membawa / memperjualbelikan narkotika dan zat adiktif lainnya	-	-	35
	20. Membawa HP	-	20	25
	21. Menghasut dan mengkoordinir hingga menimbulkan perkelahian	-	-	35

	22. Perkelahian di lingkungan sekolah	-	-	35
	23. Perkelahian di luar lingkungan sekolah	-	-	35
	24. Terlibat dalam tawuran pelajar	-	-	35
	25. Mengambil dengan paksa (merampas)	-	-	35
	26. Merusak/menghilangkan harta benda milik sekolah, guru, karyawan dan teman	-	-	35
	27. Keluar tanpa melalui pintu depan	-	25	20
	28. Merusak tanaman hias dan pohon	-	20	25
	29. Melanggar norma susila	-	-	35
	30. Mencuri/mengambil barang milik orang lain	-	-	35
	31. Mencoret-coret dinding, tembok, meja, kursi dan pagar sekolah	-	14	21
	32. Bermesraan di lingkungan sekolah	-	-	35
	33. Izin keluar pekarangan sekolah dan tidak kembali lagi	-	20	25
	34. Tidak masuk dengan keterangan palsu	-	5	30
	35. Meninggalkan kelas tanpa keterangan dan tidak kembali lagi	-	5	30

Berdasarkan tabel 4.8 tergambar bahwa dari kategori pelanggaran ringan terdapat perbedaan persepsi diantara guru yang ada di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang. Pada poin pertama dari 35 guru 10 menganggap pelanggaran ringan dan 25 guru menganggap pelanggaran sedang. Poin kedua 15 guru menganggap pelanggaran ringan dan 20 guru menganggap pelanggaran sedang. Poin

ketiga 16 guru menganggap pelanggaran ringan dan 19 guru menganggap pelanggaran sedang. Poin keempat 10 guru menganggap pelanggaran ringan dan 25 guru menganggap pelanggaran sedang. Poin kelima semua guru menganggap pelanggaran sedang. Poin keenam 15 guru menganggap pelanggaran ringan dan 20 guru menganggap pelanggaran sedang. Poin ketujuh dan kedelapan semua guru menganggap pelanggaran ringan. Poin kesembilan 25 guru menganggap pelanggaran sedang dan 15 guru menganggap pelanggaran berat. Untuk kategori pelanggaran sedang dan berat terdapat perbedaan jumlah guru yang menganggap pelanggaran sedang, berat dan ringan.

Ada juga yang berpendapat bahwa pelanggaran bukan hanya didasarkan pada jenis dan kategori pelanggaran tetapi juga berdasarkan intensitas peserta didik melakukan pelanggaran tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang guru BP mengatakan bahwa:

Pada dasarnya pelanggaran yang dilakukan peserta didik tidak berdasarkan kategori berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik tetapi meskipun pelanggaran itu termasuk kategori pelanggaran ringan tetapi jika dilakukan berulang kali oleh peserta didik yang sama maka itu dianggap pelanggaran berat. Misalnya peserta didik tiba terlambat di sekolah. Sebenarnya pelanggaran tersebut termasuk kategori ringan, dan ketika diberi hukuman dengan kategori hukuman ringan tetapi tetap melakukan pelanggaran yang sama maka kategori pelanggaran dan pemberian hukuman tidak lagi dikategorikan pelanggaran ringan.²³

Pengalaman serta penafsiran yang berbeda pada setiap orang melahirkan persepsi atau pandangan yang berbeda pula tentang suatu objek. Seperti yang dikemukakan oleh Jalaluddin rahmat bahwa persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan

²³ Muhammad Rais, Guru BP SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang, *Wawancara* oleh Penulis di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang tanggal 17 Desember 2012.

kemudian menafsirkan²⁴. Adanya perbedaan panca indera dalam menerima pengalaman serta penafsiran yang berbeda tentang suatu objek sehingga membuka peluang terjadinya perbedaan persepsi.

2. Faktor yang Memengaruhi Perbedaan Persepsi Guru Tentang Proses Pemberian Hukuman di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang

Terjadinya perbedaan persepsi di antara guru di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang tentang proses pemberian hukuman yang diterapkan di sekolah karena dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya faktor internal yaitu fisiologis. Fisiologis merupakan informasi atau pengalaman yang diperoleh guru melalui alat indera. Pengalaman tersebut dialami guru secara langsung pada saat guru menjalani proses pembelajaran di sekolah dan guru dalam lingkungan keluarga.

a. Pengalaman yang diperoleh guru ketika masih mengenyam pendidikan mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai bangku perkuliahan memengaruhi persepsi mereka tentang pemberian hukuman. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa guru diketahui bahwa guru yang ketika masih mengenyam pendidikan tidak pernah mendapatkan hukuman, maka guru yang bersangkutan memiliki persepsi bahwa proses pemberian hukuman di lingkungan sekolah sebaiknya dihindari. Jika hukuman terpaksa harus dilakukan, maka guru yang bersangkutan berusaha tidak memberikan hukuman fisik tetapi memberikan hukuman seperti memberikan tugas tambahan atau membersihkan halaman.

²⁴Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi* (Cet. XXII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 51.

Hal ini diperkuat hasil wawancara dengan Dra. Muliati Tutu, mengatakan bahwa:

Ketika masih sekolah, saya tidak pernah mendapatkan hukuman dari guru. Yang ada saya hanya melihat teman yang dihukum karena terlambat ke sekolah atau tidak mengerjakan tugas/PR. Hukuman yang diberikan guru seperti membersihkan halaman sekolah atau mengerjakan tugasnya/PR di sekolah. Oleh karena itu, ketika saya menjadi guru hal yang sama pun saya lakukan. Saya selalu berusaha untuk tidak menghukum peserta didik. Kalau pun hukuman itu harus dilakukan maka saya selalu berusaha untuk tidak memberikan hukuman fisik tetapi memberikan hukuman seperti membersihkan halaman sekolah atau menambah tugas/PR.²⁵

b. Latar belakang keadaan lingkungan keluarga.

Selain latar belakang pendidikan, perbedaan persepsi di antara guru tentang pemberian hukuman di sekolah juga dikarenakan latar belakang keadaan keluarga. Guru yang ada di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang berasal dari keluarga yang berbeda. Ada yang berasal dari keluarga guru, keluarga petani dan keluarga nelayan.

Latar belakang keluarga yang berbeda tentu memberikan pengalaman yang berbeda pula dalam pendidikan keluarga. Jika dalam keluarga sering mendapatkan hukuman maka akan memberikan pengaruh terhadap pandangan mengenai hukuman, begitu pun sebaliknya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan A. Nurhidayah yang mengatakan:

Saya berasal dari keluarga petani. Bapak saya sehari-hari menghabiskan waktunya di kebun. Sedangkan ibu saya selain sebagai ibu rumah tangga juga kadang membantu bapak di kebun. Pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua dalam mendidik kami adalah pola pendidikan demokrasi. Walaupun orang tua kami tidak mengenyam pendidikan tinggi tetapi cara mendidik mereka jauh dari konsep kekerasan. Kalaupun di antara kami (anak-anaknya) ada yang berbuat salah maka orang tua kami tidak langsung menghukum apalagi dengan memberikan hukuman fisik. Teguran dan nasihat selalu menjadi langkah awal bagi kedua orang tua kami jika ada tingkah laku kami yang salah. Oleh karena itu setelah saya menjadi guru, maka hal yang sama pun saya lakukan. Saya selalu berusaha untuk tidak menghukum peserta didik apalagi dengan hukuman

²⁵Muliati Tutu, Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang, *Wawancara* oleh Penulis di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang tanggal 1 Desember 2012.

fisik. Bagi saya, melalui pendekatan teguran dan nasihat dapat membantu peserta didik dalam memperbaiki tingkah lakunya yang melanggar peraturan sekolah. Kalaupun saya harus memberikan hukuman apalagi hukuman fisik maka itu karena tidak ada lagi solusi lain yang dapat dilakukan.²⁶

Adapun faktor lain yang memengaruhi persepsi guru tentang pemberian hukuman di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang adalah faktor eksternal yaitu keunikan dan kontrasan stimulus. Stimulus luar yang penampilannya di luar sangkaan guru akan menarik perhatian guru termasuk adanya pemberian hukuman kepada peserta didik yang sampai kepada ranah hukum. Pemberian hukuman yang sampai ke ranah hukum sama sekali hal yang tak terduga oleh guru di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang.

Pemberian hukuman terhadap peserta didik di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang pernah diproses sampai ke ranah hukum oleh orang tua peserta didik. Hal itu terjadi karena ada seorang guru memukul seorang peserta didik. Pemukulan itu dilakukan karena peserta didik tersebut hampir setiap hari melanggar peraturan sekolah, sehingga guru berkesimpulan bahwa hukuman fisik mampu menjadi upaya solutif terakhir untuk merubah tingkah laku anak tersebut.

Namun demikian kenyataan yang terjadi bukanlah seperti yang diharapkan. Orang tua peserta didik tidak setuju anaknya dihukum, sehingga melaporkan guru yang telah memukul anaknya kepada pihak yang berwajib. Setelah kedua belah pihak bertemu, pada akhirnya persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan jalan damai, dengan syarat guru yang menghukum harus memberikan sejumlah uang kepada orang tua peserta didik.

²⁶A. Nurhidaya, Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris, *Wawancara* oleh Penulis di SMA Negeri 1 Lembang tanggal 5 Desember 2012.

Dampak dari kejadian tersebut adalah guru semakin waspada sebelum memberikan hukuman kepada peserta didik terutama hukuman fisik. Kejadian ini kemudian menimbulkan persepsi atau tanggapan yang beragam dari guru tentang penerapan hukuman di sekolah.

Larangan pemberian hukuman fisik kepada peserta didik memang sudah diberlakukan pemerintah lewat Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2003 bab 54 yang menyatakan bahwa "Guru dan siapapun lainnya di sekolah dilarang memberikan hukuman fisik kepada anak-anak." Namun jika mengacu pada kondisi riil di lapangan, pihak sekolah harus mendidik ratusan bahkan ribuan peserta didik dengan watak dan karakter yang berbeda-beda, maka realisasi dari Undang-Undang tersebut bukanlah pekerjaan gampang.

Faktor eksternal yang lain adalah warna dari obyek-obyek. Obyek yang beragam akan memberikan kesan yang berbeda dibandingkan dengan obyek yang sedikit termasuk jumlah peserta didik. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan jumlah peserta didik yang ada di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang mencapai 1000 orang peserta didik. Hal ini sangat berpengaruh terhadap persepsi guru tentang proses penerapan alat pendidikan termasuk pemberian hukuman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru yang ada di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang peneliti berkesimpulan bahwa pada dasarnya pemberian hukuman di sekolah masih diperlukan. Hal ini dikarenakan sekolah menghadapi bermacam-macam karakter dari semua peserta didik. Ada yang dengan kesadaran mereka sendiri mau mematuhi peraturan sekolah, tetapi ada juga yang mematuhi peraturan sekolah jika mendapatkan hukuman. Seperti halnya di SMA

Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang, para guru menyadari bahwa pemberian hukuman di sekolah perlu untuk menjaga kedisiplinan peserta didik. Pernyataan ini diperkuat hasil wawancara dengan salah seorang guru, mengatakan bahwa:

Proses pemberian hukuman di lingkungan sekolah masih dibutuhkan terutama di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang yang memiliki jumlah peserta didik mencapai 1000 orang untuk mengarahkan peserta didik menaati peraturan di sekolah ketegasan dari pihak sekolah.²⁷

Ditambahkan oleh Muh. Kasim. M, bahwa

Jumlah peserta didik yang mencapai 1000 orang menyulitkan guru untuk mengontrol pelaksanaan peraturan sekolah. Oleh karena itu saya merasa pemberian hukuman masih dibutuhkan sebagai alat bantu untuk mengontrol perilaku peserta didik.²⁸

Berdasarkan kedua hasil wawancara tersebut dipahami bahwa jumlah peserta didik yang mencapai 1000 orang di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang membutuhkan alat bantu dalam mengontrol perilaku peserta didik untuk mematuhi peraturan sekolah salah satunya dengan pemberian hukuman. Seperti yang dikemukakan oleh Dewa Ketut Sukardi bahwa peserta didik tidak akan dapat menyesuaikan dirinya dan meningkatkan kegiatannya jika tidak disertai hukuman atau ancaman.²⁹

Pemberian hukuman (*punishment*) tidak dapat dan tidak boleh dilakukan sewenang-wenang menurut kehendak seseorang. Menghukum adalah perbuatan yang tidak bebas, selalu mendapat pengawasan dari negara dan masyarakat.

²⁷Sukmawati, Guru Mata Pelajaran Matematika, *Wawancara* oleh penulis di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang tanggal 29 November 2012.

²⁸Muh. Kasim, Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris, *Wawancara* oleh Penulis di SMA Negeri 1 Lembang tanggal 20 Desember 2012.

²⁹Dewa Ketut Sukardi, *Proses Bimbingan dan Konseling di Sekolah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 70.

Dalam sebuah lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal, hukuman yang diterapkan tentunya hukuman yang bersifat mendidik atau pedagogis. Hukuman yang bersifat pendidikan (pedagogis) harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Sebuah hukuman dikatakan bernilai pedagogis atau pendidikan jika hukuman tersebut mampu memberikan motivasi kepada peserta didik agar tidak melakukan pelanggaran lagi serta menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggungjawab untuk melakukan perbuatan yang baik.

Hukuman sebagai salah satu teknik pengelolaan kelas sebenarnya masih terus menjadi bahan perdebatan. Namun apa pun alasannya, hukuman sebenarnya tetap diperlukan dalam keadaan sangat terpaksa, atau sebagai solusi terakhir.

Hukuman merupakan alat pendidikan represif, yaitu bertujuan untuk menekan peserta didik sehingga mereka tidak leluasa melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah. Hukuman disebut juga alat pendidikan korektif, yaitu bertujuan untuk menyadarkan anak kembali kepada hal-hal yang benar dan/atau yang tertib. Oleh karena itu, penerapan hukuman harus berlandaskan nilai-nilai pedagogis, apalagi hukuman dilakukan dalam lingkungan pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa guru di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang diketahui bahwa hukuman yang dilakukan guru haruslah hukuman yang bersifat mendidik. Guru melakukan hukuman bukan karena ingin menyakiti peserta didik atau ingin membalas dendam. Namun hukuman dilakukan demi tujuan mulia yaitu membentuk pribadi peserta didik yang patuh serta taat dalam mematuhi peraturan sekolah.

Berikut penulis uraikan mengenai persepsi guru di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang tentang ciri-ciri hukuman yang bersifat edukatif, yaitu sebagai berikut:

1. Hukuman mempunyai tujuan

Secara umum pemberian hukuman di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran serta menimbulkan sikap kesadaran dan tanggung jawab peserta didik untuk senantiasa mematuhi peraturan sekolah. Dikemukakan oleh La Muing Made Ali bahwa:

Pelanggaran yang dilakukan peserta didik seperti memiliki rambut yang panjang maka hukumannya adalah rambutnya sebagian dipotong di sekolah dan selebihnya diselesaikan di rumah. Tujuan hukuman ini adalah sebagai bentuk implementasi tanggung jawab dan kepatuhan peserta didik terhadap peraturan yang ada.³⁰

Hukuman diberikan sebagai solusi terakhir terhadap pelanggaran yang dilakukan peserta didik. Hukuman diberikan bukanlah untuk menyakiti peserta didik, balas dendam atau untuk melampiaskan kemarahan. Sesungguhnya hukuman bukanlah hal yang menakutkan atau merugikan peserta didik, tetapi lebih kepada menolong peserta didik untuk menyadari kesalahannya dan memperbaikinya. Senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Irawati Istadi yang mengatakan bahwa tujuan utama dari pemberian hukuman adalah menginginkan adanya penyadaran agar peserta didik tidak lagi melakukan kesalahan.³¹ Hal yang sama dikatakan oleh Syaiful Bahri Djamarah bahwa diterapkannya hukuman dalam proses pendidikan pada dua hal, yaitu:

³⁰La Muing Made Ali, Guru Ekonomi, *Wawancara* oleh Penulis di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang tanggal 4 Desember 2012.

³¹Irawati Istadi, *Agar Hadiah dan Hukuman Efektif* (Jakarta, 2005), h.81.

- a. Hukuman diadakan dengan maksud agar tidak atau jangan terjadi pelanggaran. Sifatnya untuk mencegah jangan sampai terjadi pelanggaran.
- b. Hukuman dilakukan karena adanya pelanggaran yang telah diperbuat.³²

Dengan adanya hukuman, diharapkan peserta didik menjadi insyaf dan menyesali perbuatan-perbuatannya yang salah, serta dengan keinsyafan tersebut dia berjanji dalam hatinya untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.

2. Hukuman diberikan sesegera mungkin dan sifatnya konsisten

Pelanggaran yang dilakukan peserta didik sebaiknya segera ditangani. Jika hukuman tidak segera diberikan saat pelanggaran terjadi maka akan membawa dampak/hasil yang kurang memuaskan. Seperti halnya di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang, jika terbukti ada peserta didik yang melanggar peraturan maka pada saat itu pula diproses. Hal ini dilakukan dengan maksud agar peserta didik memahami penyebab dia dihukum dan apa arti hukuman tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis, bagi peserta didik yang tidak mengerjakan tugas atau PR maka guru menghukumnya dengan cara berdiri di depan kelas atau memberikan tugas tambahan. Peserta didik akan segera menerima konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukannya. Pernyataan ini didukung hasil wawancara dengan Mansyur S. Pd, mengatakan bahwa:

Jika terbukti ada peserta didik yang melanggar peraturan sekolah maka pihak sekolah akan segera memprosesnya. Hal ini kami lakukan (pihak sekolah) lakukan dengan maksud agar peserta didik segera menyadari perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.³³

Ada beberapa fungsi pemberian hukuman, salah satunya menurut Henry A. Paul adalah melindungi pelakunya agar tidak melanjutkan pola tingkah laku yang

³²Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 203.

³³Mansur, Guru Mata Pelajaran Sejarah SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang, *Wawancara* oleh Penulis di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang tanggal 26 Desember 2012.

menyimpang buruk dan tercela.³⁴ Oleh karena itu pemberian hukuman bagi peserta didik yang melakukan pelanggaran perlu segera dilakukan dengan maksud mencegah terjadinya pelanggaran yang berulang dari peserta didik.

Kelanjutan pemberian hukuman akan tetap dilakukan jika masih ada peserta didik lain melanggar peraturan sekolah yang sama. Hukuman yang diberikan kepada peserta didik harus bersifat konsisten untuk suatu perilaku tertentu. Hal ini menunjukkan pemberian hukuman di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang mampu mengubah perilaku peserta didik menjadi lebih disiplin dan selalu mematuhi peraturan sekolah.

3. Hukuman didahului dengan pemberian teguran dan nasihat

Pelanggaran yang dilakukan peserta didik di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang tidak langsung mendapatkan hukuman. Akan tetapi, sebelum hukuman diberikan kepada peserta didik yang melanggar peraturan, guru memberikan teguran, peringatan atau nasihat.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, pelanggaran apapun yang dilakukan oleh peserta didik selalu didahului dengan pemberian teguran dan nasihat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Alimuddin menyatakan bahwa:

Setiap guru yang menemukan atau melihat ada peserta didik yang melanggar peraturan sekolah berkewajiban untuk menegur atau memberikan nasihat. Pelanggaran apapun yang dilakukan peserta didik pasti penanganan pertamanya adalah memberikan teguran dan nasihat. Namun jika pelanggaran tersebut terulang lagi maka sanksi lain akan diterapkan.³⁵

³⁴Henry A.Paul, *Konseling dan Psikoterapi Anak; Panduan Lengkap Memahami Karakter, Perasaan dan Emosi Anak* (Yogyakarta: Idea Publishing, 2008), h.158.

³⁵Alimuddin, Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang, *Wawancara* oleh Penulis di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang tanggal 26 Desember 2012.

Hasil wawancara tersebut diperkuat dengan pernyataan dari salah seorang peserta didik bahwa:

Sebagian besar pelanggaran yang dilakukan oleh teman-teman kami (peserta didik laki-laki) adalah berpakaian kurang rapi, sering keluar masuk pada saat proses pembelajaran berlangsung dan terlambat masuk sekolah pada pagi hari. Jika ada guru yang melihatnya maka pasti teman kami tersebut ditegur dan dinasihati oleh guru.³⁶

4. Pemberian hukuman dalam jalinan cinta kasih dan sayang.

Seorang pendidik yaitu guru seharusnya selalu menyadari bahwa hukuman yang diberikan kepada peserta didik, bukan karena ingin menyakiti hatinya, bukan karena ingin melampiaskan rasa dendam dan sebagainya. Seperti yang dikemukakan oleh Armei Arief bahwa pemberian hukuman harus tetap dalam jalinan cinta, dan kasih sayang.³⁷ Guru menghukum peserta didik demi kebaikan, kepentingan anak, dan masa depannya. Oleh karena itu, ketika guru memberikan hukuman harus dalam keadaan sadar dan tenang, bukan dalam kondisi marah. Jika guru memberikan hukuman dalam keadaan marah maka kemungkinan besar hukuman yang diberikan tidak adil atau terlalu berat.

5. Hukuman harus diikuti dengan penjelasan

Terkadang sesuatu yang dilakukan guru kurang dipahami dengan baik oleh peserta didik, termasuk pemberian hukuman. Untuk itu hukuman yang diberikan harus disertai dengan penjelasan agar dapat dimengerti dan dipahami oleh peserta didik. Hukuman yang disertai penjelasan tidak membuat peserta didik sakit hati,

³⁶Novita Sari. A, Peserta Didik SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang, *Wawancara* oleh Penulis di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang tanggal 5 Desember 2012.

³⁷Armei Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h.133

dendam, minder atau lebih pandai menyembunyikan kesalahan yang dibuat tetapi justru akan menjadi motivasi untuk mengubah perilaku yang salah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Natsir AD mengatakan bahwa

Kami menyadari bahwa tidak selamanya efek dari hukuman yang diberikan berakibat positif, dengan kata lain dapat diterima dengan baik oleh peserta didik. Oleh karena itu sebagai langkah preventif terjadinya kesalahpahaman, maka setiap guru yang memberikan hukuman selalu disertai dengan penjelasan. Melalui penjelasan tersebut diharapkan peserta didik akan menerima hukuman tersebut serta memahami bahwa hukuman itu akibat yang sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan.³⁸

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari di depan kelas, guru mempunyai cara sendiri-sendiri dalam usahanya mendidik dan mengajar peserta didik. Hukuman sebagai salah satu alat pendidikan juga diberikan dalam bentuk berbeda-beda. Ada guru yang menghukum peserta didik dengan cara menyuruh berdiri di depan kelas. Ada pula guru yang menghukum dengan cara memarahi peserta didik, tetapi ada juga yang hanya mendiamkannya saja. Namun demikian hukuman harus tetap diberikan kepada peserta didik yang tidak mematuhi tata tertib sekolah. Untuk itu guru harus mengetahui jenis-jenis hukuman yang layak diterapkan dalam pendidikan.

Hukuman haruslah dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang melanggar batasan-batasan yang ditetapkan. Hukuman tidak harus selalu menyakitkan, dan jangan dijadikan sebagai luapan kemarahan atau penyaluran emosi. Jika guru harus memberikan hukuman, maka hukumlah sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik tentang hukuman tersebut dan seadil-adilnya. Hukuman yang terlalu berat akan menimbulkan rasa dendam, dan dendamnya tidak terbalaskan akan terjadi pengalihan dalam bentuk kekerasan terhadap orang lain

³⁸Muh. Natsir AD, Guru BK SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang, *Wawancara* oleh Penulis di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang tanggal 6 Desember 2012.

Pada dasarnya para guru di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang memiliki persepsi yang sama tentang perlunya hukuman dalam dunia pendidikan. Namun demikian di antara mereka terjadi perbedaan persepsi tentang jenis-jenis hukuman yang diterapkan kepada peserta didik yang melanggar peraturan. Menurut La Muing Made Ali:

Dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik, guru harus mengerahkan segala kemampuannya secara profesional. Seperti halnya dengan penerapan hukuman, guru harus hati-hati dalam melaksanakannya. Hukuman dilakukan pada waktu, cara dan sasaran yang tepat. Tidak semua peserta didik yang dihukum mendapatkan perlakuan atau hukuman yang sama. Hal ini dikarenakan ada peserta didik cukup menghukumnya dengan menggunakan bahasa tubuh seperti mendiamkannya. Ada juga cara menghukumnya dengan memberikan ancaman. Tidak jarang pula ada yang dihukum dengan memberikan hukuman fisik.³⁹

Hasil wawancara tersebut mengisyaratkan bahwa tidak semua hukuman dilakukan dengan cara yang sama. Hal itu disebabkan setiap peserta didik memiliki karakter yang berbeda. Oleh karena itu perlakuan yang berbeda pula harus dilakukan dalam menerapkan hukuman kepada peserta didik yang melanggar peraturan.

Dalam menghadapi berbagai macam karakter yang dimiliki oleh peserta didik dalam proses pendidikan, pendidik dituntut untuk memahami betul setiap karakter yang dimiliki oleh peserta didiknya. Alasannya karena ada anak yang tipikalnya memang penurut sehingga dalam mengarahkannya tidak membutuhkan tenaga ekstra, tetapi sebaliknya ada yang mesti harus menggunakan strategi yang bermacam-macam. Dalam menghadapi peserta didik yang memiliki karakter sabar atau penurut, mungkin cukup hanya dengan menasihatinya, tetapi tidak demikian dengan anak yang memiliki karakter “keras”. Jika teladan atau nasehat tidak berhasil maka tindakan tegas pun perlu dilakukan yaitu hukuman.

³⁹La Muing Made Ali, Guru Ekonomi, *Wawancara* oleh Penulis di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang tanggal 4 Desember 2012.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa guru dan observasi di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang, penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa jenis hukuman yang diberikan guru kepada peserta didik yang melanggar peraturan sekolah, yaitu sebagai berikut:

1. Hukuman dalam bentuk isyarat

Sebagian guru menganggap bahwa hukuman yang tepat digunakan bagi peserta didik jika melanggar peraturan adalah dengan cara memberikan isyarat melalui mimik atau pantomimik, misalnya dengan pandangan mata, raut muka, gerakan anggota tubuh, dan sebagainya. Hukuman isyarat ini biasanya digunakan terhadap pelanggaran ringan yang sifatnya preventif terhadap perbuatan atau tingkah laku peserta didik. Tetapi isyarat ini merupakan manifestasi dari perbuatan yang dikehendaki dan tidak berkenan dengan hati orang lain, atau dengan kata lain tingkah laku salah.

Hasil wawancara peneliti dengan Alimuddin, berkaitan dengan pemberian hukuman berbentuk isyarat adalah:

Terkadang dalam proses pembelajaran bentuk hukuman yang saya berikan ketika ada peserta didik yang tidak fokus, mengganggu temannya atau melakukan aktivitas lain selain belajar adalah menampakkan wajah masam untuk menunjukkan ketidaksukaan terhadap apa yang dilakukannya. Cara ini menurut saya dapat menimbulkan kesadaran peserta didik dan berusaha mengoreksi diri dari kesalahan yang tidak disukai.⁴⁰

Menurut peneliti pemberian hukuman dalam bentuk isyarat dengan cara menampakkan wajah marah sebagai pertanda tidak menyukai sikap peserta didik terhadap sikapnya merupakan salah satu cara yang bijak dalam pemberian hukuman. Alasannya karena hukuman isyarat dapat dilakukan dalam waktu yang singkat pada

⁴⁰ Alimuddin, Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang, *Wawancara* oleh Penulis di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang tanggal 26 Desember 2012.

saat pelanggaran terjadi. Selain itu melalui hukuman isyarat peserta didik yang melakukan pelanggaran segera mengetahui bahwa apa yang dilakukannya salah.

2. Hukuman dalam bentuk perbuatan.

Hukuman dalam bentuk perbuatan merupakan hukuman bagi peserta didik yang berhubungan dengan pendidikan misalnya memberikan pekerjaan rumah (PR) yang jumlahnya tidak sedikit, merangkum pelajaran, kultum atau pidato di depan kelas, atau membuat kliping. Hasil wawancara dengan Muliati Tutu terkait dengan hukuman dalam bentuk perbuatan adalah

Pada dasarnya setiap guru harus berupaya untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang baik. Akan tetapi terkadang ada peserta didik yang memang sering mengganggu proses pembelajaran. Jika dalam proses pembelajaran ada yang bertindak demikian maka saya berikan hukuman yang sifatnya mendidik dan berhubungan dengan mata pelajaran, misalnya membuat rangkuman tentang materi yang sedang dipelajari atau membuat kliping.⁴¹

Menurut peneliti hukuman yang berkaitan dengan pendidikan merupakan salah satu metode hukuman yang mendidik. Hal ini perlu dilakukan karena selain dapat menimbulkan sikap jera pada peserta didik yang melanggar peraturan juga dapat berkontribusi pada pemahaman peserta didik tentang materi yang dipelajari.

3. Hukuman dalam bentuk perkataan.

Hukuman dalam bentuk perkataan adalah hukuman yang dijatuhkan kepada peserta didik melalui perkataan seperti teguran, nasihat bahkan ancaman. Biasanya bentuk sanksi teguran dan nasihat diterapkan kepada peserta didik yang melakukan jenis pelanggaran ringan serta melakukan pelanggaran baru pertama kali, seperti terlambat ke sekolah atau menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Pemberian sanksi teguran dan nasihat dapat dilakukan oleh BK juga guru.

⁴¹Muliati Tutu, Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang, *Wawancara* oleh Penulis di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang tanggal 1 Desember 2012.

Pemberian nasihat dan teguran diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran serta tidak mengulangi perbuatan yang keliru lagi.

Dalam pemberian teguran terkadang guru juga memberikan ancaman. Walaupun pada dasarnya guru tidak boleh memberikan ancaman kepada peserta didik karena dikhawatirkan dapat merusak mental, tetapi alasan guru memberikan ancaman adalah sebagai usaha preventif atau pencegahan terhadap timbulnya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan.

Hasil wawancara peneliti dengan Muh. Kasim terkait dengan hukuman dalam bentuk perkataan adalah

Jika ada peserta didik yang melakukan pelanggaran dalam kategori ringan dan baru dilanggar satu kali maka biasanya hanya dinasehati dan diberikan teguran. Diharapkan pemberian nasihat dan teguran mampu membuat peserta didik jera.⁴²

Pada umumnya setelah pemberian nasihat dan teguran peserta didik merasa malu pada teman sebayanya sehingga hal ini membuat mereka jarang melakukan pelanggaran lagi.

4. Hukuman dalam bentuk administrasi

Adapun jenis hukuman dalam bentuk administrasi adalah hukuman yang berbentuk surat pernyataan atau surat peringatan tertulis. Hukuman dalam bentuk administrasi diberikan kepada peserta didik yang telah melakukan pelanggaran lebih dari 3 kali. Surat peringatan tertulis ada dua, yaitu surat peringatan tertulis yang ditujukan kepada peserta didik dan surat keterangan tertulis yang ditujukan kepada orang tua/wali peserta didik. Surat keterangan tertulis yang ditujukan kepada orang

⁴²Muh. Kasim. M, Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris, *Wawancara* oleh Penulis di SMA Negeri 1 Lembang tanggal 20 Desember 2012.

tua/wali peserta didik diberikan jika yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran lebih dari 2 kali.

5. Hukuman dalam bentuk sosial

Hukuman dalam bentuk sosial untuk pelanggaran ringan dan berat. Bentuk hukuman sosial misalnya membersihkan kelas, membersihkan kamar mandi atau membersihkan ruang guru. Sebenarnya hukuman yang bersifat sosial sangat terkait dengan privasi peserta didik. Biasanya dalam menjalankannya peserta didik merasa sangat malu jika dibandingkan dengan bentuk hukuman yang lain karena disaksikan oleh teman kelasnya, bahkan semua yang ada di dalam lingkungan sekolah. Sebagaimana hasil wawancara dengan guru BK yang mengatakan bahwa

Peserta didik yang mendapatkan hukuman dalam bentuk sosial biasanya menolak pada awalnya dan meminta diganti dengan sanksi yang lain, alasannya karena malu. Dalam menjalankan hukuman tersebut mereka malu dilihat teman-temannya. Biasanya peserta didik sangat jera dengan jenis hukuman ini karena berkaitan dengan privasi mereka.⁴³

Semua sanksi pelanggaran yang ada di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang telah diberikan dan setiap yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan pembinaan. Pembinaan bagi pihak sekolah penting dilakukan agar peserta didik tidak mengulangi pelanggaran yang dilakukan. Jika pelanggaran terus menerus berlangsung dikhawatirkan akan mempengaruhi peserta didik yang lain.

Pemberian hukuman dan pembinaan di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang diharapkan dapat membentuk akhlak peserta didik menjadi baik, mengarahkan dan melatih peserta didik untuk bertanggungjawab atas perbuatannya. Hal yang tidak kalah pentingnya dalam pemberian hukuman adalah sikap pendidik sebaiknya membiasakan diri dan bersikap bersahabat dengan semua peserta didik

⁴³ST. Suleha, Guru BP SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang, *Wawancara* oleh Penulis di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang tanggal 27 Desember 2012.

termasuk yang melanggar peraturan. Hal tersebut penting karena dapat mendorong peserta didik untuk berubah ke arah yang lebih dan menganggap bahwa pelanggaran yang dilakukan merupakan perbuatan yang tercela.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberian Hukuman di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang Serta Solusinya

1. Faktor pendukung pemberian hukuman di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara maka penulis menemukan ada beberapa faktor yang mendukung pemberian hukuman di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya dukungan dari kepala sekolah, para guru dan seluruh sivitas sekolah dalam memberikan hukuman kepada peserta didik yang melanggar peraturan sekolah. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti bukan hanya guru BK yang terlibat dalam penerapan hukuman ketika ada peserta didik yang melanggar peraturan sekolah. Kepala sekolah termasuk petugas keamanan terlibat dalam mengawasi jalannya pelaksanaan hukuman yang diperoleh peserta didik. Kepala sekolah terlibat dengan cara mengamati kalau ada peserta didik yang diberi hukuman oleh guru atau BK. Jika ada peserta didik yang enggan melaksanakan hukuman yang diberikan, kepala sekolah memanggil peserta didik tersebut dan memberi pembinaan tersendiri serta dipisahkan dari peserta didik yang lain.
- b. Dengan adanya pemberian hukuman di sekolah tingkat kedisiplinan peserta didik meningkat. Selain itu kepala sekolah dan seluruh jajarannya mau terlibat dalam pembinaan kedisiplinan serta dukungan dari sebagian besar orang tua peserta didik. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dari 1000 jumlah peserta didik yang ada di

SMA Negeri 1 Lembang pada saat sudah ada temannya yang ditegur tentang penerapan aturan sekolah misalnya ukuran rambut, model pakaian, ribut di kelas dan hal lain yang menyangkut kedisiplinan peserta didik yang belum ditegur sudah berusaha untuk bersikap sesuai dengan peraturan sekolah. Pada saat peneliti mengadakan pengamatan per kelas dari penerapan aturan kalau dirata-ratakan dari jumlah peserta didik yang ada pada tiap kelas 50 sampai 52 peserta didik hanya 4 sampai 5 orang peserta didik yang peneliti temukan masih tetap melanggar peraturan sekolah setelah ada peserta didik yang sudah diberikan hukuman dengan jenis pelanggaran yang sama. Bahkan pada saat sudah ada peserta didik yang diberikan hukuman hari berikutnya peneliti tidak menemukan lagi pelanggaran yang sama di kelas lain.

- c. Sebagian besar peserta didik taat dan patuh terhadap peraturan-peraturan yang dibuat sekolah, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada beberapa peserta didik yang melanggar peraturan. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti
- d. Banyak peserta didik yang termotivasi dan sadar akan tanggungjawabnya sebagai peserta didik untuk menaati peraturan sekolah.

Faktor pendukung tersebut diperkuat hasil wawancara dengan guru BK yang mengatakan bahwa:

Penerapan hukuman pada sebuah institusi tidak akan berjalan mulus dan bertahan jika tidak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Seperti halnya penerapan hukuman di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang dapat berjalan sebagaimana mestinya karena adanya kerja sama yang solid dari semua warga sekolah termasuk kepala sekolah, guru dan peserta didik. Selain itu penerapan hukuman fisik atau non fisik di sekolah tetap digunakan karena terbukti dengan adanya penerapan hukuman maka tercipta penegakan kedisiplinan atau aturan yang berlaku. Kemudian faktor pendukung lainnya adalah sebagian besar telah menjalankan aturan yang ditetapkan sekolah.⁴⁴

⁴⁴Natsir AD, Guru BK SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang, *Wawancara* oleh Penulis di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang tanggal 6 Desember 2012.

2. Faktor penghambat pemberian hukuman di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang

Selain faktor yang mendukung pemberian hukuman, penulis juga menemukan ada beberapa faktor yang dapat menghambat jalannya pemberian hukuman di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang. Faktor penghambat penerapan hukuman di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang terbagi dua yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang timbul atau berasal dari pihak yang terlibat secara langsung dalam penerapan hukuman, yaitu peserta didik dan guru.

1. Peserta didik. Kepribadian peserta sangat berpengaruh terhadap ketaatan peserta didik dalam mematuhi peraturan sekolah. Kepribadian peserta didik akan terwujud dalam tingkah lakunya. Jika kepribadian peserta didik baik maka berpengaruh terhadap ketaatan mereka dalam mematuhi peraturan sekolah. Namun jika kepribadian peserta didik buruk maka akan terwujud dalam lemahnya kemauan atau kesadaran mereka untuk mematuhi peraturan sekolah.

2. Guru. Perbedaan persepsi tentang bentuk hukuman yang relevan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan peserta didik berdasarkan pengamatan penulis adalah hal yang biasa muncul pada saat peserta didik sementara melaksanakan hukuman yang diberikan oleh salah seorang dari komponen yang ada di lingkungan sekolah. Hal ini menurut penulis sebagai hambatan yang sifatnya internal dalam penerapan hukuman di lingkungan sekolah.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor luar atau faktor yang tidak terlibat langsung dalam penerapan hukuman di sekolah. Faktor eksternal meliputi orang tua dan masyarakat.

1. Orang tua memiliki pengaruh dalam penerapan hukuman di sekolah. Latar belakang pendidikan orang tua sangat berpengaruh terhadap tingkat kepedulian orang tua peserta didik terhadap aturan sekolah, termasuk penerimaan orang tua peserta didik terhadap jenis hukuman yang diberikan kepada anaknya di lingkungan sekolah. Orang tua yang tingkat pendidikannya hanya setara SD atau SMP biasanya tingkat penerimaannya kurang. Hal ini terlihat ketika ada peserta didik yang diberi hukuman berupa panggilan orang tua atau wali mereka hanya mewakilkan kepada orang lain tanpa alasan yang jelas bahkan ada di antara orang tua peserta didik yang tidak memenuhi panggilan pihak sekolah. Kesadaran orang tua tentang pentingnya penerapan alat pendidikan termasuk hukuman untuk membentuk kepribadian dan pengendalian perilaku peserta didik juga berpengaruh terhadap tingkat penerimaan penerapan hukuman orang tua peserta didik di lingkungan sekolah apalagi kalau hal itu sudah menyangkut pada bentuk hukuman fisik. Bahkan pernah terjadi penerapan hukuman di sekolah sampai kepada ranah hukum karena orang tua peserta didik tidak menerima bentuk hukuman yang diberikan kepada anaknya di sekolah.

2. Masyarakat. Opini sebagian masyarakat yang menganggap bahwa penerapan hukuman dalam pendidikan tidak lagi relevan dengan kondisi sekarang. Hal ini merupakan salah satu penghambat dalam penerapan hukuman di sekolah. Keberadaan media sebagai wahana komunikasi publik baik media massa maupun media

elektronik memiliki pengaruh yang tak kalah hebatnya dalam membentuk opini masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru BK menguraikan bahwa:
Sebenarnya faktor utama yang dapat menghambat peserta didik dalam menaati peraturan sekolah adalah adanya faktor luar/eksternal berupa lingkungan. Peserta didik yang ada di sekolah ini berasal dari berbagai latar belakang keluarga yang berbeda serta lingkungan masyarakat yang berbeda. Hal inilah yang melahirkan pola pikir yang berbeda pula dari semua peserta didik. Ada peserta didik, dengan kesadarannya sendiri mau mematuhi peraturan sekolah. Ada pula yang nanti diberikan hukuman baru mau menaati peraturan sekolah. Hal yang sangat berpengaruh adalah tingkat pendidikan orang tua dan tingkat kepedulian orang tua terhadap proses pendidikan anak-anak mereka.⁴⁵

Kedua faktor yang telah disebutkan baik faktor intern maupun faktor eksternal dapat mempengaruhi paradigma berpikir serta perilaku peserta didik, karena adanya stimulus dari luar yang diterima oleh panca indera kemudian direspon melalui pikiran dan tindakan peserta didik.

3. Solusi terhadap faktor penghambat pemberian hukuman di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang

Menurut penulis ada beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh pihak sekolah sebagai upaya solutif dalam mengatasi faktor penghambat pemberian hukuman di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang yaitu sebagai berikut:

- a. Sebaiknya guru mengadakan kunjungan ke rumah peserta didik yang bermasalah atau *home visit*. Hal ini perlu dilakukan agar guru mengetahui serta memperoleh informasi yang valid tentang peserta didik. Sebab tidak menutup kemungkinan peserta didik yang pernah atau sering melakukan pelanggaran sekolah diakibatkan

⁴⁵ Muhammad Rais, Guru BP SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang, *Wawancara* oleh Penulis di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang tanggal 17 Desember 2012.

ada masalah keluarga atau mungkin saja peserta didik ini kurang mendapatkan perhatian dari keluarganya.

b. Mengundang orang tua peserta didik yang bermasalah untuk konsultasi dan diskusi untuk mencari jalan keluar terbaik.

c. Sebaiknya pihak sekolah terutama guru tetap menjalin hubungan yang baik kepada semua peserta didik sehingga mereka (peserta didik) merasa diperhatikan dan dampaknya dapat berpengaruh terhadap ketaatan mereka dalam mematuhi peraturan sekolah.

d. Pihak sekolah sebaiknya selalu menjaga dan menjalin silaturahmi kepada semua orang tua peserta didik sehingga jika ada peserta didik yang bermasalah pihak sekolah dan orang tua peserta didik dapat duduk bersama dalam mencari solusi terbaik untuk mengatasi masalah tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Persepsi guru di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang berbeda tentang kesesuaian jenis pelanggaran dan jenis sanksi yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.

2. Pada dasarnya proses pemberian hukuman terhadap peserta didik di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang dimulai dari hukuman ringan, hukuman sedang sampai kepada hukuman berat.

3. Faktor yang mendukung dan menghambat pemberian hukuman di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang.

Ada beberapa hal yang mendukung dalam pemberian hukuman di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang yaitu dukungan dari kepala sekolah dan guru, dengan adanya penerapan hukuman tingkat kedisiplinan peserta didik meningkat. Selain itu sebagian peserta didik memiliki kesadaran sendiri dalam menaati peraturan sekolah meskipun ada juga peserta didik yang masih melanggar peraturan. Hal yang tak kalah pentingnya dalam faktor pendukung penerapan hukuman adalah adanya kesadaran dari setiap guru untuk menjadi teladan bagi peserta didik seperti dalam hal mematuhi peraturan sekolah.

Sebuah peraturan akan dapat berjalan lancar jika mendapat dukungan. Namun demikian perlu disadari bahwa sebuah peraturan tidak menutup kemungkinan akan mendapat hambatan dalam penerapannya. Seperti halnya dengan penerapan hukuman di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang, terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penghambat, yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor internal yaitu terkait dengan kepribadian peserta didik dan keberadaan guru. Kesadaran dari peserta didik serta persepsi guru tentang penerapan hukuman merupakan hal yang sangat berhubungan dengan penerapan hukuman.
- b. Faktor eksternal yaitu terkait dengan peran orang tua dan masyarakat. Tingkat pendidikan dan kepedulian orang tua berpengaruh terhadap penerapan hukuman di sekolah. Selain itu opini masyarakat tentang penerapan hukuman di sekolah berpengaruh bagi pelaksanaan hukuman.

Dalam upaya mengatasi beberapa hambatan yang dihadapi pihak sekolah terkait dengan penerapan hukuman di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang, maka langkah yang dilakukan sebagai upaya solutif yaitu pihak sekolah senantiasa menjaga hubungan dan komunikasi yang baik dengan masyarakat terutama orang tua peserta didik seperti mengadakan *home visit* dan diskusi dengan orang tua peserta didik jika ada anaknya yang bermasalah di sekolah.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, implikasinya dapat ditujukan pada pihak yang berperan penting dalam mengembangkan karakter positif pada generasi muda yaitu:

1. Untuk para pendidik khususnya pendidik di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang dalam menggunakan metode dan alat pendidikan, termasuk hukuman dianjurkan agar berlaku adil dan bijaksana. Penerapan hukuman selayaknya digunakan sebagai solusi terakhir dalam membina dan mendidik kepribadian peserta didik tanpa mengabaikan kaidah dan syarat-syarat yang berlaku.

2. Keberadaan lingkungan baik keluarga, masyarakat maupun sekolah sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter peserta didik. Oleh karena itu ketiga

elemen ini perlu menjalin komunikasi dan kerja sama yang baik dalam pembinaan kepribadian peserta didik.

3. Keberhasilan pembentukan kepribadian yang baik maka sinkronisasi peran keluarga, sekolah dan masyarakat adalah hal yang penting diperhatikan oleh pihak yang bertanggungjawab pada ketiga lingkungan ini. Hal ini perlu agar dampaknya dapat berpengaruh pada kepatuhan dan ketaatan peserta didik dalam mematuhi peraturan sekolah sehingga penerapan hukuman tidak perlu lagi dilakukan. Sebijak apapun penerapan hukuman akan memberikan dampak yang kurang baik bagi peserta didik karena dapat menimbulkan sikap pendiam, pendendam, bahkan pembangkang lantaran malu menerima hukuman. Tugas seorang guru sangat mulia sehingga dibutuhkan pribadi-pribadi yang berwawasan luas, berjiwa lapang, dan berkepribadian yang luhur, nurani yang peka, sehingga mereka yang mendapatkan amanah dari orang tua mampu menunaikan amanah itu dengan jiwa yang ikhlas, kecerdasan yang lebih dalam memilih cara dan metode pembentukan pribadi peserta didik termasuk dalam menentukan bentuk hukuman yang tetap terhadap pelanggaran yang sama tetapi dilakukan oleh pribadi dengan karakter yang beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Majid, Abd. & Muhaimin, *Pemikiran Pendidikan Islam; Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar*. Bandung: Trigenda Karya, 1993.
- Abdullah Munir, Abdullah. *Pendidikan Karakter; Membangun Karakter Anak Sejak dari Rumah*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Abadi, 2010.
- Arief, Armai. *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Arifin, H.M. Ilmu Pendidikan Islam; *Tinjauan Teoretis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisilner*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rnika Cipta, 2007.
- Baharuddin, *Teori Belajar dan Pembelajaran*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007.
- Bambang Setiyadi, Ag. *Metode Penelitian untuk Pengajaran Bahasa Asing Pendekatan Kuantitatif dan kualitatif*. Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Buchari, Muctar. *Spektrum Problematika Pendidikan di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Tiara Wacana Yogya, 1994.
- Chatib, Munif. *Sekolahnya Manusia: Sekolah Berbasis Multiple Intelegency di Indonesia*. Cet. I; Bandung: Kaifa, 2009.
- Collins, Mallary M. *Mengubah Perilaku Siswa Pendekatan Positif*. Terj. Jakarta: BPK Gunung Mulia; 1992.
- Dalyono, M. *Psikologi Pendidikan*. Cet. V : Jakarta, 2009.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. IX; Bandung: Diponegoro, 2007.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. 3; Balai Pustaka, 1990.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. I, Edisi III; Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Desmita. *Psikologi Perkembangan Peserta Didik: Panduan bagi Orang Tua dan Guru dalam Memahami Psikologi Anak Usia SD, SMP, dan SMA*. Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Djamarah, Syaiful Bahri. *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Istadi, Irawati. *Agar Hadiah dan Hukuman Efektif*. Jakarta, 2005.
- al-Khusyt, Muhammad Ustman. *Membangun Harmonisme Keluarga*. Cet. I; Jakarta: Qisthi Press, 2007.

- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Mujib, Abdul. *Ilmu Pendidikan Agama Islam*. Cet.I; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Paul, Henry A. *Konseling dan Psikoterapi Anak; Panduan Lengkap Memahami Karakter, Perasaan dan Emosi Anak*. Yogyakarta: Idea Publishing, 2008.
- Purwanto, M. Ngalim. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Cet.VII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Purwanto, M. Ngalim. *Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Prayitno. *Dasar Teori dan Praktis Pendidikan*. Cet. I; Jakarta: Grasindo, 2009.
- Rahman, Arif. *Spektrum Problematika Pendidikan di Indonesia*. Cet. V; Surabaya: Laksbang Mediatama Yogya, 2009.
- Rahmat, Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi*. Cet. XXII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 7.
- Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Rivai, Veithzal dan Murni, Sylviana. *Education Managemen Analisis Teori dan Praktik*. Cet. II; Jakarta: Rajawali Pres. 2010.
- Schaefer, Charles. *Cara Efektif mendidik dan Mendisiplinkan Anak*. Terj. Jakarta: Mitra Utama, 1994.
- Stephen P. Robbins. *Perilaku Organisasi Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Suair, Scoot. *Motivasi Leadership*. Cet. I; Jakarta: Prenada, 2008.
- Suardiman, Siti Pratini. *Psikologi Perkembangan*. Cet. I; Yogyakarta: t.p. 1990.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Cet. VI; Bandung: CV. Alfabeta, 2009.
- Sukardi. *Guru Powerful Guru Masa Depan*. Cet. III; Bandung: Kolbu, 2009.
- Sukardi, Dewa Ketut. *Proses Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Tilaar, H.A.R. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Cet. II; Jakarta: Rineka cipta, 2004.
- Ulwan, Abdullah Nasih. *Pendidikan Anak dalam Islam*. terj. Jamaludin Miri (Jakarta, 1994.

Woolfolk, Anita E. dan McCune-Nicolich, Lorraine. *Mengembangkan Kepribadian & Kecerdasan Anak-Anak*. Cet.I: Inisiasi Pres; Jakarta, 2004.

Zuhairimi, dkk. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Zainu, Syaikh Muhammad bin Jamil. *Seruan Kepada Pendidik dan Orangtua*, terj. Abu Hanan dan Ummu Dzakiyya. Solo, 2005.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ori Pelanggaran Berat:

b.

d.

ori Pelanggaran sedang:

b.

d.

ori Pelanggaran Ringan:

b.

d.

pelanggaran

Sering terjadi

Kadang-kadang

Jarang

angsi

angsi fisik

b. Non Fisik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

- a. b.
- c. d.

- a.  b. 
- c.  d. 

- a.  b.
- c.  d.

- a. Sering terjadi
- b. Kadang-kadang
- c. Jarang

- a. Sangsi fisik

PEDOMAN WAWANCARA

Tesis” PERSEPSI GURU TENTANG PROSES PEMBERIAN HUKUMAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH “(STUDI KASUS DI SMA NEGERI 1 LEMBANG KABUPATEN PINRANG)

I. IDENTITAS INFORMAN

Nama :

NIP :

Pangkat Golongan :

Umur :

Pendidikan :

II. Pertanyaan untuk Guru (Informan) Terkait dengan Persepsi

- a. Apakah Bapak/Ibu pernah dihukum pada saat sekolah?
- b. Siapa yang memberi hukuman?
- c. Bentuk pelanggaran apa yang bapak/ Ibu lakukan?
- d. Menurut Bapak/ Ibu apakah hukuman itu sudah setimpal dengan kesalahan yang Bapak / Ibu perbuat?
- e. Bentuk hukuman yang apa yang Bapak / Ibu peroleh?
- f. Pernahkah Bapak/Ibu memberikan hukuman kepada peserta didik?
- g. Bentuk pelanggaran apa yang dilakukan oleh peserta didik Bapak/Ibu?
- h. Bagaimana bentuk hukuman yang bapak /Ibu berikan?
- i. Pernahkah Bapak/Ibu menyaksikan rekan bapak/Ibu memberikan hukuman terhadap peserta didik yang melanggar tata tertib?
- j. Bentuk hukuman apa yang diterapkan oleh rekan Bapak /Ibu?
- k. Bentuk pelanggaran apa yang dilakukan oleh peserta didik Bapak/Ibu?

- l. Menurut Bapak/Ibu apakah hukuman itu sudah sesuai dengan bentuk kesalahan peserta didik?
- m. Apakah Bapak Ibu setuju dengan penerapan hukuman penerapan hukuman di lingkungan sekolah?
- n. Kalau Bapak setuju apa alasannya?
- o. Kalau tidak setuju apa alasannya?
- p. Adakah keluarga Bapak/Ibu yang pernah mendapat hukuman di sekolah?
- q. Bentuk hukuman apa yang diperoleh oleh keluarga bapak /Ibu?
- r. Menurut Bapak/Ibu apakah hukuman itu sudah setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan oleh keluarga Bapak/Ibu?
- s. Pernahkah Bapak/Ibu mendengar secara langsung keluhan dari orang tua peserta didik tentang peberapan hukuman di sekolah?
- t. Apa bentuk keluhan itu?
- u. Apakah Bapak/bu menanggapi secara langsung?
- v. Kalau iya apa alasannya?
- w. Kalau tidak apa alasannya?
- x. Apa tujuan Bapak/Ibu memberikan hukuman?
- y. Pernahkah Bapak/Ibu berfikir hukuman yang diberlakukan kepada peserta didik sangat berpengaruh terhadap perkembangan psikologi peserta didik?
- z. Apakah hukuman di lingkungan sekolah masih relevan dengan kondisi sekarang? Apa komentar Bapak/Ibu?

PEDOMAN WAWANCARA

(Kepala Sekolah)

1. Adakah tata tertib yang baku di sekolah yang Bapak pimpin?
2. Adakah format jenis bentuk hukuman terhadap pelanggaran yang baku?
3. Apakah orang tua peserta didik, Bapak libatkan dalam proses pembentukan tata tertib tersebut?
4. Pernahkah ada pihak yang komplek terhadap penerapan aturan di sekolah yang Bapak pimpin?
5. Menurut Bapak apakah guru dalam menerapkan hukuman sudah sesuai dengan harapan Bapak selaku pimpinan di sekolah ini?
6. Apa pertimbangan Bapak sehingga penerapan poin tidak lagi tepat di berlakukan di sekolah ini?

Lembar Observasi

1. Proses pembuatan peraturan sekolah (tata tertib)
2. Pelanggaran yang dilakukan peserta didik
3. Proses penanganan terhadap peserta didik yang melanggar peraturan sekolah
4. Tanggapan pendidik terhadap proses pemberian hukuman terhadap peserta didik yang melanggar
5. Faktor pendukung pemberian hukuman
6. Faktor penghambat pemberian hukuman
7. Upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada proses pemberian hukuman
8. Jenis hukuman yang diberikan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik.

DAFTAR INFORMAN

1. Drs.H.M. Darwis. L, M.Pd, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang
2. Drs. Muhammad Rais, Guru BP SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang
3. Dra. Muliati Tutu, Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang
4. A. Nurhidaya, S. ip, Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang
5. Sukmawati, S. Pd, Guru Mata Pelajaran Matematika SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang
6. Muh. Kasim, S. Ag, Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang
7. La Muing Made Ali, SE, Guru Ekonomi SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang
8. Mansur, S. Pd, Guru Mata Pelajaran Sejarah SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang
9. Alimuddin, S.Pd, Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang
10. Drs. Muh. Natsir AD, Guru BK SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang/Wakasek Bagian Humas
11. ST. Suleha, S.Pd, Guru BP SMA Negeri 1 lembang Kabupaten Pinrang/Wakasek Bagian Kesiswaan
12. Mansur, S.Pd, Guru Mata Pelajaran Sejarah SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Pinrang
13. Hj. Nawati, Pegawai TU
14. Arifuddin A.Ma, Kepala TU
15. Novita Sari A, Peserta Didik kelas XI

JADWAL KEGIATAN

Bulan																													
Kegiatan	November				Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei				
Observasi																													
Reduksi Data																													
Display Data																													
Penarikan Kesimpulan																													
Penulisan Tesis																													

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama, Adriwati, Lahir di palirang kabupaten pinrang Sulawesi Selatan, 24 Januari 1975 dari pasangan Amir Paga B.A., dan Ratna Koni A. Ma. Tamat sekolah dasar di Madrasah Ibtidaiyyah DDI Tuppu pada tahun 1987, kemudian melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Putri DDI Lil Banat Ujung Lare Pare-Pare, Tamat Tsanawiyah pada tahun 1990 dan melanjutkan ke tingkat Aliyah dan tamat pada tahun 1993. Kemudian penulis melanjutkan kuliah di IAIN Alauddin Ujung pandang (sekarang UIN Alauddin Makassar), Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam (S1), lulus tahun 1997 dengan IPK 3,20.

Selama menjadi siswa di Madrasah Aliyah DDI Lil Banat Pare-Pare penulis pernah menjadi ketua Osis pada periode 1991-1992 dan aktif menjadi anggota Fatayat DDI. Pada saat menjadi Mahasiswa penulis tercatat sebagai anggota IMDI komisariat IAIN Alauddin Makassar.

Sejak tamat S.1 pada tahun 1997 periode November penulis mengabdikan di SMA Negeri 1 Lembang sebagai Guru tidak tetap, sampai tahun 2003, kemudian diangkat menjadi PNS pada tahun 2003 di SMA Negeri 1 Sumarorong Kabupaten Mamasa sampai tahun 2008, kemudian pada bulan Oktober 2008 penulis dipindah tugaskan ke SMA Negeri 1 Lembang kabupaten Pinrang sampai tahun 2013, kemudian Penulis dipindah tugaskan ke SMK Negeri 1 Pinrang pada bulan Juli 2013 sampai sekarang.

Penulis menikah dengan Sukri, S.E, M. Si., pada tanggal 26 September tahun 2011 dan telah dikarunia seorang anak Muhammad Rayyan (11 Agustus 2012M/ 20 Ramadhan 1433 H). Tahun 2010 terdaftar sebagai mahasiswa Pascasarjana UIN Alauddin Makassar sebagai mahasiswa reguler.

TATA TERTIB SMA NEGERI 1 LEMBANG KABUPATEN PINRANG

1. Keterlambatan, mencakup:
 - a. Terlambat masuk sekolah
 - b. Terlambat masuk karena izin keluar
 - c. Izin keluar pekerjaan sekolah dan tidak kembali lagi
2. Kerajinan, mencakup:
 - a. Siswa tidak masuk karena sakit dengan keterangan atau tanpa keterangan (alpa)
 - b. Tidak masuk dengan keterangan palsu
 - c. Meninggalkan kelas tanpa keterangan dan tidak kembali lagi
 - d. Tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler/sakit
 - e. Tidak mengikuti upacara bendera hari Senin dan hari besar nasional
 - f. Tidak mengikuti kegiatan hari besar agama di sekolah
3. Kerapian, mencakup:
 - a. Seragam tidak sesuai dengan ketentuan
 - b. Seragam tidak lengkap
 - c. Tidak memasukkan baju seragam
 - d. Tidak bersepatu hitam
 - e. Baju ketat, rok di atas mata kaki
 - f. Seragam sobek dan ada coretan
 - g. Menggunakan topi selain topi OSIS di lingkungan sekolah
 - h. Mengubah pakaian seragam (Baju, Celana, Rok dan Jilbab)
 - i. Memakai sandal, sepatu sandal ke sekolah
 - j. Siswa berhias berlebihan
 - k. Siswa memakai perhiasan (aksesoris)
 - l. Siswa berambut panjang
 - m. Mencat rambut, kuku tangan dan kaki

n. Bertato

4. Kepribadian, mencakup:

- a. Bermesraan di lingkungan sekolah
- b. Meludah tidak pada tempatnya
- c. Membuang sampah sembarangan
- d. Merusak tanaman hias dan pohon
- e. Melanggar norma susila
- f. Mencuri/mengambil barang milik orang lain
- g. Mencoret-coret dinding, tembok, meja, kursi dan pagar sekolah
- h. Menulis atau mencoret buku paket sekolah
- i. Mengambil dengan paksa (merampas)
- j. Merusak/menghilangkan harta benda milik sekolah, guru, karyawan dan teman
- k. Keluar tanpa melalui pintu depan

5. Ketertiban, mencakup:

- a. Membawa rokok sendiri/titipan
- b. Menghisap rokok di lingkungan sekolah
- c. Memperjualbelikan rokok
- d. Membawa buku/majalah/kaset/VCD porno, membawa sendiri atau titipan
- e. Menjualbelikan/ menyewakan buku, majalah/kaset VCD porno
- f. Mengajak, membawa/ memperjualbelikan/ menyewakan barang-barang tersebut
- g. Membawa senjata tajam dan senjata api
- h. Menggunakan senjata tajam dan senjata api
- i. Menyuruh membawa/mempergunakan senjata tajam dan senjata api
- j. Membawa/mempergunakan narkoba dan zat adiktif lainnya
- k. Memperjualbelikan narkoba dan zat adiktif lainnya
- l. Mengajak untuk membawa/memperjualbelikan narkoba dan zat adiktif lainnya
- m. Membawa HP

- n. Menghasut dan mengkoordinir hingga menimbulkan perkelahian
 - o. Perkelahian di lingkungan sekolah
 - p. Perkelahian di luar lingkungan sekolah
 - q. Terlibat dalam tawuran pelajar
 - r. Membawa alat judi
 - s. Terlibat perjudian/taruhan
 - t. Memarkir kendaraan secara sembarangan
 - u. Menerima tamu tanpa melaporkan ke tugas piket
 - v. Mengganggu kelas yang sementara belajar
 - w. Ditemukan di luar sekolah pada saat jam pelajaran berlangsung
 - x. Naik kendaraan di lingkungan sekolah dengan ugal-ugalan
6. Pelanggaran terhadap Kepala Sekolah, Guru dan Karyawan, mencakup:
- a. Melawan Kepala Sekolah, Guru dan Karyawan dengan ucapan/tulisan dengan kata-kata kasar
 - b. Melawan Kepala Sekolah, disertai ancaman
 - c. Melawan Kepala Sekolah, Guru dan Karyawan disertai pemukulan.

Adapun proses hukuman yang diberikan kepada peserta didik yang melanggar peraturan sekolah, adalah sebagai berikut:

1. Teguran dan peringatan secara lisan sebanyak tiga kali (3X)
2. Peringatan tertulis sebanyak 2 kali (2X) yang diketahui oleh wali kelas, guru BK, dan orang tua wali.
3. Peringatan tertulis ketiga kalinya dengan memanggil orang tua/wali ke sekolah
4. Skorsing (dinonaktifkan dari sekolah untuk sementara)
5. Dikembalikan kepada orang tua